ISSN: 0215-076X
NOMOR 5
1987

DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK

PORKAS MASUK KAMPUS ?

TUKANG BECAK DAN TELEVISI

BALAIRUNG
NAFAS INTELEKTUALITAS MAHASISWA

NOMOR 5 1987

kulit muka • gendon soebandon

DAPUR BALAIRUNG

Apalah arti hari kelahiran, demikian sebagian orang berkata. Terlebih lagi: apa maknanya untuk diperingati? Hari ulang tahun hanya sebagai salah satu alat ukur, dan sebuah momen membuat alasan untuk berbuat lebih banyak. Bagi organisasi-organisasi-apalagi yang usianya belum banyak — makna peringatan ini menjadi lebih besar lagi; sebagai saat-saat pula untuk penanaman eksistensi. Pula berkesempatan berbuat kepada orang lain yang lebih banyak lagi.

WALUYO TS

Bagian Publikasi sedang menyebar Poster Ulang Tahun.

Tanggal 6 Mei 1987 lalu STT majalah BALAIRUNG genap berusia satu tahun. Tanggal ini kemudian kami gunakan sebagai hari kelahiran, meskipun sebenarnya ada 3 "hari kelahiran" BALAIRUNG. Pertama adalah saat disepekatinya berdiri majalah ini ketika Seminar Pers Mahasiswa UGM 29 Oktober tahun 1985, yang kedua adalah ketika majalah ini terbit perdana tanpa STT, persis saat **Prof. Koesnadi** dilantik menjadi Rektor UGM tanggal 8 Januari 1986.

Tidak ada pemotongan tumpeng, tidak ada pesta-pesta. Yang ada adalah suasana kerja untuk mempersiapkan nomor ini, di samping para pengurus mulai sibuk menjalani ujian semesteran. Juga sibuk melaksanakan serangkaian "kerja" pada acara peringatan ulang tahun. Banyak acara akan kami lakukan mulai bulan-bulan ini, antara lain: *Riset Pembaca, Lomba Foto Aktivitas Pemuda/Mahasiswa, Lomba Menulis Kritik, Lomba Kartun Karikatur, Seminar Orientasi Kegiatan Kemahasiswaan, Studium Generale, Penerbitan Antologi Puisi, dll.*

Kami memang ingin berbuat lebih banyak untuk kalangan yang lebih luas lagi, sejauh yang kami mampu. Tidak sekadar menerbitkan majalah. Acara-acara yang kami buat tersebut selama ini belum ada yang melakukan, sedang urgensinya sangat tinggi bagi dunia Pendidikan Tinggi.

Penjaga Dapur

KONTAK

SARANG LABA-LABA

I

Sangat riskan, dari sekian banyak fakultas di UGM ini, ternyata kehidupan mahasiswa dengan SEMA-nya hanya beberapa saja yang tampak. Hal seperti ini sulit dimengerti, mengapa dapat terjadi justru di UGM, perguruan tinggi besar ini.

Yang perlu dipertanyakan adalah, untuk apakah anda-anda dulu turut mencalonkan diri? Sekadar tercatat dalam sejarah. Macam itu jelas tak bisa ditolerir lagi.

Saya berani mengatakan demikian karena pada dasarnya, organisasi mahasiswa tersebut sangat dibutuhkan guna membangun kehidupan mahasiswa di sana, baik sebagai penyalur kegiatan akademis maupun sebagai alat penghubung suara antara mahasiswa dengan pihak pengurus fakultas.

Kalaulah alasannya hanya karena telah mengganggu belajar, bukankah sejak dini mereka juga sudah dijelaskan panjang lebar tentang tidak bolehnya antara belajar dan berkegiatan? Marilah kita renungkan bersama, agar tulisan ini ditanggapi dengan jiwa kesatria dan dewasa.

Sedikit catatan, mengingat dalam semester depan (ganjil) ini akan diadakan pergantian pengurus SEMA, bagi yang akan mencalonkan diri, jika anda sudah benar-benar yakin punya banyak waktu luang hingga tak mengganggu kuliah. Maka andaikata jawabnya belum, lebih baik urungkan niat anda *mencalonkan* atau *dicalonkan*. Sebab SEMA itu sendiri harusnya diurus oleh para mahasiswa yang *tahan bantingan* dan tidak cengeng.

II

Yang kedua, saya juga memohon "Catatan Peristiwa" nya Balairung tidak didominasi oleh aktivitas unit-unit yang ada di Gelanggang itu saja, oleh karenanya perlu perimbangan pada ke-20 SEMA yang ada di kampus Sekip dan Bulaksumur itu, okey SEMA? Semoga kau bangkit dari lelap tidurmu.

AGUS SUMARWOTO
TE. FNT/1328

MAJALAH KAMPUS BUKAN SEKADAR DI KAMPUS

Saya sangat bersyukur bahwa majalah kita ini dapat terbit dengan lancar setiap dua bulan sekali. Namun di balik itu ada yang mengganjal dalam benak saya, apakah majalah kita ini hanya untuk kampus kita saja? Artinya apakah penyuplaian majalah kita ini terbatas hanya di kampus tercinta ini?

Saya kira sudah waktunya "BR" membawa misi kita ke luar (misalnya ke luar kampus UGM atau ke luar daerah).

Mmm... ya... saya pernah ditanya oleh alumni kita yang dari luar Jawa tentang "BR". Ini bagaimana, apakah tidak ada komunikasi dengan mereka? Saya percaya "BR" bisa berkomunikasi dengan mereka, bahkan lebih dari itu.

.A.H Saka
FaSa GAMA

Mendompleng. *Pembangunan gedung STIE GAMA? Bukan! Yang sedang dibangun di atas adalah Wisma Kagama. Dan STIE GAMA, yang tak ada hubungannya sama sekali dengan UGM, cukup cerdik untuk "mendompleng", memasang spanduk. Maka terkesan, yang sedang dibangun adalah STIE GAMA.*

(B.S/Riq)

BUILT IN CONTROL TOOL

Omong-omong soal *control* berarti bicara masalah yang prinsip. Bicara soal prinsip ini bukan berarti latah dan bukan pula cuma ikut-ikutan untuk sekadar mengisi waktu senggang. Soalnya ialah control menempati posisi kunci di dalam mencapai tujuan suatu program yang dilaksanakan.

Tanpa control, suatu program tidak akan mencapai hasil yang sesuai dengan rencana. Ini pasti! Malah bisa menimbulkan penyimpangan, penyelewengan dan kebocoran!

Sering terdengar di dalam masyarakat adanya berita kejutan tentang kebocoran, penyimpangan dan juga peristiwa yang menyangkut penyelewengan besar dan kecil. Padahal menurut perkiraan sehat dan cara berpikir logis hal itu sesuatu yang mustahil. Toh terjadi juga. Apakah gerangan sebab-musabahnya?

Jawabannya macam-macam. Ada yang menjawab karena administrasi yang belum sempurna, pendapatan yang masih rendah, dan pengawasan yang belum efektif. Tampil juga jawaban yang menyatakan bahwa hal itu dimungkinkan oleh nafsu manusia yang tidak terkendalikan.

Jawaban yang diberikan itu betul juga. Lalu bagaimana? Apakah kita menunggu dulu? Apakah kita harus menunggu penyelewengan itu habis dulu? Atau, mestikah kita menanti jawaban yang lengkap dulu? Tentu saja tidak! Orang awam bilang: *"The show must go on!"*

Ya, waktu mesti berjalan terus. Pembangunan harus jalan terus, karena pembangunan merupakan *isi* dari cita yang mau kita wujudkan. Waktu tak bisa berhenti bahkan tak bisa diulang. Pembangunan tak bisa mandeg. Untuk itulah diperlukan sekali pengawasan yang efektif. Bahkan perlu secara perbaikan dan peningkatan demi kehidupan bangsa dan pembangunan nasional.

Sesungguhnya kita sudah memiliki sistem dan *tool* pengawasan untuk semua bagian dan urusan. Dalam Ilmu Manajemen istilah asingnya *controling.* Karena itulah sebetulnya kita sudah memilikinya. Seandainya masih kurang memadai, maka perlu lebih ditingkatkan. Dan bila sistem dan tool ini digunakan secara *konsekuen, konsisten dan konsepsional,* pasti akan memberikan buah yang segar. Namun demikian, seandainya toh belum memberikan hasil dan juga belum berfungsi, maka sepantasnyalah kita melihat dari aspek pengawasan yang lain. Apakah itu?

Letak soalnya berpulang kepada manusia itu sendiri. Manusia yang *merencanakan* dan manusia pulalah yang *menjalankannya.* Maka alat pengawasan yang paling efektif itu ada pada diri manusia itu sendiri. *Hati nurani (dhamir)* manusia yang menjunjung tinggi nilai kebenaran, kejujuran, keadilan dan kemanusiaan yang mendalam akan merupakan *built in control tool* yang memagari setiap orang dari perbuatan tercela. Budi luhur inilah yang menjadi napas Islam dalam *esensi* praktek ajaran yang sebenarnya.

Memang terasa terdapat hal yang kontradiktif dalam kehidupan nyata masyarakat yang justru berlawanan dengan cita luhur tersebut. Interaksi dalam kehidupan bermasyarakat kadang-kadang menggoda dan memaksa orang keluar dari norma luhur yang telah disepakati dan yang telah menjadi pedoman hidup. Tidak jarang pula orang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan hati nurani semata-mata tergoda oleh bayangan indah yang sebetulnya tidak indah. Dan ada pula yang berbuat karena ingin menempuh jalan pintas. Nah, mengikuti jalan yang berlawanan dengan hati nurani sendiri inilah *sumber dari segala perbuatan yang tercela!*

Oleh karena itulah semua soal berpulang kepada dirinya sendiri. Untuk itu pulalah kami ingatkan untuk kembali dan mematuhi hati nuraninya sebagai pedoman tingkah lakunya yang hakiki. Semakin banyak manusia Indonesia memfungsikan hati nuraninya sebagai alat pengawasan, maka semakin besar harapan untuk mempercepat proses untuk *mengeliminir* penyelewengan, kebocoran dan penyimpangan yang menggangu pembangunan dewasa ini.

Hanan Wihasto
Fak. Ekonomi UGM

MAHASISWA idealita dan realita

Dalam menjawab tantangan untuk ikut ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakatnya, kwalitas dan juga kwantitas mahasiswa yang satu dengan yang lainnya tentulah tidak sama. Mentalitas mahasiswa untuk berpartisipasi sosial sangat erat hubungannya dengan kesiapan mental mahasiswa itu sendiri yang telah dipersiapkan secara matang. Kemudian penggolongan kwalitas mahasiswa sebagai insan kampus dan juga sebagai homo sosiocus dapatlah dipilah-pilahkan dalam beberapa kelompok.
Pertama, mentalitas mahasiswa yang belum terbentuk/tersiapkan sejak sebelum memasuki kehidupan kampus (pra mahasiswa). Jadi kecenderungan mahasiswa kaget dengan kemajemukan permasalahan yang dihadapi kemudian tidaklah mengherankan. Apalagi ketika hal ini ditingkah dengan motivasi memasuki perguruan tinggi yang kurang bisa dipertanggung jawabkan. Membicarakan partisipasi mahasiswa tidak akan terlepas dari subyek mahasiswa sebagai calon pemimpin. Dengan kondisi-kondisi yang seperti ini lantas kwalitas pemimpin bagaimana yang bisa kita harapkan?
Kedua, mahasiswa yang sudah cukup sadar dengan keberadaan dan tanggung jawabnya sebagai mahasiswa tetapi terbentur pada kerja sistem yang ada. Sistim pendidikan yang ada di perguruan tinggi yang kurang mendukung, yang kurang memberikan waktu untuk memikirkan permasalahan sosial yang ada di sekitarnya. Kemudian pada akhirnya jadilah dia sebagai mahasiswa yang sibuk dengan beban-beban perkuliahan semata dan bersikap apatis dengan lingkungannya.
Ketiga, mahasiswa yang memang dari sononya tidak ada respon terhadap masyarakatnya, walaupun dia sendiri cukup sadar bahwa dia adalah produk sosial dan tidak dapat hidup sendiri. Tidak banyak bahkan tidak ada yang bisa kita harapkan dari mahasiswa yang bermentalitas seperti ini. Bisa

jadi dia malah akan menjadi beban masyarakatnya.
Keempat, mahasiswa yang bisa menjawab tantangan masyarakatnya sekaligus juga civitas akademinya. Kegiatan keilmuan yang berjalan seiring dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kesulitan tentu saja ada karena bagaimanapun juga suatu sistim adalah tidak akan terlepas dari yang negatif dan positif.

Partisipasi sosial mahasiswa yang seperti apa.

Pandangan masyarakat bahwa mahasiswa itu lebih kadang menjadikan beban mental yang maha berat. Mahasiswa, dalam kegiatan keilmuan mungkin ada betul-betul canggih tapi belum tentu dia canggih pula dalam mengkaji permasalah-permasalahan. Belum lagi usaha mengsinkronkan kesenjangan yang ada antara ilmu yang dia peroleh dan pengaplikasian pada masyarakatnya. Ini merupakan dilema mahasiswa dalam keinginan kiprah. Menjadi dilema ketika mahasiswa itu sadar bagaimana menjadi mahasiswa itu seharusnya. Lain lagi kemudian ketika mahasiswa itu lari dan menterjemahkan "menjadi mahasiswa seharusnya" itu menjadi "menjadi mahasiswa yang tidak sebagaimana harusnya".
Tanggapan atas dilema melahirkan apa yang dinamakan mahasiswa yang betul-betul mahasiswa dan yang tidak. Dari mahasiswa yang berkwalitas baik dituntut suatu sikap contoh yang baik, lebih peka pada permasalahan sosial sekaligus mampu menjawabnya. Kemudian mahasiswa sebagai agen perubah dalam masyarakatnya harus pula dapat mengadakan kegiatan yang mengarah pada masyarakat kalangan bawah (jiwa pemimpin). Budaya masyarakat paternalis pula yang lebih menuntut kita untuk bertingkah laku baik karena sebagai kelompok yang oleh masyarakat dianggap lebih mahasiswa memang dituntut harus begitu. Lantas bentuk kegiatan apa yang kita pilih. Itu tentu saja sesuai dengan nilai-nilai yang menjadi pegangan si mahasiswa dan seberapa jauh manfaat dan mudharatnya bagi mahasiswa itu dan tentu saja masyarakatnya.

Realita partisipasi sosial dan problematikanya.

Ketika keinginan berpartisipasi itu ada kemudian hambatan-hambatanpun ikut ambil bagian. Faktor penghambat yang sering muncul adalah ketakutan akan menghambat studi yang sudah terprogramkan. Pilihan-pilihan pun kemudian dilakukan. Berprestasi akademi yang baik sementara di bidang sosial dia kurang berpartisipasi ataukah prestasi akademik yang kurang begitu baik tetapi kita kaya dengan kegiatan-kegiatan sosial yang dapat kita petik manfaatnya nanti? Idealnya memang kita harus menjadi seorang mahasiswa yang berprestasi akademik baik, partisipan yang baik sekaligus agen perubah masyarakat yang baik, tapi berapakah mahasiswa yang dapat membawakan keberadaannya seperti ini? Tentunya dapat dihitung dengan jari.
Menyadari bahwa untuk menjalankan semuanya sekaligus begitu sulitnya lantas mana yang kita *prioritas utamakan.* Jika kita dihadapkan pada prioritas mana yang didahulukan tentu saja harus mempertimbangkan efek yang akan kita hadapi dengan prioritas pilihan itu. Luwesnya, skala prioritas itu bisa dipertimbang tergantung saat itu mana yang lebih dipentingkan dan juga perkembangan yang ada dalam masyarakatnya. Kehidupan masyarakat yang tidak statis itu kan butuh pemikiran pula.

Wadah yang tepat dalam kegiatan partisipasi sosial.

Ketika kita memutuskan untuk ikut berpartisipasi sosial kemudian, mampukah kita untuk berpartisipasi seorang diri? Tentu saja itu tergantung seberapa besar lingkungan masyarakat kita. Kemudian ketika masyarakat membutuhkan suatu wadah lantas wadah macam apa yang tepat yang dapat mengaktualisasikan segala sesuatu yang kita tatap. Sebagai manusia yang monopluralis di samping kita sebagai homo sosiocus, homo economicus, maka faktor religipun harus kita perhatikan. Bahkan amat sangat harus kita perhatikan, karena dengan panutan agama kita akan terhindar dari penyelewengan-penyeleweng yang senantiasa mengancam. Lantas bagaimana kita sebagai aktifis muslim dalam kegiatan? Bagaimana andil kita dalam ikut memecahkan masalah kemiskinan dan kepincangan-kepincangan masyarakat sebagaimana yang dipersepsikan misalnya? Belum lagi ketika mahasiswa dihadapnya pada situasi masyarakat kota yang semakin majemuk. Materialisme, sekulerisme, kenakalan remaja dan segala kepincangan yang ada yang senantiasa mengintip, apa pemecahan? Sebagai seorang aktifis muslim yang dalam setiap langkah selalu selalu mengacu kepada keridloan Allah maka hal itu bukanlah pertanyaan yang sulit. Ridlo Allah! Untuk mencari ridlo Allah, taqwalah modalnya. Sudahkah suatu wadah itu menjanjikan ketaqwaan bagi kita, bagi masyarakat kita dan bagi segala yang mewarnai kita. Semua pertanyaan, keraguan, ketakutan akalah terjawab bila kita menyadari ini. Tanggung jawab mewarnai ketika kita harus memilih. Menuntut ilmu adalah suatu hal yang menuntut keseriusan tapi mahasiswapun dituntut untuk mengetahui segala apa yang terjadi dalam masyarakatnya. Alternatif untuk menjadi mahasiswa ideal menurut persepsi umum adalah, kerja keras! Kecintaan untuk aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan bisa jadi belum dirasakan sekarang tapi segala hasil akan kita rasakan nanti dalam kehidupan yang lebih komplek. Kita akan menjadi mahasiswa yang dapat menempatkan diri dalam semesta pembicaraan.

Aktifitas muslim! Keikhlasan pengabdian Insya Allah akan mendatangkan nur petunjuk dari Allah.

Yulianto P
FNT Elektro UGM

BALAIRUNG
Majalah Mahasiswa
Universitas Gadjah Mada
Diterbitkan Oleh
Unit Pers Mahasiswa UGM
Izin Terbit
SK Menpen RI No. 1039/SK/
Ditjen PPG/STT/1986
International Standard Serial Number
(ISSN) 0215 – 076X
Pelindung
Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri S.H. (Rektor UGM)
Penasehat
R. Soepono, MSc. (Purek III UGM)
drg. Haryono Mk. (Sekretaris Purek III UGM)
Drs. Hasjim Nangtjik
Drs. Mulyono
Pemimpin Umum/Pemimpin Redaksi
Abdulhamid Dipopramono
Wk. Pemimpin Redaksi/ Kalitbang Red.
Ana Nadhya Abrar
Koordinator Reportase
M. Thoriq
Dewan Redaksi
Ahmad Rapanie, Kartika Rini, M. Thoriq, Bani Saksono, Agus S Djamil, Eko Djunaedi, Eddy Heraldy, Marsis Sutopo, Ismail Luthfi
Produksi/Lay Out/Artisstik
Gendon Soebandon (Kepala Bagian)
Ponang Praptadi (Wakil),
Dwi Oblo Prasetyo, Agus Sumarno, Sunaryo Broto
Fotografer
Waluyo Trisetyono
Reporter
Arief Santosa, Afnan Malay, Lusi Margiyani, Hananto Kusumo, Erlen Wen Werry, Titi Savitri, Aning Yuana, M. Hasbi Lallo
Pemimpin Perusahaan
M. Thoriq
Wk. Pemimpin Perusahaan
Agung Suprihanto
Bendahara
Esti Dayati, Iris Kusumasari
Sekretaris Perusahaan
Yulaeni
Distribusi/Sirkulasi
Siswadi Gono Wimbawanto (Kabag)
M. Gafar Yudtadi, Endang Zuniarti, Jaka Eko Cahyono
Iklan
M. Gafar Yudtadi (Kabag)
Inventaris/Dokumentasi/ Perpustakaan
Muhammad Ma'sum, Supardi, Sri Aditya, Widya Chaeroni
Alamat Redaksi & Tata Usaha
Gelanggang Mahasiswa UGM
Bulaksumur Yogyakarta,
Telp. 88688 psw 676
Percetakan
PT Bayu Indra Grafika
Isi di luar tanggung jawab Percetakan

OPINI

MENCARI LUBANG: Sebuah Upaya Alternatif

Keluhan yang sering muncul di kalangan kita (mahasiswa) adalah petugas sistem yang berada di sekitar sering terasa cukup represif. Sering dikeluhkan oleh mahasiswa mengenai KRS, mata kuliah, dosen pembimbing, dan seribu keluhan lainnya. Ironisnya, "DPR" kita alias BPM, dengan segala kerendahan hati kita akui lagi "mandul" (di sini kita tidak mempermasalahkan, apakah kemandulan tersebut sebagai akibat atau bukan). Ibaratnya kita hidup dalam ruangan yang seolah-olah tidak memberikan keleluasaan keleluasaan bergerak, sehingga kebutuhan akan kesegaran badan dan jiwa tidak terpenuhi. Kemandulan di atas, jelas dapat sebagai (dianggap) salah satu kendala formal untuk menumbuhkan proses demokratisasi kampus, karena dialog praktis macet. Dan yang lebih menyesakkan nafas, munculnya isu atau bahkan telah berkembang menjadi asumsi, karena sudah sering terbukti yang mengatakan "Tidak mungkin saat ini kita mengubah sistem, sudah deh pokoknya", dan sebagai implikasinya, jika kita "ngotot" adalah skorsing, droup out, dan bahkan lebih jauh dari kedua hal di atas.

Lantas mau tidak mau kita harus menggunakan atau memanipulasi keadaan kita. Kita harus tetap bisa bergerak (maju). Berpangku tangan, mengeluh seribu bangsa, jangan, sungguh. Anggaplah kita ini sebagai kelompok semu, yang sedang berhadapan dengan *interest group*, yang satu ketika berbalik menjadi kelompok yang berkepentingan, dan menjanjikan hal yang lebih mapan.

Strategi adaptasi yang perlu kita tampilkan pada saat ini adalah mencari lubang-lubang, kesempatan dalam kesempitan. Kurang bijak jika kita melangkah mundur. Manfaatkan keadaan yang ada. Dalam *local language* Jawa, kita "ngalah dhisik". Kita harus lemparkan pikiran kita jauh ke depan, jika tidak bang "Naga Bonar" bilang matilah kita. Jika kita jujur, sedikit sekali kita akui orang seperti bang Emha dan juga bang Rendra, yang mampu berdikari setelah meninggalkan dunia yang mereka anggap tidak memberikan kesegaran.

Kongkritnya, jika kita berhadapan dengan dosen pembimbing yang tidak berkenan di hati, karena harus menunggu cukup lama karena urusan ini, itu, kita harus siap jadi bola pingpong, bersabar sedikitlah. Demikian juga jika berhadapan dengan orang yang tidak ramah, kita ngalahlah, lempar senyum duluan. Pendeknya dalam keadaan seperti saat ini dibutuhkan kesiapan mental yang "benar". Siap mengorbankan perasaan, kita harus berjiwa besar, yakinkan pada diri kita.

Dengan demikian sebagai salah satu implikasinya, kita butuh obsesi, jelas. Realita kehidupan kampus telah banyak menunjuk Gelanggang Mahasiswa (UGM), sebagai salah satu contoh. Jika saudara bukan tipe orang yang "keren" alias sederhana, masuklah Pramuka, jika sebaliknya *lu* "keren" masuk drum band, dan masih banyak pilihan lainnya.

Pendeknya, kita harus menerima kenyataan ini dengan segala kesabaran, dan inilah yang saya maksudkan lubang. Karena bagaimanapun juga kita berada di bawah satu tingkat, atau bahkan lebih di bawah kelompok yang kita hadapi. Namun demikian bukan berarti kesabaran kita harus mengorbankan "Kewajiban Azasi" kita alias kebenaran. Jika kita berhadapan dengan kata ini, maka setidak-tidaknya dia menjanjikan kesegaran moral, dan dengan tegarnya jiwa kita, sedikit rasa "lapar" bisa ternetralisir".

Dan yang terakhir, tidak mungkin satu resep mampu mengobati 1000 orang sekaligus. Sebagai makhluk yang subjektif, tetap kita menampilkan sesuatu yang sifatnya parsial. Kita anggap saja opini ini mewakili dunia mahasiswa yang membicarakan masalah yang sedang dan selalu dihadapi.

Adam Harnadi
Sastra/Antropologi

isu

menerjemahkan DEMOKRASI

KITA mengenal dua "setan" dalam negara demokrasi. Pertama, masyarakat takut bicara soal politik. Kedua, lembaga legislatif tidak bisa mengontrol lembaga eksekutif. Kedua"setan" ini, bila beroperasi di suatu negara demokrasi, akan merusak citra demokrasi. Karena itu kedua "setan" ini harus dienyahkan dari bumi Indonesia.

Jika kita telusuri alasan kenapa masyarakat takut membicarakan politik, maka yang menjadi kata kuncinya adalah **demi stabilitas nasional.** Karena pemerintah selalu menghimbau masyarakat untuk tidak berpolitik sebab bisa mengganggu stabilitas dan kepentingan nasional, maka masyarakat takut bicara soal politik. Politik, lantas, di anggap sebagai hal yang tabu untuk dibicarakan, salah-salah bisa dianggap mengacaukan stabilitas nasional.

Namun demikian, ungkapan yang mengatakan bahwa, "Politik ibarat bumbu demokrasi. Tanpa politik, demokrasi menjadi hambar, bahkan kekurangan esensinya", harus ditafsirkan secara dinamis dalam rangka pembangunan yang tak boleh melemah. Pembangunan, memang, memerlukan stabilitas keamanan yang mantap. Hanya pada saat stabilitas keamanan sudah mantap, secara bertahap, masyarakat diberi kelonggaran berbicara soal politik.

Sedangkan dalam hal tidak bisanya lembaga legislatif mengontrol lembaga eksekutif, kejadiannya diawali oleh melemahnya lembaga politik. Misalnya cekcok dan perpecahan interen dalam partai politik yang tak pernah selesai secara tuntas. Bisa juga dengan semakin dominannya peran birokrasi dalam mekanisme pengambilan keputusan dan penyelenggaraan kekuasaan; padahal birokrasi itu sebenarnya adalah sekedar instrumen teknis penyelenggaran administrasi pemerintah yang terikat konstitusi dan aturan hukum, objektif dan a-politik. Atau bisa juga diawali dengan satu kesatuan sosial politik yang menguasai lembaga-lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

Kita tentu menginginkan negara Indonesia tetap menjaga citranya sebagai negara demokrasi. Tak pernah sedikit pun terbetik di hati kita negara Indonesia diperintah secara otoriter, di mana politik dianggap musuh dan ditindas. Karena itu, sebelum kedua "setan" di atas menggoda kita, mari kita ambil ancang-ancang. Yaitu mengizinkan masyarakat bicara politik. Kemudian lebih meningkatkan peranan dan fungsi partai politik.

Di samping itu, seringkali juga kita bertanya, apakah karakteristik patrimonial — yaitu jabatan dan birokrasi didasarkan atas hubungan personal atau hubungan *patron client* — bisa diterapkan dinegara kita? Sebab, jika demikian halnya, antara pemegang kekuasaan dan gejala kekuasaan tak bisa dibedakan lagi. Dengan demikian, kegiatan politik berpusat pada pemegang kekuasaan, sementara struktur politik menggantung dalam bentuk jaringan vertikal untuk memperoleh perlindungan dari pemegang kekuasaan.

Dan bila kita memperlakukan hal ini, pemegang kekuasaan harus melancarkan otokritik di kalangan mereka sendiri, agar penyelenggaraan kekuasaan proporsional (misalnya: sudah benarkah sikapnya, atau sudah meratakah pembagian kekuasaan itu? Sebab, kalau terdapat kesenjangan dalam pembagian kekuasaan, maka akan timbul sinisme terhadap pembagi kekuasaan. Hal ini, pada gilirannya, bisa mengakibatkan munculnya rasa sinir masyarakat terhadap pemegang kekuasaan. Masalahnya, lantas, menjadi: sanggupkah pemegang kekuasaan melakukan **otokritik?**

Yang mencemaskan kita adalah seringnya pemegang kekuasaan tidak bisa melakukan **otokritik.** Banyak alasan yang menjadi penyebabnya. Misalnya karena terlalu sering disanjung, banyaknya client yang bersikap yes men dan ABS serta tidak adanya kesempatan untuk inspeksi sampai ke tingkat yang paling bawah.

Adanya kenyataan di atas, ditambah dengan sinyalemen para ahli yang mengatakan bahwa budaya *patron client* tidak cocok dengan prinsip demokrasi, menunjukkan budaya *patron client* kurang baik diterapkan di Indonesia. Harapan kita satu kemudian, budaya ini tidak memasyarakat di negara kita. Kita bisa memasyarakatkan budaya musyarawah berdasarkan mufakat untuk menetapkan pemegang kekuasaan. Tentu saja dengan terlebih dulu memilih orang-orang yang berprestasi, bercita-cita dan berkemauan baik.

Dalam usaha membiasakan bermusyawarah berdasarkan mufakat sesuai dengan Pancasila dan UUD'45, barangkali yang perlu ditekankan adalah disiplin masyarakat, bahkan disiplin secara nasional untuk mengamankan hasil-hasil pembangunan yang sudah kita capai sejak 18 tahun lalu. Musyawarah yang tidak memberi peluang yang bisa dimanfaatkan oleh unsur-unsur yang tidak setuju dengan pembangunan. ***

• Ana Nadhya Abrar

TEMUWICARA

DEMOKRASI DAN BUDAYA POLITIK

Demokrasi bukan hanya sekadar ideal, bukan hanya menyangkut yang seharusnya, tetapi patut juga dipandang sebagai suatu proses. Proses demokrasi menjadi tahan bila dalam suatu bangsa ada dinamika, ada iktikad baik untuk bersaling "sapa" dan ada kemauan untuk bersaling tindak membenahi sesuatu yang tidak demokratis. Tanpa kondisi demikian, demokrasi hanya akan menjadi rangka; bukan daging dan jiwa suatu bangsa.

Untuk menerjemahkan proses demokrasi, kebudayaan politik dan demokrasi yang seharusnya, **Balairung** *akan mengungkap pendapat tokoh-tokoh UGM. Pendapat itu terekam* **dalam***temu wicara yang diadakan tanggal 2 April 1987 lalu. Dalam temu wicara yang dipimpin oleh* **Ana Nadya Abrar** *ini berbicara antara lain :*

1. **Prof. Dr. T. Jacob**: *Rektor UGM 1981 — 1985, Guru Besar Fak. Kedokteran UGM dan Pemimpin Redaksi Majalah Ilmiah* **Berkala Kedokteran.**
2. **Drs. Usman Tampubolon**: *Dosen Metodologi di Fisipol UGM, yang banyak melakukan penelitian ilmu sosial-perilaku.*
3. **Donatus K. Marut**: *Mahasiswa Teladan Fisipol UGM 1985 dan Ketna* **Kelompok Studi Fosham**
4. **Rizal Malarangeng**: *Mahasiswa Teladan fisipol UGM 1987 dan Ketua* **Kelompok Studi Fossdek.**
5. **Yason D. Bani**: *Mahasiswa Fak. Sastra UGM dan Dewan Redaksi Buletin* **Istoria.**
6. **Ngarto Februana** *Mahasiswa Fak. Sastra UGM.*
7. **Achmad Nurmandi**: *Mahasiswa Fisipol UGM dan Anggota* **Kelompok Studi Isba.**
8. **Mokhammad Basis**: *Mahasiswa Fak. Sastra UGM dan anggota* **Kelompok Studi Epistemologi.**

Sayang sekali **Prof.Dr. Soeroso H. Prawiroharjo M.A.,** *Rektor UGM 1969 — 1973 dan Wakil Ketua* **Yayasan Panunggalan**, *yang diundang* **Balairung**, *berhalangan datang. Berikut ini pendapat mereka yang dirangkum oleh* **Ana Nadya Abrar**.

Demokrasi itu makhluk apa? Menurut **Drs. Tampubolon**, himpunan persoalan, karena dimulai dari kata "demokrasi" itu sendiri sudah ada persoalan. Belum ada definisi yang disepakati. Bahkan setiap usaha yang mencoba merumuskannya selalu ditentang. Dengan mengutip *Orwell*, ia mengatakan, "Pembela-pembela rezim apa pun menggembar-gemborkan bahwa rezimnya adalah rezim demokrasi, dan mereka takut berhenti menggunakan kata itu bila diikat dalam satu arti."

Di Indonesia, persoalan kata "demokrasi" ini bisa dibuktikan dengan kenyataan sejarah politik Indonesia. Lihatlah UUD '45, yang diciptakan oleh cendekiawan-cendekiawan Indonesia yang mempercayai teori evolusi garis tunggal universal, sampai sekarang telah tiga kali ditarfsirkan, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

Lalu bagaimana ini? **Drs. Tampubolon** mencoba menjelaskan, "Sudah semenjak berakhirnya perang dunia kedua tidak ada lagi negara yang bukan negara demokrasi. Semua negara telah menjadi negara demokrasi. Setiap orang yang berkuasa di negaranya menonjol-nonjolkan betapa demokratisnya negara itu, karena tuduhan yang paling ditakuti adalah anti demokrasi.

Namun, siapakah yang saling bertentangan itu? Tidak lain ialah para pecinta demokrasi itu sendiri. Karena itu **Giovani Sartori** pada tahun 1935 mengatakan bahwa kita sekarang ini hidup dalam abad demokrasi yang membingungkan. Oleh karena itu pula orang-orang pun tidak lagi mengutik-utik kata demokrasi. Mungkin sebagai gantinya, sejak **Jimmy Carter**, menonjollah persoalan-persoalan hak azasi."
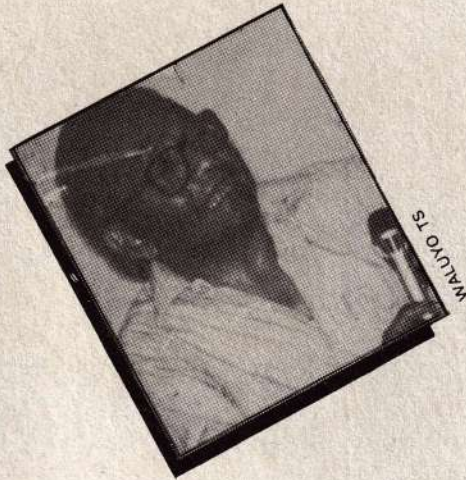
Prf. T. Jacob, "Untuk mengetahui di mana kita berada sekarang, ke mana kita akan pergi dan di mana kita hidup di masa datang, tidak ada salahnya kita mempersoalkan proses, dan hakekat demokrasi".

Drs. Usman Tampubolon, "Demokrasi itu adalah hasil kebudayaan barat. Karena itu, kapan pun tidak ada kondisi Indonesia yang cocok untuk demokrasi!".

Pendapat **Drs. Tampubolon** dibenarkan **Prof. Jacob** dengan mengatakan bahwa dalam dasawarsa belakangan ini, banyak terdengar orang menuntut hak azasinya. Mulai dari golongan minoritas seperti kaum berkulit hitam, kaum cacat dan kaum homo sampai pada golongan kelas menengah. Namun, tambahnya, "Untuk mengetahui di mana kita berada sekarang, ke mana kita akan pergi dan di mana kita hidup di masa akan datang, tidak ada salahnya kita mempersoalkan proses dan hakekat demokrasi."

Selanjutnya **Prof. Jacob** menyebutkan ciri-ciri demokrasi yang antara lain:

1. Hak diwakili dalam pengambilan keputusan.
2. Mayoritas berhak membuat dan melaksanakan kebijakan dengan menghormati hak orang lain.
3. Minoritas berhak menentang kekuasaan dengan bertanggung jawab.
4. Pemilihan umum berkala dengan syarat-syarat:
a. Partai politik, b. Konflik antar gagasan dengan bebas. c. Hak mengungkap gagasan, d. Proses pemilihan umum yang terlindung yaitu pemilu yang diatur dengan baik, jujur, adil dan aman.
5. Masyarakat terdiri dari organisasi nonpemerintah dan individu. Di negara liberal, individu mempunyai peran yang sangat penting. Kadang mereka justeru lebih dipentingkan daripada komunitas.
6. Hak azasi dilindungi oleh kehakiman yang bebas.

Dengan begitu, **Prof. Jacob** mengajak kita untuk menganalisis demokrasi di Indonesia. Sulit merumuskan hasilnya, bukan?

■

Tetapi tidak demikian menurut **Drs. Tampubolon**. Dengan tegas ia mengatakan, "Demokrasi itu adalah hasil kebudayaan Barat. Karena itu, kapan pun tidak ada kondisi Indonesia yang cocok untuk demokrasi!" Demokrasi di sini ialah menurut pengertian bahwa rakyat melaksanakan kontrol terakhir atas agenda urusan pembuatan keputusan dan pelaksanaan keputusan.

Kalau tidak ada keterangan lain yang menyangkal pendapat ini, bolehlah kita mengatakan, tidak usahlah berharap Indonesia menjadi negara demokratis sesuai pengertian tersebut di atas. Sebab **Drs. Tampubolon**

mendekati permasalahan dengan menggunakan pendekatan "sistem nilai", yang mengacu kepada pendapat **Talcott Parsons**, di mana agama menentukan nilai budaya. Sementara demokrasi yang diimpor Indonesia adalah kebudayaan politik negara eropa Barat yang sebagian besar masyarakatnya beragama Kristen.

Dan tampaknya **Donatus K. Marut** mencoba menyangkal. Menurutnya pendekatan yang dipakai **Drs. Tampubolon** cenderung ke arah "pendekatan etnometodologis". Pendekatan ini, tambah **Don**, menganggap demokrasi sebagai nilai yang imajiner, demokrasi itu dimiliki oleh nilai yang ada pada suatu suku bangsa atau suatu bangsa. Dengan demikian, akan terjadi perbedaan pandangan oleh banyak negara saat ini adalah demokrasi yang universal dan ideal," tandas **Don**.

Lebih lanjut **Don** mengartikan nilai demokrasi itu adalah mementingkan orang banyak. Bagaimana masyarakat banyak terlibat dalam sistem politik, bukan hanya dalam Pemilu saja. "Demokrasi adalah bagaimana rakyat menentukan jalan hidupnya secara bebas. Mereka merencanakan apa yang akan dilakukan baik dalam keluarganya, masyarakat maupun negara Indonesia," katanya. Yang memprihatinkan **Don**, Indonesia sampai saat ini, masih bersifat *birokratik otoriter* (rezim sengaja menumbuhkan legitimasi ganda berdasarkan prinsip-prinsip perpaduan tradisional yang diperhitungkan, karismatik, legal dan karenannya rasional -red.) bercampur dengan *korporatisme* negara (unit-unit pokok dibentuk dan dijaga sebagai organ pembantu dan tergantung sepenuhnya pada negara -**Dwight Y. King**), yang melahirkan pemerintahan sentralistis yang bertentangan dengan nilai demokratis.
Kalau sudah begini, bagaimana keluar dari "kemelut"?

■

Prof. Jacob mencoba menghubungkannya dengan UUD '45. Pencetus seminar polemologi ini berpendapat UUD '45, secara normatif, sudah demokratis. Hanya dalam kehidupan sehari-hari, nilai-nilai demokrasi itu belum tercermin. "Nah, yang begini ini apakah hanya terjadi di Indonesia? Jika hampir di seluruh dunia, selalu saja pelaksanaan UUD tidak berjalan semestinya, maka salahnya bukan hanya karena "lokal". Di Indonesia misalnya. Barangkali karena adanya "gap" dalam pergantian dari kolonialisme yang begitu lama," tandasnya.
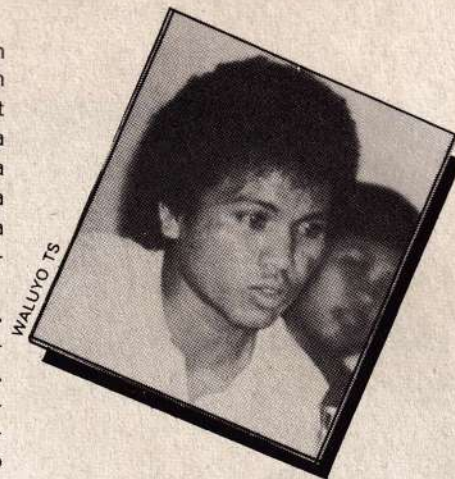
WALUYO TS

Donatus K. Marut, **"Demokrasi adalah bagaimana rakyat menentukan jalan hidupnya secara bebas. Mereka merencanakan apa yang akan dilakukan dalam keluarganya, masyarakat, maupun negara Indonesia".**

Sebagai contoh pelaksanaan UUD luar negeri yang tidak sesuai dengan prinsipnya, **Prof. Jacob** menyebutkan, **George Washington** itu mempunyai budak, padahal dalam UUD AS yang ikut "dibidaninya" , tertulis *"ALL MEN ARE CREATED EQUAL"* Kemerdekaan pers di negara Barat, sebenarnya tidak ada, karena koran-koran tidak berani menentang ideologi pemilik koran. Demokrasi satu hidung satu suara di negara maju, juga tidak ada, karena suara itu bisa dibeli, bisa diatur.

Dengan kenyataan ini, **Prof. Jacob** mengajak kita untuk mempertimbangkan bahwa sesuatu yang telah jadi itu tidak lantas bisa jalan menurut semestinya. Di mana-mana, dari masa ke masa, perjalanan demokrasi itu terus berkembang. Mengetahui latar belakang begini, kita tentu tidak merasa terlalu berkecil hati. Tetapi sesuai hukum alam — mau tak mau, pemimpin sekarang akan digantikan oleh yang muda — perlu "jejak" baik yang ditinggalkan untuk generasi yang berikutnya. Dalam hubungan ini, **Don** melihat upaya *debirokratisasi, deregulasi* dan *desentralisasi* merupakan upaya peningkatan demokrasi dari taraf yang rendah ke taraf yang lebih tinggi. Sebab, pada hakekatnya, dengan *debirokratisasi* dan *desentralisasi*, rakyat dapat terlibat seluruhnya. Sedangkan dengan *deregulasi* yang merupakan usaha demokratisasi ekonomi, pengusaha bermodal kecil dirangsang untuk lebih maju.

WALUYO TS

Achmad Nurmandi, **"Marilah kita gunakan kebudayaan politik suku bangsa di Indonesia yang cocok dengan prinsip ideal demokrasi".**

Tetapi **Achmad Nurmadi** berpendapat, *debirokratisasi* dan *diregulasi* tersebut, hanya merupakan perkembangan demokrasi untuk masa kini. Sedang untuk pelaksanaan masa datang, ia berkata, "Marilah kita gunakan kebudayaan politik bangsa kita yang cocok dengan prinsip ideal demokrasi."
Lantas, masalahnya, apakah ada kebudayaan politik suku bangsa di Indonesia yang cocok dengan prinsip ideal demokrasi?

■

Menurut **Drs. Tampubolon** : ada. Yaitu kebudayaan politik Batak Toba. Tetapi bagaimana yang dimaksud dengan kebudayaan politik Batak Toba itu? Menjawab pertanyaan ini, **Drs. Tampubolon** terlebih dahulu menerangkan religi Batak Toba yang antara

lain:
1. Cara berpikir keseluruhan.
Orang Batak Toba mengalami kosmos, masyarakat, individu, masing-masing sebagai suatu keseluruhan. Artinya satu kesatuan dari satuan-satuan yang mempunyai fungsi heterogen, yang bekerja sama untuk kepentingan keseluruhan. Tetapi semuanya itu hanya dapat ada dan terpikir di dalam dan disebabkan oleh keseluruhan.
2. Cara berpikir perwakilan.
Orang Batak Toba juga mengenal menggantikan seseorang. Dalam hal ini mentalita berpartisipasi berlaku. Di sini garis pembagi antara yang mewakili dengan yang diwakili begitu kabur, sehingga perwakilan itu adalah "sa" dengan "identita". Misalnya, orang yang ayahnya berhutang bisa dipaksa kreditor untuk membayar hutang ayahnya.
3. Kepercayaan pada Tuhan tinggi.
Orang Batak Toba ber-Tuhan-kan **Ompu Tuan Mula Jadi Na Bolon**, atau **Debata**. Debata ini adalah kosmos dan tata keseluruhan; Dia ada di mana-mana dan kekuasaannya terwujud dalam segala hal. Sebagai penguasa Dunia-Bawah, Lautan dan Kilat, Dia bernama **Pane Na Bolon**, yang bertugas mengirim hujan, mencipta gelombang, guruh, kilat dan menentukan berapa bulan, hari dan saat akan menjadi baik dan tidak. Sebagai penguasa Dunia-Tengah, Dia bernama **Silaon Na Bolon**, yang bertugas mendidik tiga nenek moyang mitos Batak Toba. Sebagai penguasa Dunia-Atas, Dia bernama **Bubi Na Bolon**, yang memberikan fungsi dan tempat tinggal bagi semua ruh di seluruh kosmos. Dengan demikian, dalam religi Batak Toba, Dunia Atas, Dunia Tengah, dan Dunia Bawah menjadi satu.

Dengan segala keterangan itu, *Drs. Tampubolon* menyimpulkan bahwa (1) Dalam kehidupan orang Batak Toba tiap persoalan selalu menyangkut tiga faktor, (2) orang Batak Toba cenderung melihat unsur-unsur dari suatu keseluruhan sebagai sesuatu yang mandiri.
Toba cenderung melihat dunia kehidupan sebagai sesuatu yang harus dihadapi.

Mengacu pada "aksioma parsonianisme", **Drs. Tampubolon** berpendapat bahwa agama adalah sumber legitimasi dari sistem nilai kebudayaan dan sistem nilai kebudayaan menjadi sumber legitimasi sistem sosial. Dalam

Ngarto Februana, "Kemanakah arah demokrasi kita di masa datang?"
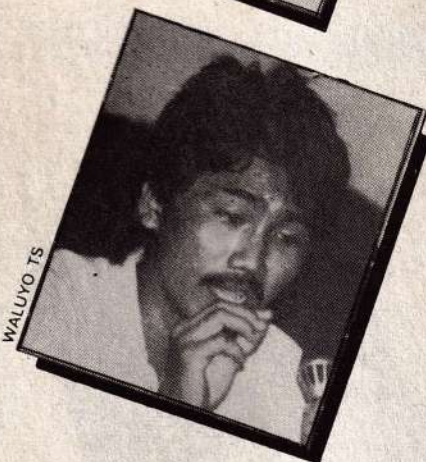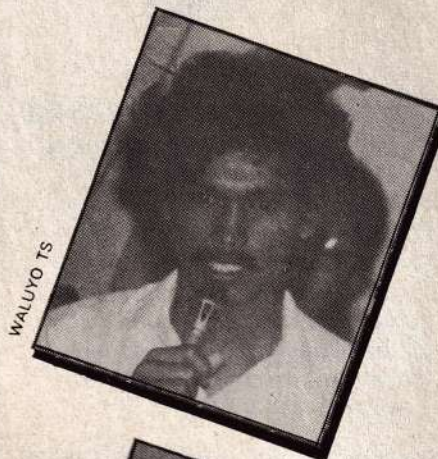
Rizal Malarangeng, "Karena itu usaha kita sekarang adalah membiarkan kondisi-kondisi struktural yang berkembang sekarang, seperti deregulasi, desentralisasi, itu menjadi budaya. Toh lama-lama demokrasi itu akan menemukan bentuknya yang ideal".

kaitannya dengan pendapatnya, dosen senior jurusan Administrasi Negara Fisipol UGM ini mengatakan, "Religi Batak di atas, mewujudkan dirinya dalam sistem nilai kebudayaan dari masalah dasar hidup manusia sebagai (1) hidup itu sulit, karena itu orang harus mengatasinya, (2) harga manusia bergantung pada karyanya, (3) anak saya adalah kekayaan saya (memuja masa depan), (4) alam harus dikuasai, dan (5) individualistis."

Dengan demikian, kita sekarang meningkat pada sistem nilai kebudayaan administo-politik orang Batak Toba, yang diuraikan **Drs. Tampubolon** sebagai :
1. Sistem sosial orang Batak Toba terdiri dari tiga interaktor, yang sejak awal sama kuat. Sistem sosial seperti ini dapat digolongkan ke dalam koalisi *triad* (sedang masyarakat Jawa koalisi *dyad*, yaitu *wong gede* dan *wong cilik*).
2. Raja adalah pendiri kampung, yaitu penguasa tanah dan air di sekitar kampung itu. Raja sekaligus menjadi penurun manusia di kampung itu. Karena itu, "rakyat" adalah keturunan raja.

3. Karena raja otonom dan pihak lain merupakan keturunan raja — yang makin banyak jumlahnya — sehingga mereka harus ber-inovatif (dalam pendirian kampung dan marga baru), maka *konflik* menjadi salah satu unsur dalam sistem nilai kebudayaan administo-politik orang Batak Toba.
4. Karena raja otonom maka orang Batak Toba tidak peka pada kekuasaan.
5. Karena konflik adalah antara pihak-pihak yang berdaulat maka sengketa hukum selalu diselesaikan arbitrase, dan sebagian besar dari perumpamaan dalam bahasa Batak Toba adalah "mengatur" konflik.
6. Ideologi kebudayaan administo-politik Batak Toba adalah pragmatis (masyarakat Jawa idealisme).

Mengetahui kenyataan kebudayaan administio-politik Batak Toba tersebut, kita percaya bahwa ia cocok dengan prinsip ideal demokrasi. Tetapi, rasanya kita tidak bisa menerapkannya. Mengapa? Sebab, seperti yang dikemukakan **Prof. Jacob**, sebagian besar penduduk Indonesia adalah suku **bangsa jawa. Barangkali orang Jawa tidak suka dengan kebudayaan politik orang Batak Toba. Dan dalam pengga-**

langan kekuatan, jelas suku bangsa jawa akan menang.

Yang paling dianggap penting oleh **Prof. Jacob**, sekarang, adalah bagaimana memperkuat kelas menengah, yang pada gilirannya mampu mengontrol pemerintah yang dilakukan rakyat. Apakah selama ini belum ada usaha memperkuat kelas menengah di Indonesia? Memang secara resmi tidak pernah. Akan tetapi, menurut **Yason D. Bani** usaha memperkuat kelas menengah pernah diupayakan pada tahun 1954 lewat program **Benteng**. Sayang usaha ini gagal. Berkali-kali kita bicara soal kelas menengah, katanya, "tapi tak ada yang berani mendefinisikan siapa yang masuk di situ. Lalu bagaimana mungkin kita menciptakan kelas menengah yang mempunyai kekuatan tawar-menawar dengan penguasa supaya tercipta iklim demokrasi?" tandas **Yason** dengan mantap. Apakah kita akan mandek sampai di sini?

Ngarto Februana, kemudian membuka masalah baru. "Kemanakah arah demokrasi kita di masa datang?" katanya. Sebagai dasar pertanyaannya, ia mengemukakan bahwa demokrasi yang kita transfer dari luar negeri sebagai Trias Politika tidak diterapkan secara mutlak, melainkan disesuaikan dengan situasi dan kondisi di negara kita. Selain itu, generasi muda sekarang, biasanya, tidak akan menutup diri terhadap kemungkinan-kemungkinan di luar negeri. Bahkan bisa memberikan fenomena konfirmatik terhadap fenomena yang ada di luar negeri.

Pertanyaan **Ngarto Februana** tersebut, tentu tidakmudah dijawab sekali jadi. Tetapi ia tetap membutuhkan jawaban. Maka, barangkali akan lebih baik kita dengar dulu pendapat **Rizal Malarangeng** yang mengatakan bahwa demokrasi adalah proses kehidupan yang terus berlangsung dalam perimbangan-perimbangan situasional kemasyarakatannya. Kerangka struktural semacam ini sanggup menjelaskan gejala demokrasi dalam masyarakat. Artinya, kita sepakati dulu, demokrasi adalah proses kebudayaan. Dengan demikian, menurut **Rizal**, pendapat **Arief Budiman** yang mengatakan bahwa demokrasi adalah fungsi dari kondisi-kondisi struktural historis yang bergerak dalam masyarakat, bisa kita terima.

Yason D. Bani, "......... Bagaimana mungkin kita menciptakan kelas menengah yang mempunyai kekuatan tawar-menawar dengan penguasa, supaya tercipta iklim demokrasi".
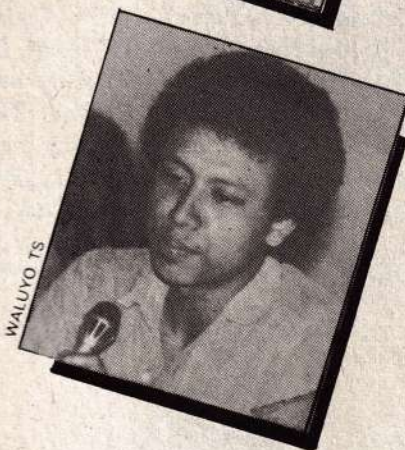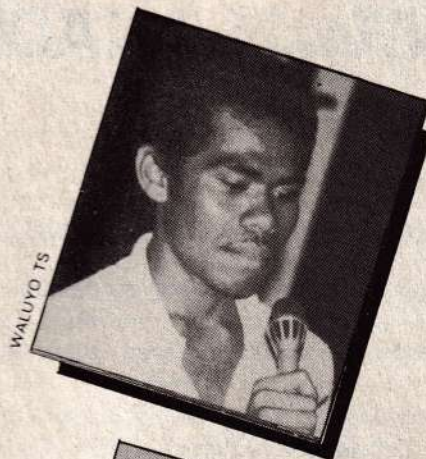
Mokhammad Basis, "Demokrasi tidaknya negara kita, ia bisa dilihat apakah elit politik memberikan mobilitas kepada massa atau tidak".

"Karena itu usaha kita sekarang adalah membiarkan kondisi-kondisi struktural yang berkembang sekarang, seperti *deregulasi, desentralisasi* itu menjadi budaya. Toh lama-lama demokrasi itu menemukan bentuknya yang ideal," kata **Rizal**.

Sebagai pertimbangan berikutnya, **Drs. Tampubolon** mengatakan bahwa kebudayaan adalah penjara. Sulit sekali bagi manusia untuk melepaskan diri dari kebudayaan. Apalagi terbebas dari konsep kekuasaan Jawa yang patrimonial. Sebab hanya orang seperti **Soedjadmoko** saja yang bisa membebaskan diri dari penjara itu.

Lantas bagi kita yng belum sehebat **Soedjadmoko**, bagaimana caranya membebaskan diri dari kebudayaan tidak demokrasi? Menurut **Drs. Tampubolon** ialah mengganti kebudayaan itu!
Kalau begitu halnya, kita menjadi semakin bingung, sebab kebudayaan tidak bisa direncanakan, tidak bisa diprogramkan.

Selagi kita menghadapi kebingungan itu **Mokhamad Basis** angkat bicara, "Demokrasi atau tidaknya negara kita, ia bisa dilihat apakah elit politik memberikan mobilitas kepada massa atau tidak!" Artinya apakah elit politik memberikan daya rangsang tertentu agar partisipasi politik masyarakat muncul atau tidak. Jadi, kita disuruh menilai apakah elit politik di negara kita memotivasikan partisipasi politik masyarakat luas.

Tetapi **Basis** sendiri mengakui bahwa kita sulit mengadakan pengamatan yang jelas. Alasannya, kita selalu beranggapan bahwa elit politik sebagai suatu sosok yang mempertahankan kemapanan. "Lalu bagaimana mungkin kita bisa berpikiran jernih," tutur **Basis**.

Sementara itu, *Drs. Tampubolon* melihat jalan berpikir masyarakat kita yang "terkotak-kotak" sebagai penghambat berjalannya prinisp ideal demokrasi. Sebab jalan demikian seolah-olah tidak menyukai kebudayaan yang lain. Padahal Bhinneka Tunggal Ika itu adalah hukum positif.

Selanjutnya **Drs. Tampubolon** mengajak kita menangkap makna lambang negara kita. "Tidak ada salah dalam perbedaan itu. Selamanya kita akan berbeda-beda. Bahkan **Al Quran** mengatakan bahwa perbedaan itu adalah nikmat yang diberikan Tuhan kepada kita," tegasnya.

Meraba-raba

KETENTUAN AKADEMIS DI UGM

Pertengahan Maret 1987, Mendikbud *Prof. Fuad Hassan* *mensinyalir ketentuan akademis mencair. Orang mencampuradukkan antara seminar, diskusi panel, temu muka dan pertemuan ilmiah. Dikatakan juga, laporan penelitian disamakan saja dengan penulisan paper. Orang tak membedakan mana monograf dan mana tesis.*

Rasanya, keadaan ini akan menyinggung masalah yang paling dekat dengan masyarakat kampus, terutama mahasiswa. Untuk melihat masalah ini, di kalangan mahasiswa UGM, ***Balairung*** *mewawancarai* ***Mei Neni Sitaresmi*** *dari Fakultas Kedokteran UGM,* ***Murdiyanto*** *dari FNT UGM,* ***Endang Semiarti*** *dari Fakultas Biologi UGM,* ***Agus Purwanto*** *dari Fakultas Kehutanan UGM,* ***Muhammad Dani Pratomo*** *dari Fakultas Farmasi UGM,* ***Hendro Saptono*** *dari Fakultas Teknik UGM,* ***R. Suci Handayani*** *dari Fakultas Hukum UGM dan* ***Abdul Ghofar*** *dari Fakultas Sastra UGM; untuk berbicara mengenai sinyalemen mendikbud tersebut. Di bawah ini singkatan dari wawancara mereka yang dilakukan oleh* ***Lusi Margiyani, Erlen Wenwerry, Arief Santosa, Afnan Malay, Jaka Eka Cahyono*** *dengan penyunting* ***Ana Nadya Abrar.***

Hendro Saptono (Pemimpin Umum Majalah Clapeyron 1982-1983): Apa yang dikemukakan **Prof. Fuad** tersebut memang berlaku di kalangan mahasiswa. Di fakultas saya, bahkan pengertian-pengertian teknis itu tidak pernah disinggung. Kami selalu mempelajari disiplin ilmu kami seperti sudah tahu banyak. Dan sesungguhnya, pengertian yang ketat tentang ketentuan akademis itu, diberikan dalam mata kuliah Filsafat Ilmu. Tetapi sejauh ini, mahasiswa tidak mendapatkannya dari perkuliahan. Kalaupun ada mahasiswa yang mengetahuinya, maka hal itu diperoleh dari buku-buku, bukan dari dosen. Coba kita tanyakan perbedaan semua ketentuan akademis itu pada dosen kita, saya yakin tidak semuanya memahaminya, kecuali dosen filsafat.

HENDRO

Saya kira yang menjadi usulan kita ialah mengajarkan Filsafat Ilmu di setiap jurusan. Lewat Filsafat Ilmu kita mempertanyakan segala hakekat, sejauh mana tingkat kebenarannya. Ini menyebabkan mahasiswa bisa "mendudukkan" dirinya dalam menanggapi ketentuan akademis.

Mei Neni Sitaresmi (Sekretaris BPM FK UGM 1985-1987): Yang saya lihat, motivasi mahasiswa untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan pola pikir berkurang. Laporan ilmiah yang dibuat, jadinya, asal jadi saja. Dalam menyelesaikan masalah ini, mahasiswa butuh dosen. Maka bimbinglah kami, para dosen.

MEI

Abdul Ghofar (Ketua I Sema Fakultas Sastra UGM 1985-1987): Saya heran, kenapa dari pihak PT tidak pernah memberikan tuntunan terhadap perlakuan ketentuan akademis yang ketat kepada mahasiswa. Contoh yang diberikan PT kurang terpuji. Di UGM misalnya, Seminar maupun diskusi mahasiswa hampir-hampir semacam formalitas, terlebih yang diadakan kalangan "atas". Dari beberapa seminar yang saya ikuti, satu makalah hanya dibahas beberapa menit saja. Apakah ini bisa diharapkan membawa hasil?

Mau mengatakan laporan ilmiah yang ditulis dalam rangka LKIP (lomba Karya Ilmiah Populer) sebagai kreativitas mahasiswa, rasanya tidak tepat, karena idenya bukan langsung dari mahasiswa. Ini suatu bukti, bahwa mahasiswa tidak dituntut semacam berpikir yang kreatif. Bukankah ini suatu kemandekan?

Saya punya usul, teknis menganalisis permasalahan diberikan lebih banyak lagi oleh para dosen. Dalam kenyataan selama ini, dosen kurang memberikan hal tersebut. Kepada para mahasiswa tahun pertama sudah ditugasi menulis paper, tetapi kepada mereka belum diajarkan teknik analisis yang benar. Akibatnya mahasiswa tidak bisa bekerja menurut ketentuan akademis yang berlaku.

Endang Semiarti (Mahasiswa Teladan Fakultas Biologi UGM 1986): Contoh yang diberikan dosen dalam memahami ketentuan akademis itu sering berbeda. Dosen yang satu mengatakan karangan ilmiah itu formatnya begini, dosen kedua lain lagi. Sebagian dosen, bahkan bersikap tidak jujur. Dalam suatu penelitian, mahasiswa diajak meneliti. Setelah laporannya jadi, nama mahasiswa tersebut tidak dicantumkan. Padahal dosen tersebut hanya penyaji data saja. Jadi saya pikir, kalau kita ingin mendapat contoh ketentuan akademis yang benar dari dosen, harus ada ketentuan yang baku tentang istilah itu.

Sesungguhnya kekurangan perhatian dosen terhadap ketentuan akademis itu bisa diimbangi oleh kurikulum. Yaitu menciptakan mata kuliah khusus yang mengajarkan tentang ketentuan akademis itu. Saya kira contoh yang diberikan UNS, yaitu memberikan mata kuliah tesis, cukup baik. Dengan begitu mahasiswa tidak akan mendapatkan pengertian yang simpang siur tentang skripsi.

R. Suci Handayani (Mahasiswa Fakultas Hukum UGM 1986): Banyaknya mahasiswa yang tidak mengerti perbedaan antara seminar dan diskusi panel, simposium, dan sebagainya, saya kira erat sekali hubungannya dengan daya kritis minim. Ingatlah, istilah seminar, simposium, dan panel diskusi itu, sebenarnya sudah diajarkan sejak di SMA. Tetapi, karena mereka tidak menanggapinya dengan kritis, maka ketika menjadi mahasiswa, mereka lupa semuanya. Saya kira daya kritis mahasiswa ini yang perlu ditingkatkan. Dan saya mendapat contoh yang baik dari **Pak Koesnadi** (rektor UGM-red) mengenai peningkatan daya kritis ini. Dalam mata kuliah Hukum Tata Lingkungan yang diajarkannya, kami dilatih berseminar yang baik. Segala hal yang berhubungan dengan mata kuliah itu diseminarkan dengan kritis.

Agus Purwanto (Ketua BPM Fakultas Kehutanan UGM 1985-1987) Ketentuan yang baku tentang akademis itu sebenarnya sudah ada. Tetapi sering mahasiswa tidak mengindahkannya. Mereka merasa tidak bersalah melanggarnya. Misalnya dalam sebuah seminar, penanya sering bertanya mengenai hal yang di luar topik yang diseminarkan. Namun karena moderatornya kasihan, pertanyaannya itu di teruskan juga kepada pemrasaran untuk dijawab. Saya rasa kalau mahasiswanya mau mengikuti ketentuan yang baku mengenai ketentuan akademis itu, mereka mampu. Sayang sebagian besar mahasiswa sekarang suka "curi-curi". Dan ketika orang lain, apalagi dosen, membenarkan sikapnya itu, maka salahlah sikap itu untuk ditiru.

AGUS

Murdiyanto (Aktivis Diskusi FNT UGM):

Saya melihat kegagalan mahasiswa memperlakukan ketentuan akademis dengan ketat karena mereka malas. Mereka bersemangat dan mau belajar bila berkaitan dengan nilai. Bila dosen menugaskan mahasiswa membuat laporan ilmiah, baru mereka *kasak-kusuk* bekerja. Kalau tidak, ya diam. Hasilnya, kesadaran mereka terhadap ketentuan akademis itu jadi berkurang.

Mungkin persoalan ini bisa diatasi dengan seringnya dosen menugaskan mahasiswa membuat laporan ilmiah, melaksanakan seminar. Dan hasil pekerjaan itu benar-benar dinilai. Jadi tidak dibiarkan begitu saja.

Muhammad Dani Pratomo (Ketua Sema Fakultas Farmasi UGM 1985-1987): Tentang ketentuan akademis itu, menurut saya tidak terlalu berat dan tidak terlalu ringan. Biasa-biasa saja. Kalau banyak di antara mahasiswa yang tidak memperlakukan menurut semestinya, maka ini adalah masalah apresiatif terhadap ketentuan akademis itu. Kalau kita lihat di fakultas Farmasi, mahasiswa bisa mengikuti ketentuan akademis yang berlaku. Kebiasaan itu diperoleh dari meniru "kakak-kakakku" yang terdahulu. Ketika ketentuan itu tidak ditemukan pada "kakak-kakak" mereka, barulah mereka mencari dan mempelajarinya sendiri dari sumber lain. Dan biasanya, mahasiswa yang mempelajari sendiri tersebut lebih menguasai dan lebih apresiatif terhadap ketentuan akademis tersebut.

POLITIK dalam Kebudayaan

Oleh:
Emha Ainun Nadjib

(I)

Pembicaraan dengan judul (yang kita sebut aneh) semacam ini, nampaknya, harus sekaligus merupakan suatu pertanggungjawaban epistemologis — sesudah ontologis kepada apa filsafat membagi diri. Kata 'politik', 'kebudayaan' — bahkan kata 'dalam' — musti merupakan 'epiphenomenon' yang jelas: ketiga kata itu dikawal oleh tanda petik maupun tidak. Termasuk kalau kemudian kita berjumpa dengan nuansa, kelebatan arti baru atau mata pandang baru, yang membedakan antara kata jelas dengan 'jelas'.

Manusia selalu membutuhkan kepastian pegangan: siapa Ibu, tanggal lahir, keTuhanan atau ketidakTuhanan, tempat tinggal, pekerjaan dan masa depan.... oleh karena itu manusia membatasi diri. Manusia meringkukkan dirinya di dalam garis batasan, definisi, pengertian objektif dan kata benda-kata benda. Wilayah dipetak-petak, kerengketan multidimensi diiris-iris, kesatuan dipecah-pecah, sesuatu yang mengalir dipenggal menjadi potongan-potongan ke-diam-an, getaran dibekukan, film dipotretkan. Manusia, untuk memperoleh ketenteraman pengetahuan (yakni untuk menipu diri dari immanensi kegelisahan dan relativitas), membutuhkan doktrin yang 'pasti' mengenai setiap keberadaan, teori-teori baku ilmu pengetahuan dalam kerangka umum maupun khusus.

Adapun kehidupan selalu adalah darah yang hangat atau senyap, serta nyawa yang tak kunjung habis rahasia. Manusia barangkali suka menunda kepahaman bahwa sesudah yang disebut objektivitas itu relatif, ia bisa sama sekali nonsens. Bahwa kecap akhirnya ingkar bahwa ia kecap, bahwa langit bukan langit, bahwa derita bukanlah wujud yang semula dikenal sebagai derita. Bahwa bulan di atas kuburan"nya Sitor Situmorang yang tak usai diperdebatkan oleh berbagai mata pandang keilmuan sastra, sesungguhnya hanyalah soal sebel gagal cari hutangan.

Penyair **Umbu Landu Paranggi** pernah berbicara tentang kesibukan para piawi: "Mereka berputar-putar paling jauh di filsafat, belum puisi...."

Bertahun-tahun kemudian baru saya mengalami (tak bisa disebut sekadar memahami) bahwa yang dimaksud puisi itu bukanlah sebentuk karya seni, melainkan semacam suatu tahap kualitas penglihatan tertentu atas kehidupan ini dengan simpanan rahasianya yang lebih lanjut; suatu kerangkapan mata penghayatan — sesuatu yang lebih luas dan dinamis dibanding pemahaman akal akademis yang membatasi dirinya sendiri; atau semacam makrifat dalam artinya yang mungkin paling sederhana.

Maka kalau pada dinihari engkau memandangi barisan Ibu-Ibu dusun jauh dengan beban-beban di punggung yang membikin tubuh mereka terbungkuk-bungkuk, berjalan terbatas menuju Pasar kota;Engkaumenyaksikan senirupa berjalan, estetika bergerak, cahaya remang dan kemuraman jiwa manusia. Dinihari berikutnya engkau menyaksikannya sebagai keletihan sosial ekonomi. Dinihari

berikutnya lagi engkau menatapinya sebagai keperkasaan dan kesetiaan budaya dan keilahian. Kemudian pada dinihari berikutnya yang engkautemui pada barisan derita itu semata-mata dan segamblang-gamblangnya adalah peristiwa politik.

Maka alangkah tampak benderang airmuka dunia politik yang memancar dari kucuran darah tubuh maling yang dipermak habis oleh pemuda sekampung itu. Alangkah jelas peristiwa cinta dalam beribu peluru mendesing di peperangan yang tak habis-habisnya itu. Alangkah gamblang kasus keagamaan pada dentaman-dentaman musik disko, pada histeria beribu penonton di hadapan cipratan darah para petinju, atau di kantuk mata Pak Wongso yang tidak melakukan sesuatu yang berbeda selama lebih 40 tahun di warung kecilnya. Alangkah jernih pasal mental dan kejiwaan mencermin dari para Ulama yang tidak kunjung memimpin, para Umara yang tak menyantuni serta para penggembala kaum yang sibuk mencari bentuk-bentuk permaafan atas kekalahan-kekalahan tersembunyi — dengan mengumumkan teori primordialisme atau kamuflase integrasi nasional. Alangkah tak bisa dielakkan pancaran derita usus yang melilit-lilit dari in-trance pekikan Allahu Akbar? Allahu Akbar! selama kampanye Pemilu. Dan alangkah tak tersembunyikan jilbab yang makin melebar, melebar di seantero nusantara.

(II)

Dengan demikian, karena 'puisi', saya sendiri sukar mendisiplinkan pembicaraan ini — meskipun syukur kalau ia bisa berupa 'tak disiplin' yang sebenarnya suatu disiplin.

Saya berasal dari suatu kalangan orang yang lebih mempercayai 'carangan' dibanding 'pakem'. Cacing barangkali bukanlah binatang lunak penyubur tanah. Bimasena bukan seserpih kulit yang ditatah, manusia bukan wajahnya dan bukan pula darah dagingnya, dan segala kebenarannya tidak harus mesti bertempat tinggal di kurungan definisinya.

Sesudah kehidupan terdiri atas rumusan dan kesepakatan pengertian, atau patokan dan (sangkaan) kepastian, ia (kehidupan) justru terpelihara hidupnya oleh nuansa dan rahasia — yang dipenuhinya satu demi satu. Di
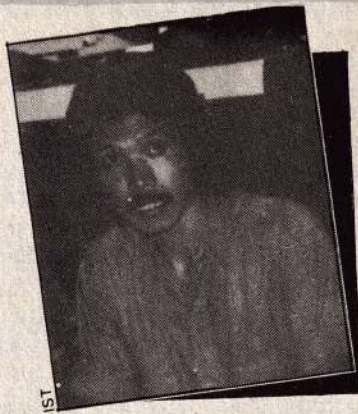
awal langkah setiap nuansa dan rahasia baru, rumusan menjadi 'rumusan', kepastian menjadi relativitas. Keris dan wrangka lebur pilah fungsinya, kancing 'dimasukkan' ke lobangnya, gaya menjadi isi, luar dan dalam tak menemukan beda eksistensi.

Padahal yang demikian, pertanyaan mana induk mana bagian — misalnya — antara politik dengan kebudayaan atau antara kebudayaan dan agama, hanyalah masalah teknis.

Politik mungkin bisa — umpamanya — kita artikan sebagai suatu kegiatan yang menyangkut kelompok-kelompok sosial, bangsa, mungkin kelas, atau bentukan grup sosial lain, yang bergerak-gerak — tawar menawar — menentukan penciptaan dan penggunaan kekuasaan negara. Dan kekuasaan yakni fungsi utama organisasi kenegaraan merupakan suatu kekuatan otoritatif yang memiliki keabsahan untuk memimpin kegiatan warganya dengan mengkoordinir atau mengelola kontras-kontras antar kehendak individu serta antar kehendak kelompok sosial. Otoritas itu, oleh negara, diperangkati oleh birokrasi, tentara dan polisi, penjara serta berbagai institusi. Adapun negara itu sen diri mungkin merupakan formulasi politis dari kehendak suatu masyarakat untuk mengatur dirinya, tapi mungkin juga 'sekadar' berupa organisasi politis dari suatu kelas ekonomi dominan.

Maka kalau itu halnya, kalau — misalnya — politik ialah proses tawar menawar kekuasaan dalam pengelolaan negara, maka pemuda-pemudi desa yang sibuk sembunyi mengaju dan terpisah perhatiannya dari apapun saja yang dilakukan oleh pamong desanya; maka anak-anak muda kota yang nothing to do, yang membuang hidupnya untuk intercom, bilyar, meja setan dan memancing tanpa perduli ada perkembangan gejala apapun di sekitarnya; atau sejumlah mahasiswa yang 'baik-baik', yang 'tekun sekolahan', membina karier mendaki tataran-tataran struktur jual beli alam dan manusia, tanpa pertanyaan-pertanyaan mengenai akal sehat kehidupan masyarakat dan negara — adalah juga suatutawarmenawar (pasif) yang mempersilahkan establisment untuk mengasyiki kereta ordenya.

Maka taraf kesadaran politik yang rendah di kalangan mayoritas masyarakat adalah raksasa kekuatan politik. Maka kesenian yang hanya gandrung (alienasi) estetika adalah sumbangan kekuasaan. Maka konsentrasi tunggal syar 'iyyi ummatberagamayangtanpa kepekaan-kepekaan di luar itu adalah saham kekuatan bagi otoritas politik Umara. Maka tipologi masyarakat (kita) yang (maniak) sentris kultural, yang merangkul wayang, P4, Pemilu, ayat Allah, hapalan ilmu sosial, ormas dan organisasi ekstra atau apapun saja lebih sebagai tradisi kultur — adalah konstribusi (tak langsung) terhadap kemapanan sebuah kekuasaan politik. Artinya, kekuasaan politik sangat dikandung oleh tradisi kebudayaan.

Sudah pasti dunia politik tidak hanya terpotret dari bagaimana pergulatan meja parlemen, namun juga dari aspirasi mayoritas yang tak pernah sampai ke depan gerbang gedung perwakilan rakyat. Dunia politik tidak hanya tergambar di permukaan panggung, tempat para pemimpin saling lobby, merancang model opportunisme, menentukan bentuk persuasi dan kompromi: dunia politik mungkin justru diberi warna oleh dunia bingung dan sepi di belakang panggung di mana para 'penonton' terkunci mulutnya. Dunia politik tidak hanya tampak dari bagaimana beberapa grup elite beradu okol dan belut putih, bagaimana informasi dirumbai-rumbai, bagaimana pemberangusan dirancang, bagaimana 'pemberontak' diciptakan, bagaimana perampokan didamaikan, bagaimana terdakwa diperankan, bagaimana sumber dana diperebutkan atau bagaimana ayam-ayam berakal diternakkan; tetapi juga bagaimana peluang-peluang dalam kebudayaan menyediakan diri bagi mobilisasi politik yang sudah sama sekali tak berwajah politik.

Proses-proses politik, dalam sejarah kita, sangat diberi peluang,

lahan, atau kemungkinan, oleh pola dasar kebudayaan manusia dan masyarakat kita.

Pada manusia Jawa, umpamanya, feodalime sejak lama tak lagi bersangkut paut secara primer dengan kelas penguasaan tanah: feodalisme sudah sekadar menjadi perilaku budaya, menjadi pola (yang bahkan dianggap etis dan estetis) hubungan antar manusia, bahkan feodalisme — pada tingkat tertentu — sudah "menjadi manusia Jawa" itu sendiri. Paternalisme, jadinya, juga menjadi semacam 'keluhuran' yang harus dilestarikan. Diwariskan — dan pewarisan itu sendiri adalah pola paternalisme, yang sesungguhnya mengandung suatu makna eufemistik sebagai semacam mobilisasi politik yang justru amat canggih. Dengan kata lain: Jadilah Pemerintah, karena pengelolaan kekuasaan Anda sudah dimulai secara efektif sejak di ranjang bayi.

Kecuali — barangkali — jika Anda adalah anggota masyarakat Badui Dalam atau Amatoa, tak bisa Anda elakkan pengetahuan bahwa proses-proses (tawar-menawar, mobilisasi) politik (yang berpusat di semacam Maha Rezim yang bagai kekal abadi meskipun raut wajahnya bisa berganti) telah selalu mengalir dalam keringat dan lendir tradisi kebudayaan sehari-hari kita.

Maka kata orang, selama "politik dalam kebudayaan" itu berlangsung, merintis kekuatan politik (di pucuk) hanya bisa akan realitas (artinya Anda tidak berkembang menjadi pewaris Maha Rezim di atas) apabila dikerjakan dengan pertama-tama 'menggoyang' bangunan-bangunan kebudayaan.

(III)

Kebudayaan itu sendiri adalah kecenderungan perilaku, yang bermula dari sikap — dan itu disumberi oleh mungkin naluri, 'bakat alam', hatinurani, agama, lingkungan maling atau apapun.

Kebudayaan ialah bagaimana cara seorang Bapak menyintai anaknya, bagaimana seorang Ibu memperlakukan beras, bagaimana seorang Guru mendidik muridnya, bagaimana seorang Camat memilih disain kursi dinasnya, bagaimana seorang Kiai menyodorkan punggung tangannya untuk dicium, bagaimana masyarakat memperlakukan Syawalan dan pencopet, bagaimana seorang pemuda mereaksi uang di tangannya, bagaimana Pemerintah memperlakukan orang miskin dan tinju profesional....

Jadi kebudayaan ialah bagaimana sebuah masyarakat ilmiah membiarkan kampusnya berlanjut feodal. Bagaimana cendekiawan tingkat tinggi membatalkan protresnya terhadap irasionalitas sistem tertentu yang menyangkut mereka serta kacaunya lalulintas komunikasi keilmuan. Bagaimana penduduk mencoblos tanda gambar kontestan Pemilu berkat ketakutan. Bagaimana seorang Bapak di Kecamatan sekeluarnya dari ruang coblosan lantas mengacungkan tanda gambar dan membukanya sambil berkata: "Lho! Ini saya nyoblos nomer dua lho! Semua menyaksikan yaaa!". Bagaimana kita belajar ilmu hukum supaya tahu persis bagaimana melanggarnya. Bagaimana kalau ada orang kecelakaan jangan sekali-sekali berani menolongnya. Bagaimana televisi tak pernah menyiarkan ada barang sepuluh saja orang miskin di negeri ini.....

Tapi kita tak lupa kebudayaan ialah juga bagaimana seorang pegawai menyikapi mekanisme kekuasaan di kantornya, bagaimana seorang pemuka Agama jujur atau manipulatif terhadap ayat-ayat Tuhannya, bagaimana seniman memawas wilayah-wilayah di luar 'dunia' keseniannya, bagaimana Anda merintis suatu komunitas pendidikan anak-anak yang menyediakan rangsangan bagi bertumbuhnya sikap subjek-budaya yang ternyata adalah juga sikap subjek-politik.

Pada bulan Ramadlan kemarin saya bersyukur ikut mengalami gairah besar Ummat Islam dalam memperkaya kebudayaan-Ramadlan, yang pada saat yang sama sesungguhnya mencerminkan rasa kesepian politis mereka. Dengan menyelenggarakan ceramah, seni dan kerja sosial Ramadlan yang lebih intensif dan makin kaya bentuk; dengan arus mendekati kembali hidayah, janji dan rahasia Kitab Suci; dengan beredar-edar mencari penceramah yang menarik; dengan terus mencari kreativitas bentuk kebudayaan agama yang baru... sesungguhnya komunitas Muslimin — yang di beberapa lapis sosial tertentu kini makin 'dipimpin' oleh anak-anak muda — sedang menyelenggarakan suatu pencarian politik.

Sesungguhnya saya hanya ingin mengemukakan bahwa kita makin perlu memacu suatu keadaan sadar-budaya, tahu-budaya dan sikap-budaya yang lebih memiliki keberangkatan politik — dalam arti luas tapi fundamental.

(makalah untuk diskusi sabtu pagi 13 juni 1987 di perpustakaan yayasan hatta yogyakarta)
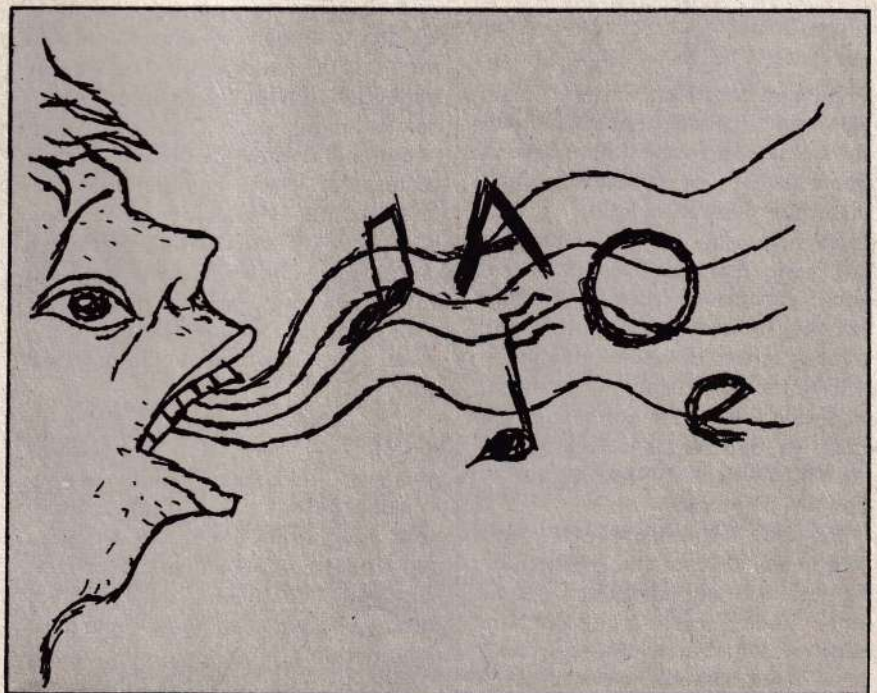
Komunikasi POLITIK di Indonesia

oleh :
Eddy Junaidi
Kelompok Studi Jurnalistik
"RELATA" JAKARTA

KOMUNIKASI POLITIK di Indonesia sebagai sebuah Ilmu pengetahuan masih tergolong muda, sama halnya dengan ilmu komunikasi sendiri. Padahal aktifitas kenegaraan arahnya ditentukan oleh kebijaksanaan politik. Peran komunikasi sebagai *Outlet* sangat menentukan dalam proses politik.

Di negara berkembang kebebasan informasi dan komunikasi politik sering tersangkut dengan kebijakan-kebijakan lembaga kekuasaan. Tak salah jika Pers di negara berkembang, dibebani tanggung jawab politik yang ketat. Pers diberi tanggung jawab akan kesinambungan pembangunan nasional, sementara masyarakat menuntut agar pers menjalankan fungsi kontrol sosial. Dilema posisi pers di sini suatu hal yang wajar mengingat strategi pembangunan di negara berkembang yang mengutamakan 'pertumbuhan ekonomi'. Untuk itu diperlukan 'Stabilitas politik', tak heran jika terjadi kekacauan politik, pasti ada pers menjadi tumbal (ingat peristiwa Malari, huruhara sidang Umum 1978, dan peristiwa 1982).

Partisipasi Politik

Dinamika politik di Indonesia ikut menentukan pasang surut terhadap kebebasan dan iklim komunikasi politik. Partisipasi politik masyarakat lewat kebebasan pers dibatasi, depolitisasi dijalankan dengan *floating mass* pada masyarakat umum, dan kampus lewat konsep NKK/BKK. Konflik ideologi yang selama ini menjadi masalah diakhiri dengan azas tunggal, dipetakan lewat pers dengan konvensi tentang SARA yang rawan. Seakan lewat cara inilah pertumbuhan ekonomi dengan bantuan luar negeri bisa berjalan lancar. Asumsi ini diperkuat oleh kehadiran golongan menengah ke atas dan dukungan teknokrat serta militer yang dominan dalam era orde baru.

Persepsi politik semacam ini ditinjau dari Ilmu Komunikasi kurang sehat, karena ditelantarkannya unsur Umpan Balik *(feed back)* dalam pembangunan. Komunikasi timbal balik yang merupakan indikator sehat atau setidaknya suatu komunikasi, kecil sekali porsinya. Arus bawah *(bottom up)* susah mendapatkan *outlet*, sehingga partisipasi mengarah semu. Sewaktu kampanye terbukti bahwa masyarakat terutama kaum muda (pelajar dan mahasiswa) perlu *outlet* untuk menyalurkan aspirasi mereka. Maka PDI-lah yang dijadikan sebagai *outlet*, dijalankan begitu garangnya, mereka berteriak memberikan koreksi. Maka dari itu diragukan, fanatisme dan keterikatan mereka dengan orpol ini hanya sekedar *Perhimpitan kepentingan (over lapping of interest)* saja. Terjadinya perbedaan persepsi sebagian kalangan tentang arti dan strategi pembangunan, disebabkan karena tidak terjadinya komunikasi timbal balik yang proporsional. Kredebilitas pers cenderung sebagai organ kehumasan. Saratnya informasi-informasi pembangunan pada media massa, sehingga mengecilkan kemungkinan umpan balik dari masyarakat. Kurang terangkatnya masalah yang mendasar pada pers, mengakibatkan partisipasi semu penyubur. Maka. pengazastunggalan saja. Perlu diikuti oleh strategi dan program konkret lembaga sosial politik dalam membangun kehidupan politik di negara ini.

Dukungan masyarakat dengan demikian akan lebih semarak, jadi bukan kekecewaan yang bertambah akibat janji-janji bulan madu sewaktu Pemilu tidak direalisasikan.

Simbol-simbol Komunikasi Politik

Perlu dibatasi pengertian komunikasi politik di sini secara fungsional dengan mengacu batasan dari *Fagen (Politics and Communication*, 1986*)* yaitu:

> "Segala aktifitas komunikasi yang dipandang soal-soal politik berdasarkan akibat-akibatnya, baik bersifat aktual dan potensial di mana akibat itu membawa pengaruh kepada berfungsinya sistem politik yang ada."

Batasan Fagen di atas beranjak satu langkah dari seluruh argumentasi komunikasi dengan memandang konsekuensi aktivitas *decission makers* sebagai komunikator di dalam suatu

sistem dan bukan untuk membatasi sistem tersebut.
Sebelumnya sering pengertian komunikasi politik, yang berdasarkan fenomena media massa saja. Sama halnya jika meninjau komunikasi politik sewaktu kampanye dengan melihat fenomena surat kabar, radio atau TV saja. Padahal kampanye ada yang bersifat langsung, juga ada yang berupa diskusi, kontribusi berbentuk materi yang masing-masing punya ukuran-ukuran tersendiri.
Mengenai ukuran dan bidang garapan dari komunikasi kita mengacu dari batasan yang diberikan oleh *Rivers*. Ada tiga batasannya yaitu, *pertama*, pengaruh pemerintah terhadap media, baik dari pengaturan hukum, kontrol ekonomi, aturan peliputan dan sebagainya. *Kedua*, sistem informasi pemerintahan, termasuk saluran formal dan informal serta personal informasi pemerintahan (DEPPEN). *Ketiga*, pengaruh media terhadap pemerintahan, termasuk penggunaan resmi media massa, pengaruh berita-berita terhadap perilaku pejabat.

Asumsi di atas jika dikaitkan dengan kondisi negara yang sedang berkembang, didapat ciri media massa adalah untuk menggerakkan perubahan. Akselerasi pembangunan ikut ditentukan oleh aktivitas komunikasi dari insan yang terlibat dalam proses tersebut. Untuk mendapatkan komunikasi politik yang dinamis mengenai kekuasaan haruslah diberikan oleh pemegang kekuasaan itu sendiri. Apabila sasarannya partisipasi, maka keinginan masyarakat harus dikomunikasikan kepada penguasa. Inilah yang terjadi karena terputusnya informasi atau bias disebabkan harus melalui suatu jaringan besar yaitu birokrasi. Apalagi jika dikaitkan dengan mental birokrat yang banyak ABS, sehingga informasi seharusnya sampai dan diperlukan untuk mengambil keputusan politik, menjadi percuma.

Jika komunikasi politik mengenai legitimasi, maka norma-norma rezim harus dinyatakan secara simbolis. Sering kurang berhasilnya suatu komunikasi politik karena ketidakjelasan akan simbol (bahasa). Sikap pejabat yang anti kritik menyebabkan adanya suatu pembelaan (apologi) akan kritik yang dilontarkan, bukan menganggap kritik sebagai input untuk mengambil keputusan. Dan apabila komunikasi politik mengenai pemilihan, maka yang perlu digarisbawahi adalah pemilihan kebijaksanaan. Jangan heran kalau sewaktu kampanye para kontestan menjanjikan program yang mendasar dari masyarakat, malah ada salah satu OPP nekad menjanjikan penghapusan SPP. Lepas dari mungkin dan tidaknya dalam komunikasi politik selalu dilontarkan pesan yang menyentuh, walaupun akhirnya tak lebih sebagai retorika politik atau *Lpi service*.

Ditelantarkannya umpan balik

Beranjak dari asumsi *Rivers* di atas, kita lihat pengaruh pemerintah dalam menentukan arah dan langkah pers sangat besar sekali. Baik dari aturan SIUUP, perolehan sampai dengan pembatalan SIUUP. Aturan peliputan terutama yang menyangkut kebijaksanaan pemerintah harus lewat saluran resmi. Di departemen lewat pejabat HUMAS, untuk Kabinet melalui MENPEN atau juga melalui menteri bersangkutan.
Kecil kemungkinan untuk tahu lebih jauh penyebab diberlakukannya menampilkan respon masyarakat atau menanggapi serta beropini, terutama yang berupa koreksi. Kontrol sosial masyarakat lewat pers diperkecil porsinya, sehingga kentara sekali dominasi penguasa dalam sistem informasi. Ketidakberdayaan media massa dalam mengurangi dominasi ini, menyebabkan terlantarnya unsur umpan balik lewat media massa. Secara langsung seperti dikemukakan di atas terhalang oleh jaringan birokrasi dengan budaya politik personnya.
Azas keterbukaan yang perlu ditumbuhkan merupakan kunci keberhasilan suatu komunikasi, sekaligus merupakan indikator kehidupan demokrasi. Rendahnya volume informasi tentang politik juga merupakan pertanda sedikitnya yang ambil peran *(sharing)* dalam aktivitas politik. Ketidakberanian para cendekiawan melakukan kritik, pertanda kran kebebasan perlu diperlonggar. Sikap pejabat yang tidak suka dikritik sangatlah menentukan iklim dari komunikasi politik di negara kita. Perlunya suatu terobosan budaya untuk keterbukaan dalam menerima kritik, demi menegakkan demokrasi Pancasila yang kita cita-citakan.

Pembangunan sangatlah menentukan dan memerlukan partisipasi, untuk itu umpan balik harus dipertinggi frekuensinya. Baik *outlet*, keberanian masyarakat dan kerelaan pejabat menerima kritik, sebagai input dan bagian dari unsur pembangunan sendiri. Hasrat perbaikan hidup masyarakat semakin tinggi, walaupun tidak didukung oleh situasi ekonomi yang menguntungkan. Dituntut peran yang lebih besar terhadap lembaga-lembaga sosial politik untuk menampung, menyerap serta merumuskan hasrat hidup dan hasrat partisipasi masyarakat agar diperoleh strategi dan program yang membawa kemajuan dan sekaligus menyentuh hasrat rakyat.

Dalam proses *nation building*, komunikasi horisontal (sesama komunitas), komunikasi vertikal baik *up down* maupun yang *bottom up* sebisanya proporsional, sehingga keragaman justru memperkuat rasa kebersamaan. Jangan sampai kesatuan azas justru melemahkan dinamisasi kehidupan bernegara. Tak ada salahnya *outlet* bagi masyarakat untuk menyalurkan umpan balik yang diperlukan, diperlonggar, sehingga tercipta komunikasi politik yang populis (kerakyatan).

Demokrasi
TINJAUAN ANTROPOLOGIS

oleh:
M.Syahbuddin Latief
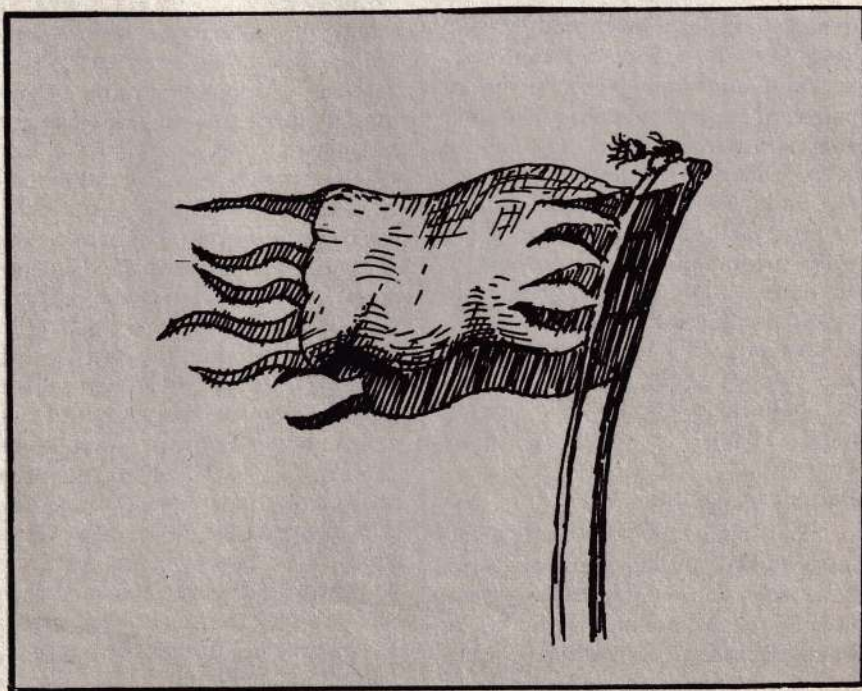
Pembahasan tema demokrasi dari perspektif ilmu politik merupakan hal yang "menyenangkan". Karena, *politik* sebagai kata kerja berarti segala aktivitas atau sikap yang berhubungan dengan kekuasaan dan yang bermaksud untuk mempengaruhi, dengan jalan mengubah atau mempertahankan, suatu macam bentuk susunan masyarakat.[1]

Batasan pengertian politik di atas, cukup bersahaja, namun mampu memberi pemahaman dan tingkat analisa konsepsi yang mendalam.

Pertama, tulisan ini akan menelaah aspek-aspek historis (paleo) antropologis dan aspek historis teoritis.

Kemudian, fenomena politik (cq demokrasi) akan ditelaah secara kritis dari perspektif Antropologi, yang mengacu pada batasan *politik* diatas Yaitu,yang mencakup dua konsep utama; konsep bentuk susunan masyarakat, dan konsep kekuasaan.

Terakhir, bagian penutup akan mereviuw uraian-uraian yang terasa 'cair' dengan topik bahasan.

Telaah Historis (Paleo)Antropologis dan Historis Teoritis

Menurut tarikh bumi, terjadinya dunia kita ini kira-kira 250 ribu juta tahun yang lalu. Setelah melalui zaman yang tertua *(Archaeikum)*, zaman hidup tua *(Palaeozoikum)* atau zaman primer, zaman hidup pertengahan *(Mesozoikum)* atau zaman sekunder, zaman hidup baru *(Neozoikum)*, barulah manusia ada. Tepatnya pada zaman kuarter, sebab pada zaman tersier jenis binatang menyusui baru berkembang sepenuhnya. Zaman kuarter sendiri ada dua bagian, yakni zaman *Diluvium (Pleistocen)* atau zaman Es, terjadi kira-kira 600.000 tahun yang lalu dan zaman *Alluvium (Holocen)*, terjadi kira-kira 20.000 tahun yang lalu. Para ahli menduga, manusia (dengan kondisi yang sangat bersahaja) lahir antara periode diluvium dan alluvium tersebut. Inilah zaman prasejarah, prehistori, atau nirleka: zaman belum dikenal adanya tulisan.
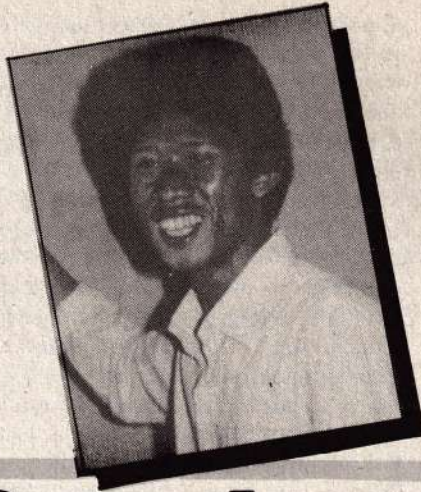
Dari zaman *Alluvium*, hanya ± 6000 tahun yang terakhir saja yang ditempati oleh sejarah.[2] Dari temuan tulisan-tulisan di atas batu, kita ketahui bahwa bangsa Sumeria dan Mesir baru mengakhiri zaman prasejarah kira-kira 4000 tahun sebelum Masehi. Sedangkan bangsa Irian (Jaya), sebagai perbandingan, baru pada wal abad XX ini memasuki zaman sejarah. Padahal, umumnya, orang sepakat bahwa bangsa kita telah memasuki zaman sejarah sejak abad ke V Masehi.[3] Dari sistem mata pencarian hidup manusia, kita ketahui bahwa berburu dan meramu *(food gathering economic)* merupakan sistem mata pencarian hidup yang pertama-tama dikerjakan makhluk manusia. Ia berlangsung sejak terjadinya manusia sampai munculnya sistem bercocok tanam kira-kira 10.000 tahun yang lalu, paling sedikit di delapan tempat di muka bumi ini.[4] Kemudian, pada pertengahan abad XX suku-suku bangsa di berbagai pelosok dunia mulai bekerja di kota-kota: sebagai buruh, tentara, dan pekerjaan-pekerjaan khusus lainnya.[5]

Uraian historis di atas penting untuk kita kaji, walaupun ia lebih bersifat *physical anthropology* (paleoantropologi). Namun, dengan pendekatan yang tersebut terakhir ini kita akan dapat merekonstruksi secara baik tatanan kebudayaan suatu masyarakat di masa silam, berdasarkan bukti-bukti benda (artefak, fosil) yang ditemukan.

Telaah Historis Teoritis

Demokrasi adalah sebuah genre dari aktivitas mengelola kekuasaan *(how to manage the power)*. Tiga asumsi dapat diajukan sebagai argumen untuk menelaah fenomena demokrasi ini secara kritis. Pertama, sebagai sebuah doktrin politik ia ternyata terbukti membawa banyak "*berbaikan*" bagi banyak negara. Misalnya, Amerika Serikat, yang dianggap sebagai model negara demokrasi yang ideal, ternyata di sana melahirkan banyak keberhasilan dalam bidang-bidang ekonomi,iptek, dan militer. Kedua, demokrasi sejarah yang panjang. Implikasinya, jelas, memiliki akar sejarah yang panjang. Implikasinya, ia diharapkan "tahan banting" dalam pergulatan dengan ideologi-ideologi politik lain.

Ketiga, demokrasi dipandang sebagai suatu sistem yanag alamiah dan manusiawi. Sehingga, barangkali, rakyat di negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk memilih sistem pemerintahan dan politik negaranya.

Asal usul demokrasi dapat kita telusur pada masa demokrasi abad sebelum Masehi. Dan kita pun harus menelaah dari para pemikir dan model-model yang telah dilakukan di dunia sebelah barat. Perhatian kita akhirnya akan tertuju ke zaman Yunani Kuno. Zaman di mana pemikiran-pemikiran tentang demokrasi dimulai dengan sadar. Praktek demokrasi langsung yang diterapkan pada suatu negara kota yang kecil (yang disebut *polis)* pada kurun waktu 5-6 abad sebelum Masehi itu dapat kita anggap sebagai "cetak biru" konstruk demokrasi di dunia modern ini. Tokoh-tokoh demokrasi zaman Yunani Kuno dapat disebutkan antara lain: **Solon**, tokoh pembuat hukum (638-558 SM); **Chleisthenes**, bapak demokrasi

Athena (508 SM); **Pericles,** jenderal negarawan (490-429 SM); dan **Demosthenes,** negarawan orator (385-322 SM).[6] Perlu juga diketahui bahwa, ternyata dalam zaman Yunani Kuno di sepanjang sejarah hidup kenegaraannya, justru, lebih banyak diliputi oleh periode-periode pemerintah yang bercorak diktatorian, tiran, dan oligarkian,baik oleh sipil maupun militer. Ironis lagi, demokrasi langsung zaman Yunani Kuno di Athena akhirnya hancur oleh serbuan negara Sparta (yang otoriter) dalam peperangannya yang terkenal, perang Peloponnesia (berlangsung 27 tahun, 431-404 SM).[7] Jadi, demokrasi di negeri asalnya ternyata hanya merupakan suatu periode perkecualian dalam rangkaian perjalanan sejarah pemerintahannya. Inilah barangkali yang mendorong **Socrates** (469-399 SM) memberhentikan profesi politiknya di Athena untuk kemudian mencurahkan perhatian sepenuhnya pada soal-soal kemasyarakatan. Perhatiannya pada soal-soal kemasyarakatan yang dilakukan dengan mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan siapa saja yang ditemuinya (terkenal dengan istilah "dialog Socrates" dan "ironi Socrates") ternyata memojokkan kelompok mapan praktisi (kaum sofis). Akhirnya, karena "kalah suara" dan dituduh merusak pikiran kaum muda, Socrates harus menerima kenyataan di hukum mati.[8] Pikiran-pikiran tegar Socrates dilanjutkan oleh murid utamanya, Plato. Di tangan Platolah pemikiran-pemikiran tentang bagaimana cara individu berhubungan dengan sesama dalam hidup bermasyarakat diabadikan dalam sebuah bukunya yang terkenal, *Politeia* (Republik). Buku ini menjadi buku pegangan di sekolah yang didirikannya, *Akademi.*[9]

Dari tokoh-tokoh pemikir zaman Yunani Kuno, yang menarik adalah teori Aristoteles. menurut Aristoteles (384-322 SM), indikator suatu sistem pemerintahan itu adalah : siapa, berapa orang, dan bagaimana penguasanya (apa tujuan atau kepentingan penguasa). Suatu pemerintahan disebutkan *Monarki* bila penguasannya seorang. Bila penguasanya beberapa orang dinamakan **Aristokrasi.** Sedang, bila penguasanya banyak (banyak orang yang memerintah) disebut *Republik Konstitusional.* Pada bagian ini kita tidak menemukan sistem demokrasi. Tapi, pada bagian diversifikasi kepentingan penguasa kita akan menemukan rumusan sistem-sistem pemerintahan versi Aristoteles, yang lebih detail.

pemerintahanMonarki,Aristokrasi, dan Republik Konstitusional, seperti disebut diatas,adalah bentuk pemerintahan yang dikuasi oleh seorang, beberapa orang, dan banyak orang dengan tujuan utama untuk (memajukan) kepentingan umum. Namun, bila kekuasaan itu ditujukan untuk kepentingan diri pribadi sang Monarch, pemerintahannya disebut *Tiranni.* Kemudian, bila kekuasaan ditujukan untuk kepentingan diri sendiri beberapa penguasa, pemerintahannya disebut *Oligarki.* Bila kekuasaan ditujukan untuk kepentingan diri sendiri kelompok orang (banyak) yang memerintah, pemerintahannya disebut *Demokrasi.*[10] Jadi, menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan yang paling baik adalah Republik Konstitusional. Sebab, dalam Republik Konstitusional pelaksanaan kekuasaan dilakukan oleh banyak orang (dengan tujuan untuk memajukan kepentingan umum). Misalnya salah seorang pelaksana kekuasaan ada yang keliru, maka penguasa yang lain akan dapat mengingatkan atau memperbaikinya. Berkaitan erat dengan uraian terakhir tersebut, Aristoteles mengemukakan teorinya tentang *zeifverietiging,* yaitu benih merusak diri sendiri. Bahwa dalam setiap sistem pemerintahan pasti terdapat benih merusah diri sendiri. Benih ini muncul dari sifat dasar (watak) manusia, di satu pihak menginginkan persamaan sedang dipihak lain menghendaki adanya perbedaan, keistimewaan-keistimewaan. Hanya dengan bentuk pemerintahan Republik Konstitusionallah benih-benih zeifvernietiging dapat direduksi seminimal mungkin. Dari tiga sistem pemerintahan yang berorientasi untuk kepentingan diri sendiri penguasa, sistem demokrasi yang paling baik. Sebab, walaupun mementingkan diri sendiri, tapi karena diri sendiri itu banyak orang maka masih tergolong baik, sekalipun belum seluruh orang. Dengan demikian, demokrasi menurut teori sistem pemerintahan Aristoteles bukan merupakan sistem pemerintahan yang terbaik. Sistem pemerintahan yang terbaik adalah Republik Konstitusional, di mana terjadi mekanisme pengawasan zeifvernietiging yang ketat.

Telaah Antropologis

Dari batasan "politik" yang diajukan **Deliar Noer** pada pengantar tulisan ini, setidaknya ada dua konsep penting yang dapat dibahas secara mendalam dari perspektif Antropologi. Pertama, konsep bentuk susunan masyarakat. Kedua, konsep kekuasaan. Dalam literatur Antropologi sendiri, pokok bahasan politik *(incl.* demokrasi) dapat kita temukan dalam unsur sistem kemasyarakatan (dari tujuh unsur kebudayaan universal). Dari unsur sistem kemasyarakatan ini pula terdapat sub-sub unsur: sistem kekerabatan, sistem kesatuan hidup setempat, asosiasi dan perkumpulan-perkumpulan, serta sistem kenegaraan.[11] Telaah pada bagian ini membatasi diri pada pembahasan kedua konsep di atas.

Konsep Bentuk Susunan Masyarakat

Untuk kemudahan analisis, konsep bentuk susunan masyarakat dapat kita pilah menjadi: bentuk masyarakat, dan susunan masyarakat. Bentuk masyarakat, menunjuk pada dimensi ideal-kuantitatif-abstrak. Misal: masyarakat *band,* desa, masyarakat negara kuno, masyarakat modern, dsb. Sedangkan susunan masyarakat, menunjuk pada dimensi operasional-kualitatif-konkrit. Misal: hamba, raja, *upper class, middle class, lower class,* petani, pedagang, dsb. Susunan masyarakat mengesankan kepada kita, seolah-olah, adanya tatanan tertentu dalam suatu masyarakat yang disebabkan adanya perbedaan kemampuan, jenis pekerjaan, dsb.

Bentuk Masyarakat

Pembahasan konsep bentuk susunan masyarakat berakar pada konsep kesatuan sosial. Artinya, kesatuan sosial adalah dasar dari bentuk masyarakat maupun susunan masyarakat. Seperti kita ketahui, kesatuan sosial dapat terjadi karena adanya dua hal. Pertama, karena ikatan kekerabatan *(kinship system).* Kedua, karena ikatan (kesamaan) tempat kehidupan. Konkretnya, setiap manusia bersama-sama manusia lain tentu (hidup) menempati satu wilayah tertentu di muka bumi ini. Dalam buku-buku sosiologi, kesatuan setempat serupa

itu disebut *community* (komunitas) adalah: adanya wilayah tertentu, kecintaan terhadap wilayah, adanya ciri kepribadian komunal. Bentuk komunitas besar kita kenal sebagai: kota, negara bagian, negara, dan persekutuan-persekutuan antar negara, dsb. Tetapi, perhatian Antropologi lebih kepada bentuk-bentuk komunikasi kecil, seperti: rukun tetangga, *band*, desa, federasi antar desa, dsb.

Band. *Band* adalah kelompok berburu yang hidup berpindah-pindah dari berburu dan meramu dalam batas suatu wilayah tertentu. Satu band biasanya terdiri dari 80 s/d 1000 individu. Bersifat *nomaden*, berburu binatang dan meramu tumbuh-tumbuhan liar. Contoh yang terkenal dalam Antropologi adalah seperti apa yang dilukiskan oleh **B. Spencer dan J.F. Gillin** dalam karangan klasik mereka: *The Arunta. A Study of a Stone Age People* (1927). Dalam buku tersebut, Spencer dan Gillin melukiskan kehidupan dari band-band suku bangsa Arunta dari daerah utara Pegunungan Mac Donnel (Australian Tengah).[12]

Desa. Desa merupakan komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat. Anggota desa biasanya hidup dari pertanian (bercocok tanam) dan perikanan. Tipe desa, kalau kita amati dengan jeli, ada bermacam-macam. Ada yang mengelompok padat, seperti umumnya di Indonesia. Ada yang bersifat tidak menetap, seperti di Samboanga, Mindanao, Filipina Selatan. Suku Bangsa Subanun (di Samboanga tersebut) mempunyai kebiasaan jika sedang mengerjakan ladangnya,maka mereka membangun rumah di tengah ladang itu pula. Rumah dipindahpindahkan bersama dengan pindahnya ladang-ladang. Akibatnya, pola perkampungannya menyebar *(diverse settlement pattern)*. Pada suku bangsa Indian Tarahumara di Meksiko Barat, desa-desanya hanya ditinggali beberapa bulan saja dalam periode satu tahun. Hal tersebut dapat terjadi karena sebagian besar waktu dihabiskan dalam rumah atau gubuk-gubuk di dekat ladang masing-masing.

Solidaritas dalam masyarakat kecil. Dalam kehidupan masyarakat berbentuk komunitas kecil, tampak ada rasa saling tolong menolong yang besar. Penelitian **Molinowski** di Trobriand (kepulauan sebelah tenggara Irian) memperlihatkan adanya pola-pola tertentu dalam hubungan antar individu dalam masyarakat. Selanjutnya, pola tersebut dikenal sebagai *principle of reciprocity*. Dalam masyarakat petani Jawa (khususnya), kita kenal adanya istilah *sambatan*. Menurut terminologi Malinowski di atas, sambatan merupakan salah satu bentuk dari prinsip resiprositas tersebut. Prinsip resiprositas ini meliputi segala aktivitas tukar menukar barang atau jasa (tenaga) dalam berbagai aspek kehidupan. Dan, ia merupakan manifestasi bentuk solidaritas antar pribadi atau keluarga. Bentuk solidaritas lain adalah aktivitas tolong menolong secara massal. Kita kenal dengan sebutan kerjabakti atau darmabakti.[13]

Susunan masyarakat

Dalam suatu masyarakat sederhana, susunan masyarakat tidak begitu rumit. Misalnya pada masyarakat *band*, kita akan menemukan "pimpinan" *band* dan anggota-anggotanya yang relatif sejajar. Kondisi dan kualitas antar individu cenderung seragam. Pada masyarakat desa, karena tuntutan pengaturan yang tetap, sesuai sifat desa, mulai berkembang fungsi-fungsi tertentu yang perlu ditangani tersendiri. Misalnya, di desa Bojongloa (di lereng Gunung Tampomas, barat Sumedang), desa dikepalai oleh seorang *kuwu*. *Kuwu* dibantu oleh *juru tulis*, *kokolot* (semacam kurir, bagian ekspedisi), *kulisi (bagian keamanan)*, *ulu-ulu* (bagian pembagian air). *amil* (bagian kerohanian), dan *pembina desa*.[14]

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, suatu desa yang sangat padat misalnya, akan muncul dengan lebih jelas perbedaan-perbedaan kedudukan dan derajat (status) antar individu atau kelompok tertentu. Perbedaan-perbedaan biasaya disebabkan oleh faktor-faktor: kualitas dan kepandaian,senioritas, sifat keaslian, keanggotaan salah seorang kaum kerabat pada posisi tertentu di masyarakat, pengaruh dan kekusaan, pangkat, kekayaan. Perbedaan-perbedaan itulah yang mendasari adanya pelapisan sosial di masyarakat *(social stratification)*. Orang-orang yang menganggap dirinya masuk dalam suatu kelompok kedudukan atau status tertentu cenderung saling berhubungan/bergaul di antara sesamanya. Bahkan, secara sadar atau tidak, mereka pun membangun dan mengembangkan cara dan gaya hidup tertentu. Gejala ini menyebabkan munculnya"lapisan-lapisan sosial tak resmi." Sebagai contohnya: kaum terpelajar, golongan menengah, orang kampung , pegawai negeri, dsb.[15] Sedang lapisan sosial yang terbentuk karena adanya sistem pembagian hak dan kewajiban yang jelas dan mantap yang dikuatkan oleh hukum atau adat, disebut sebagai "lapisan sosial resmi" *(estate)*. Misalnya: *commoner* (orang biasa) dan *nobility* (bangsawan) pada masyarakat Inggris; *ate* (budak), *tog* (orang biasa), dan *usif* (bangsawan) pada masyarakat Atoni (di Amarasi, Timor Barat), dsb. Sistem pelapisan sosial yang telah membeku kaku akan menimbulkan suatu sistem kasta.

Konsep kekuasaan

Pembahasan "kekuasaan" sangat berkaitan erat dengan sistem pengaturan hidup bersama. Kekuasan menunjuk pada faktor pengesah (legitimator) untuk mengoperasionalkan sistem pengaturan. Dengan demikian, secara operasional, kekuasaan juga berkaitan erat dengan bentuk dan susunan masyarakat. Susunan masyarakat, tegasnya, ditunjukkan adanya pelapisan sosial, menggambarkan kepada kita secara jelas siapa-siapa yang bakal memegang tampuk kekuasaan sekaligus siapa-siapa yang dikuasai.

Pimpinan masyarakat. Pimpinan masyarakat adalah manifestasi personal dan komunal pemegak tampuk kekuasaan. Secara personal, pimpinan masyarakat membuktikan akan kelebihan-kelebihan kemampuan yang dimilikinya dibanding orang lain dalam masyarakatnya. Secara komunal, ia dipandang 'feasible" menjatur/mengelola kehendak-hendak masyarakatnya. Dalam masyarakat kecil, sesuai concern disiplin ilmu Antropologi, dikenal empat macam bentuk dasar kepemimpinan. Yaitu: pimpinan kadangkala, pimpinan terbatas, pimpinan mencakup, dan pimpinan pucuk. Keempat macam bentuk dasar kepemimpinan tersebut terbukti sesuai dengan hasil penelitian etnografis (mengenai kekuasaan serta syarat-syarat kepemimpinan) dari berbagai kebudayaan di Afrika, Asia, dan Kepulauan Pasifik; terutama pada masyarakat-masyarakat kecil, sedang dan negara-negara kuno.[16] Tiga kerangka analisis yang dikembangkan dari data-

data etnografi tersebut, meliputi:
1. Kekuasaan dan Kepemimpinan Tradisional dalam Masyarakat Kecil dan Masyarakat Sedang. Bentuk pimpinan yang muncul pada masyarakat kecil adalah pimpinan kadangkala dan pimpinan terbatas. Sifat kepemimpinannya spontanitas, muncul kadangkala pada keperluan-keperluan tertentuan nya Sepertipada pembuatan alat terburu, upacara keagamaan, juga pada pertengkaran antar kelompok. Jenis pimpinan ini disebut juga *primus inter pares* (orang pertama di antara yang sama). Kemampuan-kemampuan yang dimiliki seorang pemimpin relatif sama dengan yang dipimpin. Pimpinan kadangkala biasanya terdapat pada masyarakat band kecil (dengan anggota 8-20 orang). Pada masyarakat band besar (dengan anggota 70-100 orang) kepemimpinan sudah bersifat tetap. Artinya, ada seorang pemimpin yang terus menerus memimpin berbagai kepentingan di masyarakat band tersebut, hanya wilayah kewenangannya masih sangat terbatas. Kepemimpinan mulai diturunkan melalui garis keturunan ayah *(patrilineal kinship system)*, walaupun untuk bidang-bidang tertentu masih berlaku juga sistem primus inter pares. Pada masyarakat sedang, yaitu pada masyarakat desa yang sudah menetap, berlaku pimpinan mencakup. Yaitu meliputi lokalitas tertentu, dengan cakupan kewenangan yang sudah meluas dalam berbagai kehidupan masyarakat. Bahkan, pimpinan mencakup ini sudah di "resmi"kan dengan adat tertentu yang ditandai dengan digunakannya simbol-simbol tertentu; seperti senjata, bunyi-bunyian, manik-manik dsb.
2. Kekuasaan dan Kepemimpinan Tradisional dalam Masyarakat Negara-negara Kuno. Dalam masyarakat negara Kuno terdapat bentuk pimpinan pucuk *(paramount chief)*. Biasanya meliputi wilayah lebih dari satu desa. Di Indonesia, pemimpin pucuk di kenal dengan gelar-gelar: sultan, raja, prabu, dsb. Kekuasaannya amat besar. Untuk meyakinkan rakyat akan kekuasaannya, biasanya banyak digunakan simbol-simbol kesaktian dengan legitimasi adat atau agama. Implikasinya, raja menjadi sesuatu yang "maha besar", "maha agung", "maha bersih", tidak setiap orang bisa berhubungan langsung dengannya. Timbulnya cerita-cerita, aturan-aturan, dan kebiasaan-kebiasaan tertentu (yang diciptakan) untuk men-"suci"kan raja. Pada tahap selanjutnya, raja jadi "eksklusif". Selalu dalam istana, berkumpul dengan keluarga, kerabat, dan aparat-aparat pembantunya. Pimpinan pucuk semakin tinggal jauh dari rakyatnya.
3. Kekuasaan dan Kepemimpinan dalam Masyarakat Masa Kini. Kepemimpinan masa kini lebih melihat sang pemimpin pada prestasi. Jadi, yang namanya kewibawaan, kharisma, wewenang, dan kekuatan fisik tidak akan bermakna sama sekali bila tidak didukung oleh prestasi yang memadai (ini secara teoritis). Prestasi ini terutama diukur dari kapabilitas rasional untuk memecahkan soal-soal sosial, ekonomi, politik, keilmuwan; yang akan semakin meningkatkan popularitasnya. Disamping itu, harus didukung oleh sifat-sifat: sesuai dengan keyakinan dan cita-cita sebagian besar masyarakat, memiliki lambang-lambang pemimpin, memiliki ciri-ciri rohaniah yang disegani, mampu mengerahkan massa, memiliki legitimasi melalui prosedur alat atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dalam terminologi Weber, konsep tersebut paralel dengan jenis penguasaan power yang legal-rasional.

PENUTUP

Kekuasaan, lahir sebagai pengabsah (legitimator) pengendalian/pengoperasian sistem pengaturan tersebut. Adapun demokrasi, merupakan salah satu genre saja dari aktivitas mengelola kekuasaan.

Tinjauan historis (Paleo) antropologis menjelaskan kepada kita, bahwa sejak keberadaan manusia di dunia telah mengalami perkembangan tingkat kehidupan (sosial ekonomi) tertentu. Dengan gamblang digambarkan dari jenis mata pencariannya, dan terutama dari bagaimana bentuk dan cara pengaturan hidup bersama (setempat) diaktualisasikan. Dengan perkataan lain, bagaimana bentuk dan cara mengelola kekuasaan itu berkembang. Lebih operasional, hal tersebut dapat kita tilik pada bentuk pimpinan kemasyarakatan yang muncul dalam masyarakat. Bentuk pimpinan masyarakat tersebut bermacam-macam. Satu hal yang sangat mendasar, yang menunjukkan kesamaan adalah, pimpinan masyarakat muncul sebagai "aktor" pengendali sistem pengaturan hidup bersama; atau sebagai pemegang tampuk kekuasaan, lepas dari bagaimana/sejauhmana kualitasnya.

Konsepsi demokrasi "murni" sesungguhnya telah berlangsung sejak manusia merasa butuh adanya suatu sistem pengaturan hidup bersama, ketika manusia berada (hidup) bersama-sama dalam suatu wilayah tertentu. Dengan demikian, hipotes atau asumsi ke tiga pada awal tulisan ini, yaitu bahwa demokrasi merupakan suatu sistem yang *alamiah* dan *manusiawi*, secara antropologis historis, terbukti. Suatu hipotesa yang, hampir senada, telah diajukan Aristoteles 6-5 abad sebelum Masehi.[17] Namun demikian, tidak terjebak dengan pandangan kaum Maksimalis, yang mengacu pandangan Bonald, bahwa tidak pernah ada masyarakat tanpa pemerintahan.[18] Sistem pengaturan hidup bersama tidak identik dengan "pemerintahan." Pemerintahan lebih menunjuk pada "kesempurnaan" atau "ke-lengkap-an" suatu penyelenggaraan hidup bersama. Sedangkan "sistem pengaturan hidup bersama", dalam kenyataannya, bisa sangat bersahaja, jauh dari unsur aparat-aparat pemerintah.

Data etnografis juga menguatkan pendapat yang menyatakan bahwa, politik itu pertama-tama adalah mengenai kompetisi dan berkonfrontasinya kepentingan-kepentingan.[19] Walaupun, data-data itu juga menyiratkan bawah tingkat kompetisi dan konfrontasi mengalami perkembangan sesuai kompleksitas masyarakat. Misalnya pada masyarakat band, kita masih mengenal model pemimpin masyarakat yang *primus inter pares.* Terkesan juga bahwa kadar kompetisi dan konfrontasi sangat rendah, dan cenderung bersifat "vulgar". Dalam kerangka inilah kita dapat menjelaskan gejala-gejala "devian" dalam masyarakat sebagai manifestasi "demokrasi murni" *(pure democracy)*, seperti: peristiwa Srambatan di Solo[20] pemberontakan petani Saya San di Burma Hilir terhadap rezim kolonial Inggris,[21] pemberontakan petani di Baten abad XIX, konsep protes*(pepe)* dalam kerajaan Mataram, gerakan Samin pada permulaan abad XIX di **sekitar Blora,[22] pemberontakan Sultan Hasanuddin terhadap Belanda**

(Maluku, abad XVII) sampai dengan Perang Aceh (abad XIX),[23] pembunuhan raja Arung Pone matinroE re A'denna karena "lancang" *bicara* (sebagai salah satu dari lima unsur sistem kemasyarakatan orang Bugis Makassar) seperti yang termuat dalam lontara "La towa,"[24] juga konsep *jallo* dan *malekha da pureng* sebagai mekanisme protes rakyat terhadap rajanya pada periode abad XV-XVIII (seperti yang tercantum dalam lontara "Wajo")[25], demikian pula konsep demokrasi pada masyarakat Minang seperti yang tersirat dalam pepatah ("Raja alim raja disembah, raja lalim raja disanggah") yang didukung oleh "tokoh" yang terdiri dari "orang yang empat jenis" (ninik-mamak, alim-ulama, cerdik-pandai, dan mantidubalang),[26] serta begitu besarnya pengaruh Hikayat Prang Sabi (1) untuk membangkitkan rakyat Aceh melawan kezaliman Belanda pada abad XIX,[27] dsb. Kesemuanya, oleh Gluckman, di lihat sebagai dinamika ragam hubungan-hubungan politik. Pada gilirannya, upacara-upacara" sebagai pengungkapan konflik, pada waktu yang sama, tertransendentilisasi dengan menegaskan kebersatuan (integrasi) masyarakat.[28]

Konsepsi "demokrasi" (secara etimologis, "rakyat berkuasa"[29]), sesungguhnya, telah terdapat dalam masyarakat-masyarakat bersahaja. Hal tersebut dibuktikan dengan munculnya model-model kepemimpinan masyarakat dan konflik-konflik sebagai mekanisme demokrasi (yang diaktualisasikan dalam bentuk pemberontakan, demonstrasi, dan kekerasan) dalam pandangan dan praktek hidup mereka. Secara mikro, paradigma Antropologi Politik, pendekatan fungsionalisme- genetik-dinamis mampu mengungkap gejala tersebut secara adekuat. Pendekatan fungsionalisme-genetik-dinamis yang dimaksud adalah, pendekatan yang melihat proses perkembangan, evolusi, serta dinamika struktur dan sistem hubungan dalam masyarakat.[30] "Elemen-elemen" yang muncul dalam tiap masyarakat (dalam proses evolusi dinamisnya) berfungsi untuk menjaga keutuhan kesatuan hidup masyarakat, termasuk di dalamnya berbagai bentuk konflik dan konfrontasi.

NOTASI-NOTASI

Jujun S. Suriasumantri, *Ilmu Dalam Perspektif*. Jakarta: Gramedia, 1985, hlm. 14-15.

1. Deliar Noer, *Pengantar Ke Pemikiran Politik*. Jakarta: Rajawali, 1983, hlm. 6.
2. R. Soekmono, *Sejarah Kebudayaan Indonesia 1*. Yogyakarta: Yayasan Kanisius, 1981, hlm 22.
3. Ibid, hlm 21-22.
4. Keterangan lebih detail lihat Koentjaraningrat, *Beberapa Pokok Antropologi Sosial*. Jakarta: Dian Rakyat, 1980, hlm. 38-40.
5. Ibid, hlm 13-14.
6. M. Amien Rais, *Demokrasi Dan Proses Politik*. Jakarta: LP3ES 1986, hlm. ix. Lihat juga Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 1983, hlm. 53-54. Dan Sigid Putranto Kusumowidagdo, "Sistem Pemilihan Umum Universal dan Parokial," dalam *Prisma*, No. 9, September 1981, hlm. 4-5.
7. M. Amien Rais, loc cit. Juga kita temukan dalam Deliar Noer, *Pemikiran Politik Di Negeri Barat*. Jakarta: Rajawali, 1982, hlm. 10-11.
8. Deliar Noer, ibid, hlm. 7-9.
9. Ibid, hlm. 11-12.
10. M. Tolchan Mansoer, *Rakyat Kekuasaan Pemerintaha*. Yogyakarta: Gema, 1981, hlm. 22-25.
11. Koentjaraningrat, op cit, hlm. 7-8.
12. Ibid, hlm. 159.
13. Ibid, hlm. 167.
14. Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan Di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1980, hlm. 304.
15. Koentjaraningrat, op cit, hlm 175.
16. Koentjaraningrat, "Kepemimpinan Dan Kekuasaan: Tradisional, Masa Kini, Resmi dan Tak Resmi," dalam Miriam Budiardjo, *Aneka Pemikiran Tentang Kuasa dan Wibawa*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986, halm. 129-138.
17. Lihat Georges Balandier, *Antropologi Politik* (diterjemahkan oleh Y. Bidusantoso, dengan kata pengantar Parsu Suparlan). Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 28.
18. Balandier, loc cit.
19. Idid, halm. 22
20. Lihat Soeyatno, "Feodalisme dan Revolusi di Surakarta 1945-1950," dalam *Prisma*, No. 7, Agustus 1978, hlm. 49-50.
21. Tentang pemberontakan petani (selain karya monumental Soemarsaid Moertono, State and Statecraft in Old Java dan Sartono Kartodirdjo, The Peasants' Revolt of Bantam in 1888), setidaknya kita temukan juga bahasan James C. Scott, *Moral Ekonomi Petani* (terjemahan Hasan Basri). Jakarta: LP3ES, 1983, hlm. 225-226 dan "Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance" (diresensi) oleh Loekman Soetrisno dengan judul "Perjuangan Petani Gurem Mencari Keadilan"), dalam *Prisma*, No 4, April 1987, hlm. 93-96.
22. Keterangan ini saya dapatkan dari William H. Frederick, et al, *Pemahaman Sejarah Indonesia Sebelum dan Sesudah Revolusi*. Jakarta: LP3ES, 1984, hlm. 241.
23. Penjelasan lebih lengkap dapat di lihat dalam L. Stoddard, *Pasang Naik Kulit Berwarna*. Jakarta: Panitia Penerbit (diketahui oleh Letjen. H.M. Mulyadi Djojomartono), 1966, hlm 279-286.
24. Uraian lebih mendalam kita dapatkan dalam makalah Mappatoeroeng Parawansa, "Pemerintahan Dalam Masyarakat Sulawesi Selatan." Disampaikan di *Lembaga "LAGALIGOLOGI"* Ikami Sul-Sel Cabang Yogyakarta, pada tanggal 29 Agustus 1985. Selain ini kita dapatkan juga dari tulisan Mattulada, "Kebudayaan Bugis-Makassar," dalam Koentjaraningrat, *Manusia Dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1980, hlm. 270-272.
25. Uraian secara mendalam lihat makalah Hamid Abdullah, "Pandangan Hidup Dan Kepemimpinan Manusia Bugis-Makassar." Disampaikan di *Lembaga "LAGALIGOLOGI"* Ikami Sul-Sel Cabang Yogyakarta, pada tgl. 29 Agustus 1985.
26. Uraian selengkapnya lihat Mochtar Naim, "Minangkabau Dalam Dialektika Kebudayaan Nusantara." Kertas Kerja dalam *Seminar Internasional Mengenai Kesusastraan, Kemasyarakatan dan Kebudayaan Mingkabau*. Bukittinggi, 28 Agustus 1980.
27. Lihat uraian UU. Hamidy, "Peranan Cerita Rakyat dalam Masyarakat Aceh," dalam Alfian (ed), *Segi-segi Sosial Budaya Masyarakat Aceh*. Jakarta: LP3ES, 1977, hlm. 23-32, 39-44.
28. Balandier, op cit, hlm. 22-23.
29. Miriam Budiardjo, 1983, op cit, hlm. 50
30. Balandier, op cit, hlm. 16-25.

ALBUM BALAIRUNG

— Selamat atas diwisudanya **Eddy Heraldy,** Redaksi BALAIRUNG sebagai sarjana FMIPA UGM Jurusan Kimia, 19 Mei 1987.

— Ikut berduka cita atas meninggalnya Bapak **Umar Imam Said,** ayah dari **Afnan Malay,** reporter BALAIRUNG, 30 Juli 1987. Semoga arwahnya mendapat tempat yang baik di sisi Allah SWT.

Birokrasi Dan Politik di Indonesia

oleh:
Frans Maniagasi

Dalam berbagai studi tentang birokrasi di Indonesia yang pernah dilakukan para ahli **(Sutherland, Van Niel, Castles, Vroom)** terlihat adanya kecenderungan untuk menganggap birokrasi di Indonesia sebagai suatu bentuk campuran antara dua model birokrasi yang dikonsepkan oleh **Max Weber** yaitu birokrasi yang legal rasional dengan birokrasi yang patrimonial.

Menurut **Max Weber,** birokrasi bersifat patrimonial apabila jabatan dan perilaku dalam keseluruhan hirarki birokrasi lebih didasarkan pada hubungan kekeluargaan, hubungan pribadi, hubungan "bapak — anak buah" (patronklien). Sebaliknya, birokrasi bersifat legal — rasional apabila ia bersikap netral, obyektif dan rasional dalam melaksanakan angan-angannya dan terikat kepada konstitusi.

Seperti yang diuraikan **Weber,** karena proses pertumbuhan *(growth)* dan perkembangan *(development),* birokrasi pemerintah di negara-negara Barat bersifat sangat formal dan legalistis, yakni sebagai aparat negara yang loyal terhadap konstitusi dan konvensi. Dengan penataan secara sistematis secara terus-menerus dan konvensi. Dengan penataan secara terus-menerus dan sistematis, maka ia muncul sebagai "Civil Service" yang profesional serta yang semakin menjauhkan diri dari campur tangan politik, demi efisiensi dan kemampuan yang semakin tinggi.

Sampai pada batas-batas tertentu tipologi yang dibuat Weber itu memang bisa digunakan untuk memahami perkembangan birokrasi di Indonesia, namun saat ini nampaknya tipologi itu sudah kurang memadai lagi untuk menjelaskan fenomena birokrasi di Indonesia. Lebih-lebih dalam kerangka dimana peranan birokrasi itu dirasakan sudah begitu meluas, melampui fungsi-fungsinya yang lazim dikenal selama ini.

Munculnya konsep-konsep seperti *modernizing bireaucratic state* **(Soedjatmoko),** *bureacratic satate* **(Robinson)** dan beberapa konsep baru lainnya, nampaknya telah menandai adanya pergeseran pendekatan dalam studi-studi mengenai birokrasi dewasa ini.

Studi-studi tentang birokrasi dewasa ini, khususnya di Negara-negara dunia ketiga atau negara-negara pasca Kolonial *(post Colonia State)* tidak lagi didasarkan pada konsep-konsep klasik ala **Weber** melainkan pada konsep-konsep baru yang berkaitan dengan *state formation* dan *social formation* **(Hamzah Alavi).** Konsep-konsep terakhir inilah yang kini di anggap lebih mampu menjelaskan fenomena besarnya atau meluasnya peranan birokrasi di negara-negara Dunia Ketiga, di mana birokrasi tidak lagi sekedar menjalankan fungsi-fungsi teknis penyelenggaraan administrasi pemerintahan melainkan telah pula melaksanakan fungsi-fungsi ekonomi dan terutama politik.

Sejauh mana konsep-konsep itu cukup valid, tentu masih bisa di perdebatkan atau di uji dengan kenyataan empiris. Namun demikian suatu pemahaman yang memadai terhadap fenomena birokrasi di Indonesia tidak akan di peroleh bila hanya mendasarkan diri pada konsep-konsep teoritis saja tanpa melakukan suatu analisis yang lebih kontekstual dalam arti menempatkannya dalam suatu perspektif historis yang melacak asal mula serta sejarah perkembangan birokrasi di Indonesia.

Maka disini telaah terhadap birokrasi akan dimulai dengan suatu tinjauan historis untuk melihat saat awal diperkenalkannya birokrasi dalam pengertian modern di Indonesia dan perkembangannya dewasa ini.

Sejarah ringkas perkembangan birokrasi di Indonesia

Birokrasi dalam arti modern mulai di perkenalkan pertama kali di Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda menjelang akhir abad ke 18 dan awal abad ke 20, sebagai bagian dari usaha untuk melancarkan roda pemerintahan atas wilayah Hindia-Belanda. Untuk memperkuat jaringan birokrasi pemerintahannya, maka selain *Binnenlandsch Bestuur (BB)* yaitu aparat birokrasi yang terdiri dari orang Belanda sendiri, juga dibentuk aparat birokrasi yang berasal dari kalangan priyayi Indonesia yaitu Pangreh Praja (PP). Hal ini sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda yang menerapkan sistem pemerintahan langsung *(direct rule)* dan tidak langsung *(indirect rule).*

Sesuai kebijaksanaan ini, maka selain daerah-daerah yang berada langsung dibawah pengawasan dan pengelolaan aparat birokrasi Belanda, juga ada daerah-daerah swapraja yang memiliki sedikit otonomi dibawah kekuasaan para sultan atau bupati tetapi tetap dibawah kontrol aparat birokrasi Belanda. Dengan demikian sejak semula telah terjadi pembauran dua sistem birokasi, antara birokrasi modern dan birokrasi tradisional, an-

tara yang bersifat legal rasional dengan yang bersifat patrimonial.

Bagi sebagian ahli, pola birokrasi campuran seperti itu masih terus menampakkan dirinya hingga saat ini dimana birokrasi itu secara formal telah menampakkan dirinya sebagai birokrasi modern namun dalam praktek atau perilakunya masih diwarnai oleh unsur-unsur tradisional patrimonial. Salah satu unsur budaya tradisional yang dianggap paling berpengaruh dalam model birokrasi campuran seperti itu ialah unsur budaya Jawa sebagaimana tercermin dalam hubungan patron-clien dalam pola pengambilan keputusan, prestise dalam birokrasi, sikap "rikuh" dan lain-lain ; **Bintoro Tjokroamidjojo**: 1985). Bahkan **Karl D. Jackson** menilai birokrasi di Indonesia dewasa ini sebagai "a particular type of political system called bureacratic polity" (Jackson: 1978)

Ketika kemerdekaan diperoleh tahun 1945, untuk lima tahun pertama (1945-1950) birokrasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai aparat pelaksana administrasi pemerintahan karena adanya suasana revolusi waktu itu. Barulah ketika kedaulatan Indonesia pulih pada akhir tahun 1949 yang disusul dengan perubahan dari bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) menjadi bentuk negara Kesatuan, birokrasi pemerintah mulai di tata kembali mendekati fungsi-fungsinya yang semestinya.

Tetapi perkembangan politik dalam negeri yang berlangsung sesudah itu menggiring kembali birokrasi pemerintah ke dalam suatu situasi di mana birokrasi mengalami kadar peristiwa yang tinggi. Korps pegawai negeri ikut berkotak-kotak dalam berbagai aliran politik waktu itu, sementara fungsi-fungsi administratif dan kadar profesionalitasnya menjadi merosot.

Pada akhir tahun 1950-an Presiden Soeharto mencoba mengembalikan birokrasi pemerintah pada fungsi-fungsinya yang sebenarnya dengan mengurangi keterlibatannya dalam politik melalui pengangkatan **Ir. Djuanda** sebagai Perdana Menteri dalam suatu kabinet yang disebut sebagai "Kabinet Karya". Namun usaha ini ternyata tidak memberikan hasil yang diharapkan, antara lain karena situasi pertarungan politik masa-masa sebelumnya yang belum juga selesai malah semakin mengeras hingga mencapai puncaknya pada "Peristiwa G.30 S/PKI" bulan September/Oktober 1965.

Negara Birokrasi-Modernis

Ketika pemerintah Orde Baru mengambil alih kekuasaan sesudah peristiwa tersebut, maka nampak ada itikad untuk mulai menata kembali atau mengembalikan birokrasi pemerintah kepada fungsi-fungsi yang sebenarnya sebagai penyelenggara administrasi pemerintahan.

Tahap awal dilakukan dengan "membersihkan" birokrasi pemerintahan dari sisa-sisa pengaruh partai dan berbagai aliran politik, membina suatu korps pegawai negeri yang profesional dan a-politik (dengan prinsip monoloyalitas).

Namun kesan awal itu nampaknya kini berangsur-angsur mulai berubah, sejalan dengan perubahan-perubahan yang telah memberikan karakteristik baru terhadap birokrasi yang ada dewasa ini. Salah satu perubahan yang jelas nampak ialah bahwa birokrasi di Indonesia dua darsa warsa terakhir sebagai instrumen tekhnis penyelenggaraan administrasi pemerintahan semata-mata, melainkan telah pula menjadi kekuatan yang sangat besar peranannya dirasakan dalam berbagai sektor kehidupan negara dan masyarakat. Birokrasi kini berperanan di dalam bidang kehidupan ekonomi, di dalam kehidupan sosial dan bahkan kebudayaan.

Masyarakat dan negara yang di tata secara ketat oleh birokrat inilah yang oleh Sudjatmoko di sebut sebagai "negara birokratis modernis" *(modernizing Bureaucratic state)*, dengan segala kelebihan dan kekurangannya.

Segi segi prositif dari negara birokratis modernis seperti ini sudah sering dikemukakan, khususnya segi segi positif dalam menunjang pelaksanaan program-program pemerintah di berbagai bidang pembangunan. Ia menjadi sarana efektif untuk menjalankan atau menggerakkan proses modernisasi sebagaimana yang dibayangkan pemerintah.

Birokrasi juga dirasakan mempunyai fungsi positif dalam upaya pengintegrasian masyarakat yang terdiri dari berbagai latar-belakang etnis, ras, agama dan orientasi politik yang berbeda-beda. Atau dengan kata lain birokrasi dalam konteks seperti ini mampu mengatasi berbagai loyalitas primordial dalam masyarakat, yang dahulu pernah menjadi sumber pertikaian sehingga mengancam integrasi atau kesatuan bangsa.

Namun, semua segi positif itu sesungguhnya hanya terlihat dalam kerangka makro. Dari segi mikro, peranan birokrasi yang begitu dominan dalam negara birokratis modernis ialah kecenderungan untuk melakukan penyeragaman dalam masyarakat dan mengabaikan pluralitas, dan bersamaan dengan itu membuat sebagian besar masyarakat menjadi marginal atau sangat tergantung kepada birokrasi. Proses ini pada gilirannya akan membuat masyarakat kehilangan kreativitas, kehilangan kemandiriannya yang justru sangat dibutuhkan bila hendak melibatkan mereka dalam proses pembangunan atau modernisasi.

Ada sisi lain lagi dari praktek penyelenggaraan birokrasi dalam negara birokratis-modernis yang perlu diperhatikan. Negara seperti ini, karena mengidap kekakuan formalisme di dalam sistemnya, sering cenderung menemui kesulitan untuk mengelola transformasi sosial yang cepat dalam proses pembangunan yang sekaligus mampu memelihara perimbangan antara perubahan, ketertiban dan kedilan dengan cara-cara yang dapat memperkokoh kebebasan individu dalam masyarakat.

Birokrasi memang mengacu pada efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas-tugasnya, namun seringkali mengabaikan kontradiksi intern (yang memang sah) antara efisiensi/efektivitas pada satu pihak dengan kebebasan dan keadilan sosial pada pihak lain, suatu dikotomi penting dalam masyarakat dualistik yang kedudukan dan peranan ekonominya tidak terbagi rata.

Dengan kata lain, birokrasi dalam wajah seperti itu mengabaikan kepentingan kalangan masyarakat yang kedudukan sosial dan ekonominya lemah, kaum yang tercecer di tengah gegap gempita proses pembangunan dan modernisasi yang tengah digandrungi dewasa ini.

(Frans Maniagasi)
Jurusan Ilmu Pemerintahan
FISIPOL UGM Yogyakarta.

tanah harapan RAKYAT

Dalam pertumbuhan penduduk dunia yang demikian pesat dan tak terelakkan itu, oleh **Robert Malthus** diibaratkan sebagai *deret Geometri,* yang cara menghitungnya dengan sistim kelipatan angka tertentu. Sehingga dalam beberapa lipatan saja jumlahnya dapat mencapai sekian puluh kali, bahkan bisa ratusan kali dari jumlah semula. Misalnya; dari 2 menjadi 4,4 menjadi 8 dan selanjutnya berubah menjadi 16, seterusnya 32,64.

Sedangkan perumpamaan yang lain adalah untuk berkembangan produksi bahan pangan yang makin lama makin sempit arealnya itu sebagai *deret Aritmetika* yang dihitung dengan cara penjumlahan. Dari bilangan 1 jadi 2,3,4,5,6 dan seterusnya; atau setidak-tidaknya dari 1 menjadi 3, lalu 5,7, 9,11.

Dapat kita bayangkan seberapa perbedaan jumlah dari kedua deret Matematika tersebut. Contoh dari kebenaran teori ini ditunjukkan dengan adanya beberapa kali terjadi bencana kelaparan di banyak bagian dunia, misalnya *Ethiopia* yang sedang dilanda perang saudara. Sehingga perhatian terhadap usaha memproduksi kebutuhan pangannya sangat kurang. Ditambah lagi oleh karakteristik dari lahannya yang kurang menguntungkan untuk ditanami tanpa menggunakan sistem baru.
Bahkan di Kabupaten *Ende,* Flores, NTT, tahun lalu diperhitungan telah mengalami defisit bahan pangan sekitar 11 ribu ton *(Kompas, 15 Januari 1987).*

Dari tahun ke tahun produk domestik untuk sektor pertanian tercatat mengalami penurunan. Tahun 1971 posisinya 43,6% dari seluruh produk Nasional. Lalu tahun 1975, yakni 4 tahun berikutnya, merosot menjadi 36,8%. Akhirnya dalam jangka waktu 10 tahun atau tepatnya di tahun 1985 nilainya jatuh lagi, meskipun tidak terlalu tajam, menjadi 28,1% saja. Adapun faktor yang turut mempengaruhi turunnya produksi pertanian meliputi sektor jasa angkutan, perdagangan, industri besar dan industri rakyat, industri bahan bangunan, pengelolaan *Real-estate* yang bagaikan jamur, maupun sektor lainnya seperti kebutuhan pendidikan kesehatan.

Padahal bukankah dari Pelita ke Pelita, produksi pertanian tanaman pangan sangat diprioritaskan. Repelita I, dititikberatkan pada sektor pertanian dan industri untuk mendukung perta-

nian. Repelita II, pertanian diutamakan bagi peningkatan industri yang mengolah bahan mentah menjadi bahan baku. Sedangkan Repelita III, lebih meningkat lagi, usaha pertanian menuju swasembada pangan dan peningkatan industri yang mengolah bahan baku menjadi bahan jadi. Dan sekarang yang sedang berlangsung adalah Pelita IV. Sektor pertanian tetap menjadi tumpuan agar tetap berswasembada pangan, di samping guna menunjang sektor perindustrian. Keempat Repelita tetap mengutamakan usaha pertanian. Hal ini sudah jelas mengingat bahwa negara Indonesia termasuk negara Agraris dengan 80% wilayah daratannya dipakai untuk usaha pertanian.

Oleh karena akan sangat riskan bila angka 80 itu tiap tahunnya dikebiri tanpa melihat semakin meningkatnya kebutuhan pangan kita. Untuk itu *Balairung* mencoba mengorek, sudah seberapa jauh pengalihan fungsi tanah pertanian ke sektor produksi yang lain yang tentu saja bagi pemilik tanah dipandang lebih menguntungkan. Bahan-bahan dikumpulkan oleh **Afnan Malay, Hananto Kusumo, Agus Saliman Jamil** dan **Bani Saksono** yang sekaligus merangkumnya.

Kalau kita berpaling ke Amerika Serikat, dari hasil laporan *The Worldwatch Institute*, suatu lembaga yang berkecimpung dalam masalah lingkungan, melaporkan bahwa telah banyak daerah yang sebenarnya kaya akan lapisan tanah atas yang subur, atau lebih dikenal dengan istilah *top soil*, mengalami pengikisan. Pengikisan dapat terjadi oleh tiupan angin yang kencang, banjir maupun oleh penggunaan peralatan mekanis, seperti mesin pembajak. Dilaporkan juga bahwa di AS, tanah pertaniannya mengalami pengikisan *top soil* 44 %, melampaui laju peremajaannya. Di India menunjukkan 60 %. Kemudian di Afrika Barat berkurangnya kadar *top soil* dalam tanah lebih banyak disebabkan oleh kesalahan mengolah tanah. Akibatnya, produksi jagung berkurang sekitar 50 % dan untuk jenis polong-polongan merosot 40 %. Padahal proses peremajaan *top soil* setebal 2,5 cm saja membutuhkan waktu 300 tahun.

Semakin banyaknya persaingan ekonomi di masyarakat, telah menyebabkan orang menjadi berpikir dua kali lebih jauh, baik secara sendiri maupun berkelompok, untuk mendapatkan penghasilan yang cukup. Beragamnya lapangan pekerjaan yang diidentikkan dengan perkembangan arus informasi dan jaringan teknologi memancing kecenderungan orang untuk mencari pekerjaan yang cepat menghasilkan uang tanpa mengandung resiko yang besar. Contohnya, di pinggiran kota Yogyakarta umpamanya, beberapa areal sawah mulai lenyap berganti dengan munculnya *galengan* (petak-petak) perumahan. Lenyapnya lahan pertanian dan bertebarannya rumah-rumah baru berbanding lurus dengan *urban employment* dan *rural employment* yang selalu berubah sepanjang tahunnya. Dan urgensi masyarakat akan naik drastis.

Kalau bukan menjadi areal perumahan, bisa juga tanah-tanah subur itu menjadi daerah penambangan tanah liat untuk keperluan bahan bangunan, seperti genteng dan batu bata. Yang dapat kita rasakan adalah betapa akan menjadi mandul tanah-tanah itu, sehingga akan menjadi terisolir bagi usaha pertanian.

Produksi bahan bangunan tersebut menjadi amat cerahnya karena pembangunan perumahan grafiknya selalu naik. Alasan inipun juga didukung oleh **Prof.Dr.Ir. RM. Tejoyuwono Notohadiprawiro,** dalam wawancara khusus dengan *Balairung* di *Laporatorium Pedologi* Fakultas Pertanian UGM di kampus *Kuningan*, begitu juga Ny. Achmad Maulana, pemilik UD (usaha dagang) Material (Angkutan mengaku demikian. Apalagi bagi mereka yang tanahnya sempit, sehingga hasil dari bercocok tanam sangat jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan usaha pembuatan batu bata, atau kerajinan tanah liat seperti yang di *Kasongan* itu.

WALUYO TS

Tejoyuwono

Bukan itu saja, di kawasan *Purworejo* dan *Kutoarjo* para petani jelas sudah berhitung dengan teliti untuk mengubah sawah dengan kebun jeruk. Karena dianggap bertanam jeruk itu lebih berhari tua baik dan sedang melonjak pasarannya.

Akan tetapi sejauh mana kekhawatiran **Solichin GP** terhadap ancaman swasembada beras nasional dan pengakuan Menteri Muda Urusan Produksi Tanaman Pangan **Ir. Wardoyo,** cukup beralasan. Sehingga dengan peringatan tersebut, kita, agar bisa mencapai kondisi seimbang, syukur bisa surplus, harus meningkat produksi beras tiap tahun setidak-tidaknya 2,4 persen.

Maka usaha-usaha pemerintah menghadapi bahaya tersebut dan agar para petani tidak mengalihkan profesinya, antara lain dengan melalui program *Bimas*, *Inmas* dan *Supra Insus*. *Supra Insus* (Supra Intensifikasi Khusus) adalah *"rekayasa sosial dan ekonomi terhadap penyelenggaraan intensifikasi pertanian dengan menerapkan pola kerjasama klomtan (kelompok tani) antar insus serta memakai teknologi canggih."*

Untuk Indonesia, dalam musim tanam tahun 1987 ini *Supra insus* diulurkan bagi 4 Kabupaten di Jawa Barat, yaitu Krawang, Bekasi, Tangerang dan Inderamayu; serta 1 Kabupaten di propinsi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Karena kebetulan yang di Jawa Barat, letaknya semua di pantai utara, nama proyeknya dinamakan *Opsus Jalur Pantura* (Pantai Utara).

Tetapi yang sedang menjadi masalah para petani, adalah pelayanan KUD (Koperasi Unit Desa) sendiri yang tak beres. Akibatnya banyak petani yang selalu dirugikan.

Melihat kerawanan pangan ter-

WALUYO TS

Moeslich Z.A.

sebut, *Koesnadi Hardjasoemantri, 1986*, berpendapat, produksi pertanian tak mungkin ditingkatkan dengan pesat tanpa menggunakan pupuk, pestisida untuk mengusir hama, pemakaian bibit varietas unggul dan disertai sistem pengairan yang baik dan lancar. Meskipun keempat cara itu masih menimbulkan dampak bagi lingkungan sekitarnya. Dan tanah sebagai obyek bertani, pada akhirnya memerlukan penanganan dan pemeliharaan yang lebih istimewa.

Mutu Tanah

Mengenai keberadaan tanah-tanah subur yang baik untuk bercocok-tanam, **Prof.Dr.Ir. Tejoyuwono N** mengatakan pada *Balairung*, bahwa nampaknya sulit menentukan di mana sajakah tanah subur itu berada. Struktur tanah mempunyai kriteria tersendiri. Yang dapat kita lihat, menurut **Prof. Tejoyuwono, top soil** ada yang merata dari lapis atas sampai lapis bawah, istilahnya *seragam baik*. Kedalamannya dapat mencapai 3-4 meter, masih bisa dan layak ditanami. Kelompok ini biasanya terdapat di sepanjang pinggiran sungai dan pantai, berasal dari *abu vulkan* dan tanah-tanah *alluvial*. Kebanyakan berwarna gelap atau tua. Tanah subur itu disebut juga tanah muda.

Sementara itu ada yang *beragam jelek*, ungkap **Tejoyuwono.** Tanah jelek itu bisa sedalam 10 meter dari permukaan. Contohnya, banyak dialami oleh para transmigran. "Dasar tanah jelek, meskipun dibuka dengan tangan manusia — yang hanya mampu mengeduk beberapa centimeter saja — juga tetap jelek. Apalagi kalau tangan-tangan mesin yang berkemampuan tinggi.
Dengan demikian, simpulnya, untuk menentukan apakah tanah itu baik atau jelek dapat pula dilihat dari peristiwa dan waktu pembentukan tanah.

Lahan subur yang dimanfaatkan untuk membuat Bata.

Gambaran lain yang diberikan kepada *Balairung*, tanah subur dapat dilihat dari warnanya yang gelap dan tua. Akan tetapi tidak selalu warna tua itu subur. Biasanya, tanah berwarna gelap itu lebih banyak mengandung bahan-bahan organik, yaitu zat kimia alamiah yang menyebabkan tanaman bisa subur. Oleh karena itu, tanah-tanah gelap tetapi tua usianya, seperti di daerah Wates, Wonosari, Sragen dan Mantingan kurang subur.

Adapun cara memperbaiki mutu tanah dari akibat kerusakan pengolahan, pemakaian pupuk yang berlebihan serta meningkatkan kemampuan menyuburkan tanaman, yang sudah biasa dikenal petani adalah dengan pemupukan. Ada pupuk buatan dan pupuk alami. Tetapi **Tejo** memberikan cara pemupukan yang terbaik. Yaitu dengan pupuk organik, seperti kompos atau limbah tanaman dan kotoran hewan ternak. Untuk itu para petani jelas dituntut untuk juga memelihara ternak, meskipun dalam jumlah yang sedikit. Kemudian, "jerami", kata Tejo, tetapi buru-buru ditambah lagi komentarnya "jerami mempunyai *nilai lain*!". Yaitu untuk makanan ternak maupun dapat untuk membantu membakar batu bata atau genteng dan gerabah.

Oleh kelangkaan mendapatkan pupuk organik, para petani beralih ke pupuk buatan, pupuk pabrik, jenis *urea* maupun *Posfat*. Peran dari pupuk buatan ini hanya satu sisi saja, kalau urea misalnya hanya dapat memberi hidrogen dan tak punya pengaruh apa-apa sesudah kandungan hidrogennya terserap habis.

Prospek usaha pemupukan yang lain, yang lebih baik? **Prof. Tejoyuwono** yang beberapa mahasiswanya mengatakan sulit menemuinya, memberikan alternatif, "mungkin kita dapat menggunakan jazat renik untuk menyuburkan tanah. Caranya dengan menanam polong-polongan, atau disebut pupuk hidup, yang hidup bersimbiosis dengan bakteri Rizobium supaya mampu menangkap Nitrogen di udara lalu diisap ke tanah". Itu memang ada baiknya dan ini merupakan sistem terapan yang menurutnya disebut *Bioteknologi*. Cara di atas ternyata tak segampang yang kita bayangkan. Sebab kita harus menanam polong-polongan dan padi sebagai tanaman pokok secara bergantian. Dan rotasi itu akan efektif serta menghasilkan bila petani memiliki sawah yang cukup luas.

Kelemahan UUPA

Dalam pasal 14 UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria) mewajibkan tiap orang untuk memelihara tanahnya. Lalu mengusahakan alokasi lahan dengan sebaik-baiknya supaya memenuhi syarat kesesuaian lahan dan bentuk penggunaannya. Sedangkan dalam pasal 15 UUPA, mewajibkan kepada setiap orang untuk memelihara agar tanahnya tidak rusak dan merosot hasilnya. Tetapi satu kelemahan ditemukan **Prof.Dr. Tejoyuwono N** dalam aturan perundang-undangan kita. Sampai sekarang belum ada peraturan pelaksanaannya.
UUPA, itu berisi pedoman pokoknya. Oleh karenanya harus diikuti peraturan yang lebih rendah tingkatnya yang berisi aturan pelaksanaan dan penjabarannya. "Ini yang kita belum punya," katanya. Yang berkaitan dengan masalah di atas, misalnya tentang peraturan penggunaan lahan yakni UU Tata Guna Lahan juga belum ada. Sehingga orang tak dapat berbuat banyak bila petani menggunakan

lahannya untuk kepentingan yang lain. Bahkan, menurut **Moeslich Zaenal Asyikin** yang sedang menggarap proyek tambak udang di Jateng juga menyayangkan kenapa, tanah persawahan di daerah Timoho, Umbulharjo yang terkenal sangat baik sistem pengairannya dan subur tanahnya, kini banyak yang lepas terjual untuk perumahan kelas menengah ke atas.

Ketika ditanya apakah untuk pembangunan Perumus sudah memperhatikan segi-segi kelestarian lingkungan dan lahan pertanian, karena biasanya Perumnas didirikan di areal pertanian, mahasiswa Teknik Sipil UGM itu menjawab, bahwa khusus untuk Perumnas, "yang saya lihat, sudah memperhatikan atau diarahkan ke bagian yang tidak subur. Jadi rencana pemerintah untuk pembangunan Perumnas sudah cukup baik".

Tentang tidak beresnya aparat roeslish memberi contoh, mengenai lolosnya ijin seperti Toko Gardena di jalan Oerip Somoharjo yang *nablek* sungai, demikian juga kasus toko Valentino, hal ini tergantung bagaimana kebijaksanaan *'aparat'* pemerintah mengawal Undang-Undang. Biasanya, yang sering nakal malah pengusaha real-estate, ujar Moeslich ZA lagi.

Usulan Kampus

Bagi kelompok intelektual kampus, usaha memberikan input (masukan) bagi pelaksanaan peraturan perundang-undangan ke pemerintah "sudah tak kurang-kurang dalam setiap seminar atau kesempatan lain," ujar **Prof. Tejoyuwono.** Bahkan belum lama ini **Prof. Iman Sutignyo** dari Fakultas Pertanian juga telah menyampaikan rancangan usulan Undang-Undang Tata Guna Lahan kepada pemerintah. Tetapi bagi seorang **Moeslich ZA** yang pengusaha itu, sementara yang bisa dilakukannya adalah menawarkan hasil karyanya sebaik-baiknya. Sebab, Moeslich yakin bahwa konsumen sekarang ini telah mulai memiliki ketajaman dalam memilih sesuatu yang terbaik; rajin, ekonomis, efisien dan efektivitasnya tinggi, dan murah.

Satu contoh yang diberikan **Moeslich** adalah bagaimana para teknisi kita berpikir dan merencanakan sesuatu dengan tidak melihat segi-segi efisien atau hemat tapi kuat. Misalnya dalam membuat bangunan. Konstruksinya sering terlampau *aman*, dengan kata lain dibuat terlalu berlebihan dan memboroskan, sebab yang dilihat semata-mata hanya pada nilai mata uangnya saja.

"Yang sudah diterapkan," kata **Moeslich** lagi, "maka sekarang sudah kami ganti dengan genteng semen yang beratnya berkisar 3-4 kg per biji. Bila dibandingkan dengan genteng tanah liat biasa, dalam satu meternya genteng biasa memuat 25 biji, sedang untuk genteng semen cukup 9 biji saja. Dan *ragangan* untuk atapnya tetap dalam batas aman."

Contoh lain perancangan yang 'ngawur' adalah proyek tambak udang di Jateng, kepadatan tanah untuk tanggulnya diperkirakan 90%. Padahal, menurut Moeslich yang juga bekerja di sana memperkirakan bahwa kepadatan 90% itu sama persis dengan standar Cibinong (waduk). Sedangkan di tambak udang itu yang lalu lalang paling-paling hanya sepeda motor saja.

WALUYO TS

Pindah profesi

Masalah *pemasaran* bagi para petani, dewasa ini menjadi kendala yangbesar. Misalnya KUD, bercita-cita menghimpun petani kecil agar mampu bersaing dengan pedagang-pedagang besar, sehingga dengan KUD itu petani diharapkan mampu berbicara dipercaturan perekonomian. Tetapi, **Prof. Tejoyuwono** bercerita kepada Balairung, barangkali KUD yang benar-benar sampai pada taraf itu jumlahnya mungkin hanya satu dua. Yang kebanyakan dari KUD itu, lebih banyak menyakitkan petani dari pada menyenangkan. Sehingga kalau kita bertanya pada petani tebu di Kutoarjo, "enak mana menjual tebu lewat KUD atau sendiri?". Pasti jawab mereka, *Balairung* menirukan ucapan **Prof. Tejo,** "wah enak dijual sendiri, pak". Tetapi di pihak yang mempunyai proyek, pak Tejo berkomentar, "Justru petanilah yang belum kompak. Juga ketika saya ke Sumatra Utara, yaitu ke perkebunan kelapa sawit Para administratur kebun banyak mengeluh dan mengatakan bahwa 'Dewan' (maksudnya untuk menyebut yang berkuasa dalam perusahaan perkebunan itu) tidak becus 'ngurus' kebun. Melihat itu, maka orang pemerintah membuat gagasan, lebih baik semua perkebunan di-Diperta-kan alias di-BUMN-kan."

Bahkan di Jawa Barat pun telah kedapatan 235 KUD dari 312 yang tidak beres. Dan kebanyakan justru personal KUD-lah yang paling sering melakukan 'kecurangan' sehingga banyak petani yang mengeluh. Sehingga akhirnya pemerintahpun menganggap lebih baik mengulurkan bantuan kredit untuk program Supra Insus justru kepada kelompok tani, tidak kepada KUD.

Pada kenyataan dari makin sempitnya lahan pertanian yang dialihkan menjadi perusahaan batu bata merah, oleh **Tejoyuwono Notohadiprawiro,** kepala Laboratorium Pedologi Fak. Pertanian UGM, tetap dianggap tidak mengkawatirkan kondisi kesuburan tanahnya. Namun yang disorotnya justru pada betapa banyaknya cekungan-cekungan buatan sehingga akan mengganggu peredaran air tanah. "Harusnya ini yang dipermasalahkan orang, apalagi jumlah lahan yang dapat dipakai untuk pertanian di negara kita masih sangatlah jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah pengusaha batu bata merah dan genteng," ujar **Prof. Tejo** menutup pembicaraan.

Dan bukankah untuk menggantikan batu bata merah, telah diperkenalkan genteng semen dan batako, yang menurut catatan harganya tidak begitu banyak berbeda.

Permasalahan lainnya adalah bagaimana mendidik para pengelola KUD agar dapat bekerja dengan 'intens' sehingga bisa melegakan hati petani. Sehingga pula para petani tidak tergiur untuk menjual tanahnya per meter kubik atau permeter persegi. **(Bal)**

SENI BUDAYA

WALUYO TS

tukang becak dan televisi

Harga sebuah televisi (TV) tak bisa dikatakan murah. Tetapi TV merupakan media massayang paling mudah diterima massa. TV merupakan media **audio - visual.** *Dia bisa dinikmati dengan telinga saja, mata saja, ataupun telingadan mata saja. Nah, TV bisa pula dinikmati oleh yang tuli, buta huruf ataupun buta sungguhan. Kini siaran TV hampir menjangkau 2/3 penduduk Indonesia. Akhir Pelita yang lalu 65% penduduk negeri ini telah terjangkau siaran televisi. Sebaliknya TV mampu dijangkau dan dinikmati oleh seorang pemilik rumah yang berisi puluhan TV hingga puluhan orang tuna wisma dengan menikmati sebuah TV milik kecamatan.*

Balairung *melalui* **Erlen Wen Werry, Waluyo TS, Kartika Rini** *dan* **Arif Santosa** *berusaha mencari data sejauh mana TV dimanfaatkan dan acara-acara apa yang menarik atau sebaliknya untuk ditonton. Pengamatan ini hanya berusaha mengetahui* **interest** *penonton terhadap acara TV yang diputar setiap malam. Kali ini yang berusaha ditanyai adalah para tukang becak, penjual keliling, satpam, pengecer koran, dan beberapa responden yang dinilai mewakili kaum yang berfikir seribu kali untuk membeli sebuah TV 12 inci hitam putih. Apakah TV merembes dalam ciri mereka yang tinggal di Yogyakarta?* — **Ahmad Rapanie,** *berusaha menyajikannya.*

Hanya 15 responden yang ditanyai.. 7 di antaranya menjawab *tentu 1-3 kali* (1-3 malam siaran) menonton TV dalam satu minggu. Lima orang menjawab *tidak tentu* tetapi *di atas 3 kali.* Hanya seorang (ibu rumah tangga) yang menjawab *satu kali,* dan dua lainnya *di atas 5 kali.*

Seorang yang menjawab *satu kali* adalah istri seorang buruh, sehari-hari bekerja sebagai ibu rumah tangga. Mereka yang menjawab *di atas 5 kali* adalah dua orang pria masing-masing berusia 20 dan 50 tahun. Seorang sebagai pedagang kecil, seorang lainnya tak jelas apa pekerjaan tetapnya.

Para responden nyatanya lebih menyukai menonton pada malam hari. 5 orang mempunyai kebiasaan di atas pk. 19.00, 7 orang di atas pk. 21.00. Hanya satu orang di bawah pk. 19.00. Seorang lagi yakni seorang bapak berusia sekitar 45 tahun, mempunyai kebiasaan menonton sekitar 17.30. seusai bekerja (sebagai tukang becak), katanya. Bapak ini mengaku menyukai acara *Berita Daerah.*

Acara

Paimin (tak diketahui namanya), 40, tukang becak, *kethoprak* sebagai acara kesukaannya. Pernyataannya didukung 7 responden lain. Tetapi, *Drama* adalah acara yang paling *tidak* ia sukai. Apakah lantaran ketoprak merupakan kesenian tradisional dan drama bukan, sehingga Paimin lebih memilih ketoprak? Mungkin bukan, melainkan ketoprak mereka rasakan lebih bisa mengajak untuk berkomunikasi. **Parjo,** seorang satpam, juga amat suka ketoprak, ternyata menyebut *tari jawa* sebagai acara TV yang *paling tidak disukainya.*

Para responden yang menyukai ketoprak ini umumnya memiliki pemain/artis kesayangan. **Gito** dan **Gati** mereka sebut sebagai pemain kesayangan sekaligus sebagai pemain yang mempunyai banyak penggemar. Artis favorit lain tetapi tidak sekadar berketoprak ialah **Marsidah** dan **Widayat.** Sedangkan grup yang mereka sukai dan juga disebut sebagai banyak penggemarnya yakni **PS Bayu** dan **Sapta Mandala.**

Musik. Lima responden menyebut menyukai musik *pop.* Lima pula *paling menyukai dangdut.* Dua orang tak mampu menyebut mana yang lebih disukai, tapi amat menyukai *keduanya.* Seorang *paling menyukai keroncong.* Seorang lagi: *jazz!*

Sedangkan seorang lagi sama sekali *tak menyukai* musik. Mereka yang menyukai acara hiburan musik dan lagu rata-rata mempunyai penyanyi kesayangan. Di antaranya **Gito Rolies** dan **Chintami Atmanegara**

Olah raga. Acara ini pun mempunyai banyak peminat. Tiga responden tegas-tegas menyatakan *hanya Olah Raga* sebagai acara yang paling mereka sukai. Tiga lainnya menyukai olah raga di samping acara lainnya. Namun tak semua cabang olah raga mereka sukai. Sepak bola, bulu tangkis, tinju merupakan olah raga yang *paling* mereka sukai. Lima orang untuk *sepak bola saja,* dua untuk *sepak bola dan bulu tangkis,* dua lainnya *bulu tangkis saja,* seorang *tinju saja,* seorang untuk *tinju dan sepak bola,* seorang lagi tak mampu membedakan mana yang paling ia sukai di antara *ketiganya.*

Berita. Acara ini disukai oleh tujuh responden dengan tiga di antaranya menyatakan *berita saja* sebagai acara *paling disukai.* Tiga di antara tujuh responden menyatakan bahwa mereka mulai berada di muka televisi menjelang pukul 21.00 atau mulai pukul 21.00 dengan tujuan sengaja menonton acara **Dunia dalam Berita.** Acara ini ternyata mempunyai daya tarik tersendiri, sehingga menurut **Monitor,** merupakan acara yang paling banyak peminatnya dari semua acara yang disajikan TVRI.

Slamet, 36, seorang buruh, walau hanya tiga kali rata-rata menonton TV dalam satu minggu, jarang sekali melewatkan *Dunia dalam Berita* kecuali berhalangan penting. Dia berada di muka TV menjelang pukul 21.00. Walaupun mengenal S. Bagio, Gito dan Gati, Atiek CB, Stephanie Harper, Oshin tapi nampaknya ia lebih mengenal suara dan wajah Tuti Adhitama. Dan, hampir semua penyiar berita TV ia kenali wajahnya. Bahkan ia mengenal pula dua puluh nama tokoh yang disebutkan *Balairung,* seperti **Corry Aquino, Harmoko, Presiden Reagan** dan **Yustedjo Tarik.** Bapak ini memang memanfaatkan TV sebagai sarana memperoleh informasi di sela-sela waktu luangnya sebagai buruh.

Seorang responden yang menonton TV di atas tiga kali, paling menyukai berita, mulai menonton di atas pukul 21.00, juga mengenal beberapa tokoh seperti yang disebutkan **Slamet.** Tapi ia hanya mengenal **Tuti Adhitama** dari sekian penyiar berita TVRI. Rosponden ini mengaku niat utamanya menonton TV adalah untuk mengetahui berita dari mana saja. Pria yang sama sekali tak menyukai acara musik dan lagu serta hanya mengenal **Hetty Koes Endang** dari sekian penyanyi, mengaku tahu nama **Yustedjo Tarik** namun tak mengenal nama petenis asal Yogyakarta, **Yayuk Basuki.**

Lain-lain. Tidak seorang pun dari semua responden menyatakan tidak menyukai ketoprak. Tetapi untuk acara favorit lainnya, ada di antara responden yang menyatakan tidak menyukainya. Seorang responden (tukang becak), amat menyukai olah raga, ternyata menyebut *berita* termasuk *Dunia dalam Berita* sebagai acara paling tidak disukainya. TV dicarinya sebagai tempat hiburan. Sebaliknya seorang pedagang wanita, *paling tidak menyukai* olah raga *Arena dan Juara,* walau ia tak menolak ketika ditanya apakah juga tak menyukai *bulu tangkis.* Ibu ini menyediakan waktu yang cukup panjang untuk menyaksikan acara-acara TV. Banyak acara yang ia minati, antara lain sandiwara/drama, film seri, acara keagamaan, berita, dan film anak-anak.

Acara yang paling banyak *tidak disukai* oleh para responden yaitu film *berbahasa asing* atau *film barat.* Sandiwara/drama, Orkes Telerama, dan Taman Bhineka Tunggal Ika termasuk acara yang disebut *paling tidak disukai.*

PUISI

Kris Budiman

AKHIR TIGAPULUHSATU

buat g di kota b

dingin akhir tahun
mengukir gema pada tembok jalan
di gigir senja kepak burung
meninggalkan lembaran hari
(yang makin resah)
di gigir senja tampak bayangmu
bergetar menguak putih tulang

dan: januari pun pasti usai
menemaniku menunggu
hari hari yang patah
pada bibirmu yang terkatup

dingin akhir tahun
mengukir gema

.1984-1985.

Y.M. Bimo Satrio

TABUR KEMBANG

Belalang tua
terpelanting
dari pucuk ilalang

Seribu juta semut
menyeretnya
dengan hati-hati

Ke
liang
pusara.
(hampir dua jam mulutku terkatup)

.1985-1986-1987.

seni dan tekno-logi

Teknologi telah menyelinap ke dalam seni dengan banyak cara, secara tegas maupun diam-diam, sehingga kemajuannya sulit sekali untuk diikuti. Kita merasakan kehadirannya setiap kali kita menyaksikan suatu patung yang berbunyi atau yang berkelap kelip. Namun kita tidak mempunyai satu pegangan untuk menjinakkan segala ini.

Dalam pengertian kamusnya, "teknologi" adalah abdi ilmu pengetahuan, yakni penerapan teori ilmiah terhadap persoalan-persoalan praktis. Pada tingkat yang paling sederhana, bagi seorang seniman penerapan tersebut dapat berarti suatu barang baru atau suatu proses baru. Pada tingkat yang lebih tinggi, seperti yang dikemukakan oleh **Donald Schon** di dalam *Technology and Change* "teknologi" dapat berarti "*setiap* peralatan fisik atau teknik, *setiap* produk atau proses, *setiap* peralatan fisik atau cara untuk melaksanakan atau membuat". Dengan kata lain teknologi adalah caranya manusia bekerja, yang merupakan bagian dirinya sendiri, seperti halnya dengan otak atau tangannya. Tak salah agaknya apabila **Marshall McLuhan** menyebut teknologi sebagai kelanjutan dari susunan syaraf pusat.

Para seniman sejak dulu selalu menggunakan peralatan dan pengetahuan yang baru, walaupun tidak secepat dewasa ini, bila mereka menjelajahi pabrik-pabrik dan museum-museum. Di masa lampau jarak waktu antara barang dengan penggunannya di dalam seni adalah jauh lebih lebar. *Bauhaus*, sekolah design yang berpengaruh, telah didirikan di Jerman tahun 1919 dengan maksud antara lain untuk merapatkan jarak waktu tersebut — dan dari sekolah tersebut telah dihasilkan arsitek-arsitek seperti **Ludwig Mies van der Rohe**, pelukis-pelukis seperti **Josef Albers**. Kaum futuris dan konstruktivis secara sadar telah menentukan pula untuk menciptakan seni dari bahan-bahan yang terdapat di sekeliling mereka. Berkat hasil karya mereka maka seniman **Larry Rivers** berkata bahwa membuat patung dari lampu pijar sama mulianya dengan batu marmer, **"Michelangelo** melihat terdapatnya marmer di sekitarnya dan ia mempergunakannya," kata **Rivers**. "Saya mempergunakan aliran listrik. Di mana perbedaannya?"
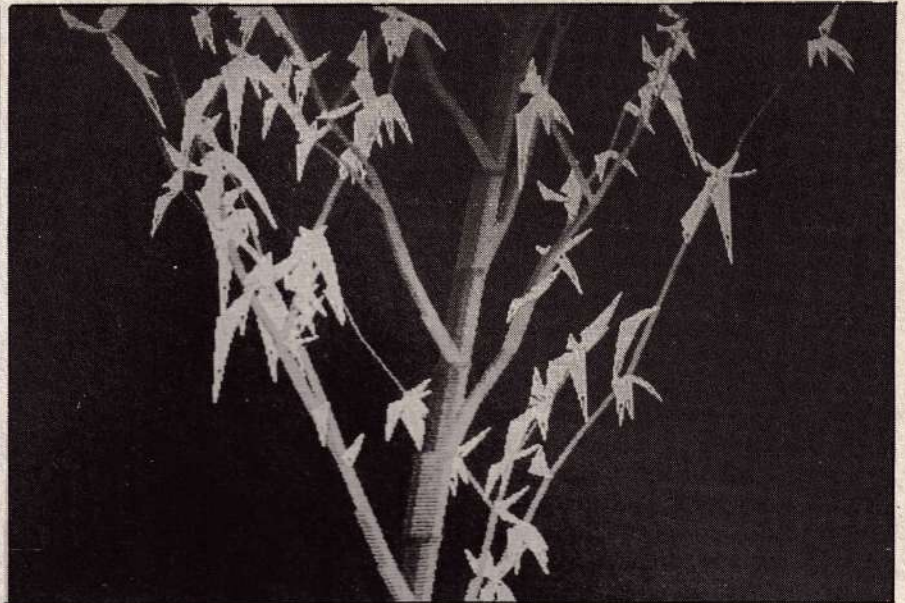
Perbedaannya adalah dalam tingkat, dan tidak hanya karena para seniman di masa lampau lebih lambat geraknya. Hal yang sama dialami oleh teknologi pula. Dewasa ini kita hidup di dalam dunia dengan bahan-bahan sintetis yang murah, yang mudah diubah bentuknya dan sangat menarik bagi seniman; ia dapat bekerja dengan bahan-bahan ini dengan cara yang tidak terdapat sebelumnya, seperti penggunaan *styrofoam*, bahan sintetis lunak untuk membuat patung.

Beberapa seniman patung kinetis (bergerak) hampir bersifat positivismistis terhadap mesin. **Nicholas Schoffar**, seorang Jerman, telah mengatakan bahwa ia ingin "memanusiakan" mesin, bahwa ia melihat kemungkinan dalam teknologi untuk "membebaskan" manusia. Beberapa seniman Amerika kemudian bergerak meninggalkan pameran-pameran yang bersifat statis. Pada pertengahan tahun 60-an mulai dipamerkan karya-karya seni yang menggunakan bahan-bahan elektronika — amplifier, oskilator, komputer digital, kabel-kabel — yang kesemuanya telah memberikan semacam keindahan yang juga sesuai bila menggunakan bahan-bahan yang lebih statis.

Apa yang dibuktikan oleh masa lampau dan masa kini mengenai seni dan teknologi adalah bahwa kita sedang menyaksikan suatu mutasi yang radikal di dalam suatu hubungan yang telah lama berlangsung dan yang telah bertahan terhadap setiap macam perubahan estetis. Agaknya dewasa ini terdapat empat aliran. Ada yang menggunakan bahan-bahan yang di hasilkan oleh teknologi dewasa ini. Ada yang menggunakan peralatan dan metode-metode yang berasal dari sumber yang sama. Ada yang menggunakana penggambaran baru yang diilhamkan oleh bentuk yang nampak nyata dari teknologi maupun penemuan-penemuan ilmu pengetahuan. Dan akhirnya, ada kerja sama penuh antara seniman dan mesin dalam proses penciptaan.

Hanya manusialah yang mampu membuat teknologi menjadi tidak manusiawi. Teknologi merupakan bagian dari manusia. Menentang teknologi di dalam seni bisa berarti pula menentangnya dalam kehidupan. Hanya manusia pulalah yang mampu menurunkan nilai benda/bahan ke tingkat "main-main", sehingga tidaklah tepat jika dikatakan bahwa lampu pijar secara hakiki bersifat dangkal ataupun pigmen (marmer) bersifat mulai; malah ribuan ton cat lukis telah diboroskan untuk lukisan-lukisan yang buruk. Agaknya kita harus belajar lagi, bahwa seni dapat meliputi bahan apa saja jika dipergunakan sebagai abdi imajinasi. ■

Harus Proporsional

"Memalukan orang tua!" Itulah kekhawatiran orang tua yang muncul setelah gadis cilik putri sulungnya langsung menyanggupi ketika diminta untuk menari. Peristiwa yang terjadi pada sebuah upacara agama Hindu di Singaraja — Bali itu, sempat membuat orang tuanya 'deg-degan'. Di luar dugaan, si kecil yang sudah mulai belajar menari tanpa sepengetahuan orang tuanya tampil memukau. Bisa dipastikan, ucapan selamat dan pujian yang diterima sesaat kemudian sanggup melenyapkan kekhawatiran sang orang tua.

Seiring dengan perjalanan waktu, ketrampilan berolahgerak bocah cilik yang dibina terus itu dibawanya hingga menginjak dewasa. Dialah, **Ni Luh Dharmakerti Natih**. Setelah menyelesaikan belajar di SMA Negri I Denpasar, merasa tidak keliru memilih Kedokteran UGM tahun 1983. Kemudian bersama enam yang lain dalam kelompoknya, tercatat sebagai pemenang pertama LKIP (Lomba Karya Inovatif Produktif) tingkat Nasional awal tahun ini. (Baca *Balairung* No. 3-4).

Penampilannya sederhana dan melahirkan kesan lincah dinamis. Gadis yang dilahirkan di Denpasar tanggal 17 April 1964 ini menggeluti kegiatan. Terbukti *Balairung* agak kesulitan juga mengatur jadwal untuk mengajak aktivis yang tinggal di asrama putri UGM "Ratnaningsih" ini ngobrol lebih lama.

Ni Luh — begitu teman-temannya memanggil — selain menjabat ketua Unit Tari Kreasi Baru, masih juga aktif di Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma (KMHD). Pernah pula aktif pada Unit Kegiatan Olahraga, khususnya cabang bolavoli. Namun karena merasa tidak bisa, malu kepada teman-teman, dan bosan, akhirnya setelah beberapa waktu keluar. "Yang lain *pinter-pinter*, saya *bodho* sendiri," pengakuannya kepada *Balairung*.

WALUYO TS

Niluh Dharmakerti

Tentang tari kreasi baru yang dipimpinnya itu, bermula dari ibu **Haryono** — istri sekretaris Purek III — yang berkeinginan membentuk kelompok tari mahasiswa yang dinamis. Ada dua pilihan, tari Bali atau tari kreasi baru. Setelah melihat tari kreasi baru lebih gampang, maka dipilihlah jenis tari ini.

Anak pertama seorang teknisi perusahaan penerbangan GIA ini dalam lingkungan keluarganya, sedari kecil mendapat didikan secara terbuka; belajar bertanggungjawab dan mengerti keadaan keluarga. Termasuk tentang keuangan keluarga. Pada setiap kesempatan dapat berkumpul, Ni Luh lebih senang ngobrol di tempat tidur dengan adik-adiknya. Di tempat tidur itu pula adik-adiknya banyak mendapat nasehat, bimbingan dan petunjuk, selain teladan di keseharian. Berpisah pertama kali dengan orang tua dan keluarga setelah diterima di UGM. Sedih? Justru pada tahun-tahun pertama Ni Luh merasakan dirinya sangat dewasa. Satu tanggungjawab!

Prestasi belajar? Biasa-biasa saja, katanya. Di SMA tidak pernah menjadi juara, hanya masuk sepuluh besar. Tetapi punya harapan juga untuk dapat menyelesaikan kuliah semester 8 ini dengan baik. "Mudah-mudahan bulan Agustus ini bisa ikut Wisuda. "Dengan gelar 'Dra. Medicine' ini berarti selama kurang lebih dua tahun berikutnya Ko-As di rumah sakit, sebelum menyandang sebutan dokter.

Aktivis ini lebih jauh mengatakan tentang kegiatannya, sejak tahun pertama sudah ada yang mengajak. Gadis yang suka nonton pertunjukan, nonton film jenis petulangan dan *action* (kalau ada uang) ini mempertaruhkan diri di antara ajang kegiatan-kegiatan dan kuliahnya. "Saya ingin tahu, apakah dengan mengikuti kegiatan ada pengaruhnya terhadap kuliah?" Ternyata, untuk tahun pertama, gadis yang senang warna *pink* ini, jika tidak ikut kegiatan, nilainya menurun. Semester berikutnya, Ni Luh mencoba mengikuti kegiatan lagi, dan nilainya membaik lagi kembali.

Sebagaimana manusia pada umumnya yang tidak pernah lepas dari masalah, **Ni Luh** pun sekali terbentur pada masalah yang cukup serius. Itu terjadi pada semester lima. Banyak sekali yang harus ia hadapi dan terima. Pribadi. Dan, konpensasinya ke banyak kegiatan. Bahkan pernah mengalami, besok pagi ujian, malam ini masih ada kegiatan lain. "Over aktivitas," katanya. Frustasi? "Daripada saya harus bingung, akhirnya masuk rumah sakit jiwa , saya ikut aktif!"

Sehingga tidak ada waktu luang untuk melamun, memikirkan yang tidak-tidak. Walaupun berakibat IP-nya agak jatuh. Namun untuk selanjutnya, "Saya harus aktif, tapi dalam arti proporsional," tandasnya.

Sebagai mahasiswa yang aktif, selama ini Ni Luh merasa lebih banyak berkecimpung dengan pemuda, mahasiswa-mahasiswa yang aktif kreatif. Dengan melihat prestasi yang dicapai teman-temannya — di Gelanggang, di KMHD, juga yang lain — timbul keinginan dalam dirinya untuk mencapai prestasi yang demikian. Terpacu! "Saya senang berteman dengan orang yang banyak tantangannya!" katanya dengan tegas.

Ni Luh tidak lepas dari sorotan perihal posisi yang dimilikinya dalam upaya menjajarkan dengan kedudukan lelaki pada umumnya. Walaupun mungkin hal ini hampir tidak disadarinya. Tidak perlu melebihi. "Wanita tidak harus sama dengan laki-laki," katanya mengungkapkan mengenai emansipasi wanita. Lebih jauh, pengagum **Koesnadi Hardjasoemantri** ini menyatakan bahwa emansipasi adalah kebebasan berpikir, mengeluarkan pendapat dan kebebasan memiliki tingkatan pengetahuan sejajar dengan laki-laki. "Kalau hal kekuatan, itu tidak saya harapkan." Tidak berharap menjadi petinju atau seperti binaragawati yang sering kita lihat di layar televisi. Itu yang dimaksudkan. Setuju, boleh.

Ketika ditanya apakah masih akan terus aktif, koordinator kesenian asrama *'Ratnaningsih'* yang —— menguasai banyak tarian ini menjawab "Mungkin akan tidak begitu aktif lagi." Terlebih pula kalau sudah koasistensi. Waktunya akan banyak tersita di rumah sakit. Harus proporsional. "Sekarang bertanggungjawab kepada diri sendiri, tapi nanti punya tanggungjawab kepada pasien." Begitulah seorang calon dokter. Namun, itu tidaklah menghalangi gadis pulau Dewata ini untuk tetap bergaya ria menari. Tentu saja selagi ada kesempatan. **(wimb/far)**

Bukan Nggak Butuh Uang

Anda nonton tidak, festifal *Ngeceng* yang diadakan Gadjah Mada Fair di Bulaksumur tahun lalu? Nah kalau nonton, coba ingat siapa juara II-nya mau tahu) Dia itu **Kartika Ariani**, salah satu pelukis muda berbakat yang ada di Yogya. Mahasiswi Fak. Pertanian tahun I ini memang paling suka ikut lomba atau festival, baik yang berbau seni lukis maupun yang tidak sama sekali. Dia bahkan pernah terpilih menjadi salah seorang finalis Putri Remaja yang diadakan majalah Gadis tahun 1985. "Umumnya apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan daripada diam nggak adakerjaan," jelasnya ketika ditemui *Balairung* di teras rumahnya.

Kartika sendiri agak merasa *'risi'* dengan predikat pelukis, walaupun 8 piala, 4 tropy, 3 plakat 3 medali dan 37 surat penghargaan di bidang seni lukis pernah diterimanya. Menurutnya, dia masih harus banyak memperdalam tentang teknik melukis yang benar, karena dalam satu media bisa didapatkan bermacam-macam teknik dan modifikasi. Bakat melukis mengalir dari ibunya dan kebetulan beberapa keluarga ibunya ada yang menjadi pelukis besar, seperti **Sapto Hudoyo** dan **Supono**. Ibunya pula yang mengajari melukis pertama kali. Kemudian berlanjut belajar pada bimbingan seni lukis buat anak-anak dan remaja yang berprestasi nasional dan internasional di P & K. Tahun 1981 program bimbingan tersebut *'mandeg'*, karena katanya banyak terjadi manipulasi kertas dan alat-alat lukis. Sejak itu, **Kartika** banyak belajar dari buku-buku mengenai seni lukis plus diskusi-diskusi dengan pelukis lainnya.

IST

Kartika dengan pialanya.

Balairung yang sengaja mampir di rumahnya suatu sore untuk wawancara, ternyata telah disiapkannya 2 lembar foto copy-an yang berisi daftar prestasi dan pamerannya sejak tahun 1974 sampai tahun 1987. Untuk pameran sudah 15 kali, baik yang diadakan di kota-kota di Indonesia maupun di luar negri. Tetapi buat berpameran tunggal gadis yang 9 September nanti tepat berusia 20 tahun merasa belum siap, "Bebannya berat sekali, orang mengamati saya sejak kecil, harusnya grafik kualitas meningkat terus, kalau nggak, itu berat."

Ketika ditanya soal aliran yang diikutinya, **Kartika** menolak, lalu mengatakan bahwa saat ini masih memperdalam lagi masalah lukis, dan masih dalam proses menentukan aliran. Untuk itu, sebelumnya ia harus benar-benar menguasai teknik-teknik melukis secara mantap dan benar. Rencananya ia akan mengambil aliran *Renaisance* dengan pelukis idolanya **Salvador Dali**.

Untuk pemilihan jenis cat pun, ia belum berani coba-coba beralih dari jenis cat poste. "Seperti mencoba jenis cat minyak misalnya, kalau ilmu belum mantap saya belum mau ke situ," tutur putri bungsu dari dua bersaudara ini dengan mantap.

"Saya tidak tahu ada tidak hubungan antara fak. Pertanian dengan kesenangan melukis. Dulu memilih Pertanian itu hanya asal-asalan saja," ungkapnya. Menurutnya, studi dan melukis harus dapat berjalan bersama-sama. Jangan sampai melukis mengganggu studi atau sebaliknya, karena

terlalu sibuk studi melukisnya terlupakan. "Sewaktu semester I masih bisa berjalan, untuk semester II praktikum meningkat dan banyak tawaran pameran, agak pusing jadinya," kata **Kartika** yang masih bingung memilih profesi yang akan diambil kelak; menjadi seorang pelukis atau menjadi praktisi pertanian.

Bagaimana proses membuat sebuah lukisan, **Kartika**? "Bisa saja, mendadak, misalnya dari masalah-masalah yang baru hangat, dari bacaan-bacaan atau bisa juga inspirasi dari musik," jawabnya.
Proses dari inspirasi sampai menjadi sebuah karya itu membutuhkan ketenangan lebih dahulu, dengan ketenangan dapat membantu tercapainya hasil karya yang baik. Bisa tiga bulan baru selesai atau ada yang hanya iseng-iseng mencorat-coret sudah jadi.

Koleksi lukisannya telah berjumlah 100 buah, beberapa hilang sewaktu pameran di Jakarta. **Kartika** yang mengaku boros soal uang selama ini belum pernah mau menjual lukisannya. Alasannya tidak tahu standar harga dan juga merasa belum begitu membutuhkan uang. Hal ini sering menjadi masalah dengan rekan-rekan pelukis lainnya, yang tersinggung dengan sikapnya. "Saya bukan nggak butuh uang, tetapi bagi saya belum begitu perlu. Teman-teman itu melukis motivasinya cari makan, saya tidak, jadi lain," tandasnya.

Ia pun menyayangkan anggapan teman-temannya yang sering melontarkan nada-nada sumbang bila ia ikut suatu lomba lukis. Seolah-olah ingin mengejar kejuaraan. "Kebanyakan dari lomba-lomba itu persaingan sudah tidak sehat lagi. Tidak seperti dulu, di mana setiap lomba, jarang ada yang berhadiah uang. Paling-paling berbentuk Tabanas, tapi sekarang uang langsung diberikan dan jumlahnya ratusan ribu uang. Nah... biasanya saya kalau sudah ikut lomba men ang, itu menang terus, berurutan. Mereka juga ngitung dapat berapa nih.....," lanjutnya geli.

Gadis yang tidak menyenangi olah raga ini merasa tidak cocok dengan kehidupan para seniman yang dianggapnya sering irrasional, karena hanya menuruti perasaan saja, dan akibatnya logikanya sering tidak jalan, "Saya nggak suka yang irrasional. Sebenarnya nggak perlu mereka itu begitu, ya entah.... Sensasi atau bagaimana. Saya lebih suka yang diam saja, biasa, tapi karyanya berbobot," tegasnya.

Gaya bicara **Kartika** memang sedikit angkuh dan suka ceplas-ceplos. Menurutnya kelompok-kelompok seni lukis yang ada sering sudah merasa bangga dengan dirinya sendiri tapi ternyata belum ada apa-apanya. *Blak-blakan* dia bilang kelompok Bulaksumur di UGM itu kurang mawas diri, tidak menyesuaikan kemampuan dan terlalu cepat puas. "Yang penting mawas diri, menerima kritik dan saran-saran, mencari masukan sebanyak-banyaknya," cetusnya.

far & dit

Banyak Teman

IST

Ada seorang wisudawan yang menjadi pusat perhatian pada acara Wisuda Sarjana UGM tanggal 19 Mei lalu. Wisudawan ini mendapat kesempatan khusus untuk foto bersama **Prof. Koesnadi** dan nyonya serta dengan **Ir. Hartarto** – menteri Perindustrian – dan nyonya. Kesempatan ini memang tidak akan diberikan kepada wisudawan lain, karena anak ini memang putra menteri Hartarto. Namanya cukup pendek: **Airlangga**. Tetapi gara-gara bapaknya beken, ya ditambah nama bapaknya, jadilah ia mempunyai nama **Airlangga Hartarto**. Teman-temannya biasa panggil *Angga* saja.

Anak ini memang tergolong istimewa. Di samping ia "mujur" sebagai anak menteri, juga pernah menjabat Ketua Umum Senat Mahasiswa Fak. Teknik UGM periode 83-85. Dan ketika menjabat ketua Sema ini pula, ia menjadi salah seorang wakil dalam kunjungan pemuda Indonesia ke Jepang atas sponsor kementerian Pemuda. Ketika ia menjabat di Sema ini pula ia membawa "pasukan" aktivis mahasiswa di FT UGM untuk menggalang hubungan dan kerja sama dengan Sema-sema di Bandung, Bogor dan Jakarta tahun 1983 akhir. Juga sempat mengadakan pentas musik terbuka se Jawa di Lapangan Bulaksumur. Dan lagi, ia lulus menjadi insinyur dalam waktu enam tahun – waktu yang tergolong lumayan cepat bagi mahasiswa Teknik UGM.

Sore harinya setelah acara wisuda, berbarengan dengan acara buka puasa bersama, ia mengadakan syukuran di Borobudur Room hotel Garuda Yogyakarta. Seluruh teman yang pernah dekat bergabung dengannya, diundangnya. Dan lumayan "mbludak" yang datang. Anak ini memang tergolong pandai bergaul dan pandai memilih teman bergaul. Teman dekatnya macam-macam: ada yang dari golongan Jakarta "sonoan", ada teman golongan aktivis – baik aktivis yang "normal" maupun yang "kekirian" dan absurd, ada teman bermain di Yogya, dsb. "Angga bilang, teman-temannya di Yogya sangat baik-baik", demikian kata **Ny. Hartarto** ketika harus memberi kata sambutan pada acara syukuran. Bagi teman-teman aktif Angga dulu, acara syukuran ini memang sekaligus menjadi ajang *reuni* besar-besaran, sebab sampai kini orientasi dari teman-teman aktivis itu macam-macam. Ada yang tertib, ada yang urakan.

Selain teman-teman yang datang malam itu juga hadir Prof. Koesnadi, Kanwil Perindustrian DIY, Kanwil Dikbud, para dosen FT UGM, dan dari pihak keluarga.

Beberapa hari kemudian ia boyongan ke Jakarta, dan bulan Agustus nanti ia melanjutkan program doktor ke Boston, Canada.

(ahdp)

politik hedon

Indonesia menentang faham-faham yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa; komunisme, atheisme, ekstremisme, materialisme, kastaisme, hedonisme, dan sejenisnya. Sudah banyak upaya dilakukan untuk menangkis nilai-nilai tersebut agar tidak merasuk ke jiwa rakyat. Kebijaksanaan bidang politik, keamanan, pendidikan, kebudayaan, ekonomi, dikerahkan untuknya.

Kebijaksanaan di bidang politik terutama, sangat nampak diusahakan benar. Dengan tegas pemerintah berusaha mencegah komunisme, Islam ekstrem, dan segala bentuk aktivitas yang dianggap berwarna subversibme. Kemungkinan masuknya faham itu dalam ormas dan parpol sudah dicegah. Kebijaksanaan massa mengambang diterapkan untuk bisa mengendalikan masyarakat dari aktivitas yang destruktif. Restrukturisasi politik merupakan program utama Orde Baru dalam rangka koreksi terhadap masa lalu. Untuk lebih mengefektifkan penataan ini juga digunakan pendekatan *security* dan *stabilitas,* terutama sejak akhir dasawarsa tujuhpuluhan. Lobang-lobang yang sangat memungkinkan adanya gerakan yang mengarah ke subversibme ditutup.

Kampus merupakan salah satu lobang awal munculnya nilai-nilai dan kesadaran baru dalam masyarakat dan negara, merupakan pintu gerbang masuknya informasi terbaru. Dan oleh karena itu juga merupakan lobang awal yang dapat memunculkan adanya subversibme, maupun juga tempat pertama kali munculnya kesadaran baru tentang kebenaran. Tempat munculnya kesadaran tanpa pamrih. Kalau dilihat dari satu sisi "politis" memang kata *subversib* itu yang muncul, yang kemudian mendorong diadakannya pemantauan terhadap kampus secara serius. Dengan tidak diperbolehkannya mahasiswa melakukan aktivitas politik, merupakan contoh yang sangat konkret. Dikhawatirkan mahasiswa akan ditunggangi oleh nilai-nilai yang bertentangan dengan kepribadian bangsa, yang tidak sejalan dengan Pancasila. "Normalisasi peran" mahasiswa mengharuskan ia tidak berpolitik di luar dengan mengatasnamakan kampus, maupun (akibatnya) tidak berpolitik dalam kampus meskipun dalam pengertian yang luas dan sangat tipis. Mahasiswa harus berada dalam "rel" yang benar,

dan

isme

artinya hanya belajar tentang disiplin ilmunya secara teoritis. Masalah kemasyarakatan dan lingkungan di luar merupakan hal yang tidak menguntungkan sama sekali untuk diperhatikan. Bahkan "berpolitik" di dalam kampus dalam artian menegakkan hak dan kewajiban azasi, menuruti panggilan hatinuraninya, tidak pernah dilakukan. Mewujudkan *moral force* dianggap berpolitik.

Mahasiswa sangat traumatis. Misalnya dengan adanya pengumuman ujian yang terlalu lama, pembimbingan skripsi yang berlarut-larut, feodalistiknya kehidupan kampus, adanya keterlibatan unsur sivitas akademika pada pencemaran nama universitas, masuknya individualisme, materialisme, dan hedonisme di kampus, dan sebagainya, mahasiswa diam saja. Mahasiswa tidak terpanggil untuk melakukan kritik konstruktif, tidak jujur terhadap hati nuraninya, tidak mewujudkan kewajiban politiknya sebagai *zoonpoliticon.* Memang keterpanggilan ini mengandung resiko yang tidak kecil, yang secara individu dapat mengancam "masa depan" si mahasiswa. Pertimbangan individu memang kini menjadi menonjol.

Kita menyadari bahwa komunisme, atheisme, individualisme, kastaisme, materialisme, hedonisme sangat bertentangan dengan ideologi negara. Mereka sangat laten gerakannya. Merupakan gerakan kultural lewat nilai-nilai yang disebar secara bertahap dan lembut. Sebagai contoh, akhir-akhir ini berkembang pesat nilai-nilai yang mementingkan kepentingan pribadi (individualisme), mengejar harta berlebihan (materialisme), mengejar dan mementingkan kesenangan lahiriah (hedonisme). Etika moral banyak ditinggalkan untuk meraih materi dan kesenangan pribadi secara *machiavellis,* bahkan mengarah ke "menuhankan" materi dan kesenangan individu tanpa memperhatikan kehidupan sekitar. Ia lebih laten dan merasuk ke sumsum, darah dan seluruh sendi.

Kita melihat, akhir-akhir ini di kampus-kampus mulai banyak kegiatan *Ngeceng, Slalom Test,* dan sejenisnya. Di saat tekanan ekonomi menyayat mayoritas mahasiswa, hedonisme berkembang di kampus.
Politik, betapa kecilnya kamu .... *(PR).*

pos elektronik

MEMBACA INFORMASI LEWAT TELEPON

Teknologi elektronik atau yang kini populer disebut tektronik membawa era baru dalam dunia arus informasi. Tidak hanya dalam satu lokal, namun mampu melakukan saling tukar informasi dalam jarak jauh antar komputer. Pos elektronik kini telah mulai dikenal di negara-negara maju dan bahkan di UGM pun sebentar lagi kita akan turut pula memakainya. Pos elektronik atau *electronic mail* adalah perkembangan lebih lanjut dari teknologi yang memungkinkan dua buah komputer saling bertukar data baik itu dalam bentuk artikel, surat, kontrak perjanjian maupun sekedar surat bagi si dia — melalui jalur telepon biasa. Dengan bantuan *interface* tambahan serta *software* yang sesuai pada umumnya komputer dapat saling berkomunikasi, dengan syarat kedua komputer tersebut sama-sama nyala atau *'on line'*. Namun pada sistem pos elektronik, sebuah sistem komputer bertindak sebagai 'tuan rumah' yang fungsinya sebagai tempat penampungan sementara beberapa kiriman dari komputer baik yang *main frame* maupun yang mikrokumputer sampai nanti komputer yang dituju mengambil kiriman tadi. Jadi tidak perlu dua komputer yang berkomunikasi itu dalam keadaan menyala. Karena itulah para pelanggan jasa 'tuan rumah' ini, yang dikelola suatu perusahaan jasa, masing-masing memiliki 'kotak pos' yang mempunyai kata sandi tertentu, seperti halnya bila kita memakai jasa kotak pos pada Kantor Pos Besar. Perusahaan pelayanan jasa pos elektronik ini adalah swasta dan sampai saat ini ada lima perusahaan jasa yang besar yaitu **Telecom Gold/ITT Dialcom, Easylink, One-to-One, Comet** dan **Prestel.** Masing-masing memiliki kotak pos berjumlah puluhan ribu dengan pelanggan mencapai 120.000, milik Easylink, dan jumlah yang lebih kecil untuk lainnya. Mereka bekerja melayani pelanggan selama 24 jam sehari.
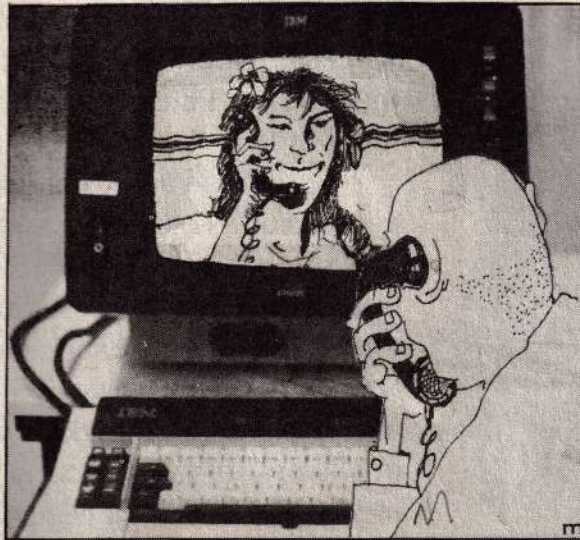
Secara teoritis, komputer-komputer pemakai jasa pengiriman informasi ini dapat berada di mana saja di muka bumi. Perusahaan-perusahaan itu mampu memasang jaringan yang mirip telex namun lebih canggih. Telex hanya mampu menangani bentuk huruf yang terbatas serta dalam bentuk huruf besar pula, sedangkan *electronic mail* hampir mencakup segala bentuk karakter termasuk gambar. Namun kenyataannya hal ini tidak bisa dilakukan karena adanya perbedaan standar yang dipakai oleh masing-masing perusahaan serta ketidakkompatibel-an masing-masing sistem yang bersaing. Sehingga untuk kiriman yang silang antar pelanggan pada perusahaan yang berbeda masih harus menggunakan jalur Telex.

SATU, NOL

Komputer memproses dan menyimpan teks sebagai aliran pulsa di mana tiap kelompok pulsa mewakili satu bentuk huruf atau angka. Kebanyakan komputer menggunakan kode standar ASCII *(American Standard Code for Information Interchange).* Pada kode standar itu satu grup dari *Word* yang terdiri dari tujuh atau delapan *bit* mewakili satu karakter (huruf atau angka) Tiap *bit* dalam tiap grup merupakan sebuah 'NOL' atau sebuah 'SATU' (mati atau hidup). Sebuah telepon yang dirancang untuk menyalurkan pembicaraan hanya mempunyai jangkau frekwensi terdengar yang terbatas, sehingga diperlukan suatu adaptor sebelum jalur telepon dapat mentransmisikan data dari komputer dalam bentuk pulsa digital.

Teknik yang digunakan untuk mengirimkan data lewat jalur yang biasa dipakai untuk pembicaraan disebut *Frequency Shift Keying* di mana satu frekwensi mewakili *NOL* dan satu frekwensi lagi mewakili *SATU. Hardware* yang merubah teks ASCII dari komputer menjadi bunyi pada telepon adalah sebuah **MODEM** (MODulator DEModulator) MODEM ini menghasilkan nada-nada bunyi apabila diberi input pulsa digital dan menghasilkan pulsa digital apabila menerima nada-nada bunyi. Untuk terciptanya komunikasi dua arah diperlukan empat macam frekwensi yang berbeda yang besarnya antara 1 dan 2 kHz, sehingga dengan demikian kalau kita mencoba *nguping* maka akan terdengar nada-nada tinggi.

Dalam komunikasi jarak jauh lewat telepon biasanya biasa diperhitungkan berdasarkan waktu. Maka laju pentransmisian informasi memegang peranan yang penting. Laju

komunikasi data pada pos elektronik diukur berdasarkan banyaknya nada yang ditransmisikan setiap detiknya, yaitu *bit* per detik. Untuk melihat betapa cepat komunikasi macam ini dilaksanakan, kita bisa membandingkannya dengan kecepatan komunikasi yang dilakukan Telex. Pesan yang disampaikan lewat Telex mencapai 50 bit/detik atau sekitar enam huruf perdetik, sedangkan yang biasa dicapai pos elektronik adalah 300 bit/detik/satu arah. Untuk komunikasi dua arah dikenal istilah 300/300. Untuk jenis sistem yang lain, standar V23, bekerja pada kecepatan 1200 bit/detik ke satu arah dan 75 bit/detik dari arah lainnya. Dengan kecepatan ini berarti sebuah komputer dapat mengirimkan sekitar lima lembar naskah seukuran folio dalam waktu satu menit. Majalah *New Scientist* telah melakukan penerimaan naskah artikel lewat jalur pos elektronik ini, malahan dalam waktu dekat mereka akan membuatnya langsung diedit pada komputer oleh editor dan kemudian ditransmisikan langsung ke percetakan. Fenomena baru dalam arus pengiriman informasi ini kemungkinan pelanggan pos elektronik di Amerika saat ini untuk juga berlangganan berita dari kantor berita yang juga memakai jasa pos elektronik. Jadwal penerbangan dan berita ekonomi juga dapat diperoleh langsung dari komputer di rumah-rumah penduduk. Para pemilik supermarket, toko dan penjual barang dapat pula menawarkan barang beserta harganya lewat jalur ini, termasuk di antaranya *Reader Digest*. Sehingga dengan demikian seseorang dapat memilih-milih belanjaannya tanpa harus datang ke pasar, hanya dengan jasa komputer dan telepon.

BELUM STANDAR

Walaupun di masa depan menampakkan prospek yang spektakuler, sampai saat ini pos elektronik ini masih menghadapi beberapa hambatan baik teknis maupun persaingan. Masing-masing perusahaan pelayan jasa itu masih memakai teknologi yang berbeda yang berarti standarnya pun berbeda alias tidak saling kompatibel. Masalah standar ini timbul karena adanya perbedaan dalam cara pengembagan teknologinya serta masalah teknis dalam hal pengiriman sinyal pulsa — data bit komputer. Masing-masing insinyur di perusahaan memperoleh penyelesaian yang berbeda-beda. Dan hal ini menjadikan suatu kompetisi dalam bisnis. Karena itulah jasa Telex untuk menghubungkan antar satu perusahaan dengan perusahaan lainnya masih diperlukan, yang berarti lebih dari 2 juta terminal telex masih dapat dipakai. Masalah nama sandi alamat komputer yang dimiliki pelanggan pun masih mengalami kelamahan. Pencurian data lewat pos elektronik masih bisa terjadi seperti yang terjadi di Prestel dan Telecom Gold, seseorang dengan komputernya 'masuk' ke 'kotak pos' yang bukan miliknya dan mencuri data yang ada di dalamnya. Belum lagi masalah 'kotak pos' yang dijejali iklan produk yang dikirim suatu perusahaan yang bisa merepotkan pemilik 'kotak pos', membaca data yang tidak dikehendaki. Langkah awal memang masih penuh ganjalan, tetapi pada suatu saat nanti bila sistem ini telah dapat bekerja dengan baik, maka pengiriman berita lewat telex, akan segera masuk musium dan kita mungkin malah bisa berlangganan koran yang khusus menyangkut topik yang betul-betul kita perlukan. **(NS/Asd)**

JENDELA BARU KE ABAD INFORMASI

"Dalam arti umum, kemajuan yang berarti, saya kira belum ada, bahkan ada beberapa hal boleh dikatakan adanya kemunduran," demikian **Drs. Widodo Priyadipraja MSc.EE,** pejabat Kepala UPT Komputer UGM merendah. Lho? Dari segi volume pekerjaan yang ditangani UPT Komputer UGM atau populer disebut PUSKOM memang terjadi pengurangan. Kini banyak fakultas memiliki komputer mikro untuk menangani pekerjaan administratif, akademis dan kemahasiswaannya sendiri yang mana dahulu masih memerlukan jasa dari PUSKOM. Itulah sebabnya dalam pengolahan data mahasiswa tidak sebesar dahulu lagi, tetapi pelayanan dalam hal lain lebih meningkat. Di samping itu sesuai dengan tuntutan dunia komputer modern, timbul semacam falsafah yang dinamakan *distributive processing* atau *pemprosesan terdistribusi*. Hal ini dapat dimungkinkan karena kini telah tersedia suatu sistem komunikasi antar komputer itu sendiri. Itulah sebabnya sebagai keseluruhan sistem, apa yang dialami UGM kini telah mengalami kemajuan.

Universitas Gadjah Mada kini telah bergabung dengan apa yang dinamakan *Project Education Indonesia Canada* bersama ITB, UNDIP, IPB dan UT. Inilah yang mungkin dapat dikatakan sebagai salah satu kemajuan, karena dengan hal ini nantinya UGM dapat langsung saling bertukar data lewat komputer dengan perguruan tinggi di Kanada. Di samping itu, nantinya UGM akan ikut pula dalam jaringan komputer antar Perguruan Tinggi Negeri yang pernah dipelopori oleh Universitas Indonesia. Rencananya dalam semester I tahun 1987/1988 ini jaringan itu telah dapat bekerja setelah permasalahan saluran telepon yang khusus untuk jalur komunikasi ini dapat dipasang oleh Perumtel.

Dengan bertambahnya fasilitas baru ini diharapkan juga dalam waktu dekat akan memungkinkan UGM untuk bergabung dalam sistem *Computer Converencing System* yang ada di Kanada bersama IPB, ITB, UNDIP dan UT. Dengan sistem baru ini nanti akan memungkinkan para ahli UGM untuk mengadakan konferensi atau seminar lewat komputer dengan para ahli di Kanada atau di PTN lain yang telah tergabung dalam sistem ini.

WALUYO TS

Widodo Priyodiprojo

Para ahli yang berseminar itu tidak harus berkumpul pada satu saat yang bersamaan dan pada tempat yang sama. Mereka yang melontarkan gagasan cukup datang pada terminal komputernya, menyambungkan komputernya dengan komputer pusat yang mengelola sistem ini, mengetikkan pendapatnya dan nanti membaca pada layar komputernya sendiri apakah ada

tanggapan dari para ahli lain. Jadi setiap saat orang dapat menjadi peserta konferensi itu hanya dengan menghidupkan terminal komputernya. Dan untuk membaca gagasan ahli lain yang berada di Kanada atau Bandung, dapat pula hanya dilakukan di rumah atau di PUSKOM UGM cukup dengan menyambung komunikasi terminalnya dengan komputer induk di Kanada.

Selain itu UGM juga akan mengembangkan *Electronic Mail System*, yaitu sistem pengiriman surat secara elektronik melalui komputer. Sistem surat elektronik ini memungkinkan para ahli kita yang pernah belajar di LN dapat tetap mendapat informasi baru dengan cepat dan melanjutkan kontaknya dengan rekan seprofesi di sana, demikian pula dengan para dosen kita yang sedang belajar di sana dapat tetap berkomunikasi dengan fakultasnya dengan cepat. Hal ini tentu saja akan sangat bermanfaat dalam rangka mempercepat para peneliti menelusuri dan mencari data.

IBM SUPERMINI

UPT Komputer UGM dengan bangunan barunya yang belum selesai dibangun, nampaknya akan berkembang terus terutama dengan dibukanya Program Studi Ilmu Komputer di FMIPA UGM kendatipun saat ini baru memiliki fasilitas komputer yang terbatas. Fasilitas komputer mikro yang ada sekarang adalah 20 buah IBM PC-XT dengan *harddisk* yang merupakan pinjaman dari kerjasama IBM-Dikti dengan hak pakai 24 jam sehari, 7 hari per minggu. Setelah 4 tahun komputer mikro tersebut akan dihibahkan pada UGM. Selain itu masih ada 18 buah IBM PC Kompatibel milik sendiri, sebuah IBM PC-AT dengan *harddisk*, 4 buah Apple kompatibel. Kemudian yang terbaru adalah satu unit IBM Supermini, yang sebenarnya juga sudah masuk jenis maksi, yaitu komputer dengan memori 8 Mbyte, kapasitas *disk* 3,2 GByte atau 3200 Mbyte dengan sambungan terminal maksimum sebesar 64 buah, tetapi terpasang 20 buah. 20 IBM PC-XT yang telah ada pun dengan demikian dapat pula menjadi terminal dari komputer sepermini ini dan masih tersisa untuk 24 terminal lagi. Selain fasilitas komputer, UPT Komputer UGM juga memiliki *tape drive* 2 buah, *printer* besar 2 buah dan *printer* kecil 2 buah.
(Wimb/Asd)

scanning tunnelling microscopy

MEMACU INDUSTRI MIKROELEKTRONIK

Setelah orang menemukan mikroskop elektron pada tahun 1931, orang kemudian memperoleh gambaran baru akan dunia yang mikro. Selanjutnya berkembang teknik yang dianggap standar untuk melihat permukaan suatu material pada dimensi atomis, seperti metode penyebaran elektron dan metode penyebaran ion. Dan akhirnya kini ditemukan metode baru lagi yaitu Scanning Tunneling Microscopy atau yang populer dikenal dengan STM pada tahun 1980-an. Bidang ini merupakan bidang yang kini sedang berkembang pesat baik di laboratorium-laboratorium Universitas atau pun di Industri. STM, merupakan hasil penemuan **Binnig, Rohrer** dan **Weibel.** Mereka adalah saintis di lab. riset IBM di Zurick. Instrumen STM ini bekerja berdasarkan suatu fenomena di dalam fisika kwantum yang dikenal dengan *electron tunneling* atau penerobosan elektron atau juga dikenal dengan *quantum tunneling*. Pada fenomena ini ditemui adanya partikel-partikel subatomis yang kadang kala bandel menerobos daerah 'terlarang' di dalam ruang.

Untuk mudahnya, mungkin kita bisa membayangkannya dengan analogi suatu penyelidikan menggelidingkan bola tennis ke arah tembok beton. Kemudian kita bayangkan bahwa di balik dinding beton tadi ada suatu alat pemantau yang akan memberikan tanda bila ada bola tenis yang bandel menembus dinding beton. Pada kenyataannya di dunia makroskopis kita, bola tennis bandel seperti itu tidak akan pernah ada karena dinding beton tadi adalah daerah terlarang. Kini kita bayangkan pada dunia mikroskopis, di mana bola tadi diganti dengan elektron, karena menurut mekanika kwantum terobosan tadi mungkin saja terjadi. Kemungkinan terjadinya terobosan bersesuaian dengan tebal tipisnya daerah terlarang tadi. Makin tebal makin sedikit yang menerobos. Kalau kita bekerja dengan sebaliknya, mengukur banyaknya elektron yang lolos, maka kita akan tahu tebal dinding yang dilalui, atau kita tahu 'daerah terlarang' tersebut.

Pada mikroskop yang dikembangkan oleh **Binnig** dan **Rohrer,** elektronk dipakai untuk 'melihat' atau mungkin lebih tepat dikatakan 'meraba' lapisan-lapisan atom pada permukaan sampel material. 'Daerah terlarang' dalam hal ini adalah celah vacuum yang tebalnya hanya seperseratus juta centimeter, atau beberapa *Angstrom* saja. Kemudian untuk pelempar bola pada penelitian khayal kita tadi, di sini dipakai sebuah elektroda yang berbentuk jarum sangat tajam yang ujungnya hanya beberapa atom saja. Permukaan material yang diselidiki dipakai sebagai elektoda lainnya. Dengan membuat beda voltage yang kecil antara ujung jarum dengan permukaan sampel material, maka akan terjadi aliran kecil elektron terobosan yang besarnya tergantung jarak antara keduanya. Jarum yang tegak lurus sampel tadi digerakkan pada setiap permukaan yang dikehendaki seperti halnya menggerakkan lensa obyektif pada mikroskop biasa. Dan hasilnya merupakan gambar tiga dimensi dari atom-atom pada permukaan sampel material. Memperoleh gambar dengan resolusi atomis ini dapat

dilakukan STM dikarenakan fenomena *electron tunneling* memungkinkan kita untuk melihat sampai ke dimensi 3. Perkembangan mikroskop yang luar biasa ini diharapkan akan banyak membawa faedah bagi dunia industri, khususnya dalam perkembangan piranti *semikonduktor*, karena dengan mikroskop ini memungkinkan peneliti untuk melihat material dan struktur dari piranti semikonduktor yang merupakan otak bagi peralatan elektronis saat ini. Kemajuan yang berarti nampak pada tahun 1986 yang lalu, sehingga penemuan **Binnig dkk.** tersebut kemudian memperoleh hadiah Nobel tahun 1986 bidang Fisika bersama **Ernt Ruska** yang mendapat penghargaan atas temuannya tahun 1931 yaitu mikroskop elektron yang pertama.

Baru-baru ini, pada beberapa laboratorium seperti IBM, AT & T serta FORD, teknik spektroskopi STM ini telah dikembangkan untuk mempelajari permukaan struktur elektronis. Metode yang merupakan pengembangan dari metode **Binnig** kini ternyata telah mampu menyingkap rahasia distribusi Silikon (111) dan Silikon (100) pada permukaan semikonduktor. Dengan kemampuan STM yang baru ini peneliti dapat melihat permukaan atom secara individual serta dapat mengetahui kerusakan atau *defect* yang ada di situ.

Gambar STM beresolusi tinggi dari permukaan emas, Au (111) diperoleh pada tahun 1986. Gambar yang luar biasa ini dihasilkan oleh mikroskop yang dikembangkan bersama antara laboratorium universitas dan industri. Mikroskop baru berdasar metode STM ini kemudian diberi nama *Atomic Force Microscope* (AFM). Dinamakan demikian karena alat ini mampu mendeteksi gaya-gaya yang amat lemah, dan penerapan STM ini telah menjadikannya sebagai alat yang paling sensitif untuk mendeteksi gaya. Perkembangan yang dicapai tahun lalu itu telah memberikan dampak langsung pada problema fisika yang dihadapi dunia industri khususnya yang bergerak di bidang teknologi permukaan dan mikroelektronik. Seperti misalnya pada teknik katalis yang memerlukan alat untuk analisa permukaan, maka metode untuk melihat struktur elektronis dengan STM ini sangat berguna. **(PT/Asd)**

M. THORIQ

Para mahasiswa yang akan melakukan Kuliah Kerja Nyata pada bulan Agustus – September 1987 ini sebelum berangkat "dikerjain" dulu untuk membersihkan kampus UGM selama tiga hari. Banyak mahasiswa yang kemudian mempertanyakan hakekat KKN.

STOP!

Tema *BALAIRUNG* nomor depan (edisi khusus): "Kaum Muda dan Masalah Pembangunan".

wawancara dengan Fuad Hassan (Mendikbud), Abdul Gafur (Menpora), Cosmas Batubara (Eksponen 66), Adi Sasono (Direktur Lembaga Studi Pembangunan), Suryadi (Ketua DPP PDI), Husni Thamrin (PPP), Anthony Zeidra Abidin (Pelita), Prof. Dr. Soeroso Prawirohardjo, MA (Javanologi), dan lain-lain.

tulisan dari Emha Ainun Nadjib, DR. Sofian Effendi, Wikrama Abidin, para aktivis mahasiswa dari Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta.

dan lain-lain.

Sikap Mahasiswa UGM Terhadap Politik

sebuah penelitian

Mungkin terlalu berlebihan pendapat **Seymour Martin Lipset** yang mengatakan: "sangatlah keliru setiap usaha menganalisa masa depan politik dalam negeri maupun luar negeri bilamana mahasiswa diabaikan (1971)", tetapi kita juga tidak dapat memungkiri keterlibatan politik mahasiswa Indonesia pada saat-saat penting sejarah kehidupan berbangsa, sehingga tak heran kalau **Aswab Mahasin** sampai berkata: "mengingkari peranan angkatan muda (terutama mahasiswa pen.) dalam politik barangkali sama saja mengingkari keperiadaan negeri ini (1977)".

Namun ini bukan berarti bahwa mahasiswa merupakan suatu kekuatan signifikan yang mampu membuat perubahan struktural yang mendasar. Kita hendaknya jangan terjebak dalam "mitos angkatan 66", di mana seakan-akan mahasiswalah yang memegang inisiatif dalam menumbangkan rejim Soekarno. Suatu identifikasi peran politik yang kemudian diambil alih oleh gerakan mahasiswa periode 1968-1980, karena terilusi bahwa mahasiswa merupakan kekuatan moral dan kontrol sosial yang efektif. Terbukti peran lama gerakan mahasiswa tidak selalu sukses untuk dibawakan pada pentas yang lain. Pencipta seni (baca: militer) menghidupkan aksi protes dan perjuangan anak muda dua dasawarsa yang lalu, kini juga adalah pemilik seni mematikan gerakan itu **(Mangiang, 1981).** Aksi-aksi "tritura" angkatan 66 secara kasar dapat dikatakan ditunggangi oleh militer dan kekuatan politik lainnya untuk merebut kekuasaan.

Kalau begitu gerakan mahasiswa selama ini hanyalah sempalan saja, tentu saja tidak, mahasiswa sebagai lapisan atas kaum muda yang beruntung menikmati dunia pendidikan tinggi memiliki karakterisitas tersendiri. Sebagai bagian dari masyarakat ia memiliki entitas tersendiri, yang hanya dapat dipahami setepatnya dalam kerangka sosiologis dan lingkup sejarah tertentu.

Ekspresi politik mahasiswa tidak terlepas dari dua kondisi yang saling mempengaruhi. Kondisi pertama yaitu kondisi obyektif yang berkaitan dengan kerangka persoalan yang lebih luas, yaitu struktur ekonomi politik dan posisi sosial mahasiswa dalam struktur tersebut. Kondisi yang kedua kondisi subyektif, yaitu variabel-variabel yang secara langsung berkaitan dengan kepentingan mahasiswa, yang bisa ditelusuri dari citra diri mahasiswa, orientasi okupasi, pandangan

IST

Mahasiswa yang ikut kampany PDI. Demokrat Kampus?

IST

Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia, mendukung Golkar.

terhadap persoalan-persoalan bangsa, dan lain-lain. Hubungan antara kedua kondisi ini bersifat dialektis yang akan membentuk "konstruksi" realitas mahasiswa dan akhirnya menentukan format ekspresinya. Atau dengan kata lain di antara kondisi obyektif dan kondisi subyektif terbentuk subyektivitas mahasiswa.

Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kondisi mahasiswa Indonesia. Terutama sejak diberlakukannya NKK dan konsep Wawasan Almamater.

Selama lima tahun terakhir ini memang situasi kampus terasa tenang dan tidak diwarnai gejolak politik yang berarti. Kalaupun ada kericuhan itu menyangkut masalah intern kampus seperti kenaikan uang SPP, perubahan kurikulu, dan birokrasi. Situasi yang relatif tenang ini tentu menimbulkan bermacam dugaan. Tapi satu hal yang pasti, memudarnya dinamika politik mahasiswa tentu bukan berarti minat dan atensi mereka terhadap perkembangan ekonomi politik masyarakat menghilang. Dipatahkannya kekuatan mahasiswa sebagai suatu organisasi tidak membuat secara individual respons dan aspirasi mahasiswa menurun, mereka tetap mengikuti perkembangan masyarakatnya baik itu melalui media massa maupun sesama teman. Hanya bagaimana format ekspresinya itu masih problematik.

Tulisan ini mencoba untuk memaparkan beberapa hasil penelitian "mahasiswa dan politik" yang dilaksanakan di lingkungan Universitas Gajah Mada.

Tulisan ini menghindari penjelasan tentang kondisi obyektif struktur ekonomi politik kita yang bisa bertele-tele dan memakan halaman dari tulisan ini. Secara umum cukup dilukiskan bahwa kebijaksanaan ekonomi kita bersifat Kapitalistik dengan sistem politik yang cenderung otoriter.

Penelitian ini menggunakan dua metode, yang pertama yaitu wawancara, yang kedua kuesioner. Responden diambil dari Fakultas: *Teknik, Sospol, Hukum, dan Pertanian.* Untuk wawancara diambil responden masing-masing lima orang, sedangkan kuesioner disebar (diisi sendiri oleh responden) dengan rincian: Teknik 25 orang, Sospol 35 orang, Hukum 25 orang, dan Pertanian 35 orang. Mayoritas dari responden adalah mereka dari angkatan 83 ke bawah.

Dari kuesioner yang disebar hasil yang didapatkan cukup beragam. Keempat fakultas tidak menunjukkan perbedaan-perbedaan yang berarti. Hanya secara kasar dapat dibuat kategori fakultas teknik dan Sospol sebagai fakultas *keras,* sedangkan fakultas hukum dan pertanian sebagai fakultas *lembek.* Kategori ini tentu saja bisa dituduh artifisial, tetapi dari hasil sementara memang menunjukkan demikian. Mengapa demikian penjelasannya tentu bermacam-macam, bisa tradisi fakultas, spesialisasi ilmu, atau individunya. Tapi sekali lagi dikatakan bahwa perbedaan itu sangat kecil, apalagi kalau kita lihat kasus per kasus.

Hasil Penelitian

1. *Apakah mahasiswa telah apatis:* Di Fak. Teknik yang menjawab mahasiswa telah apatis adalah 64%, di Sospol 43%, di Hukum 20%, dan di Pertanian 36%.
2. *Faktor yang menyebabkan mahasiswa apatis:* ada dua kategori jawaban yang mendapat nilai tinggi dari responden yaitu: sistem pendidikan yang ketat dan tekanan dari pemerintah. Di Fak Teknik yang menjawab sistim pendidikan yang ketat 60% sedangkan tekanan dari pemerintah 16%, dan 16% menjawab kedua-duanya. Di Sospol 48% mengatakan karena sistem pendidikan dan 23% karena tekanan pemerintah. Di Hukum 64% mengatakan karena sistim pendidikan. Di Pertanian 68% mengatakan karena sistim pendidikan dan 24% karena tekanan dari pemerintah.
3. *Kesetujuan terhadap NKK dan Wawasan Almamater:* di Fak. Teknik yang tidak setuju terhadap NKK dan WA karena membatasi kebebasan bergerak mahasiswa dan sebaiknya mahasiswa mengetahui bagaimana berpolitik sebesar 84%, di Sospol 60%, di Hukum 56% dan di Pertanian 76%.
4. *Citra mahasiswa Ideal:* ada tiga kategori jawaban disini, pertama aktif dalam kegiatan yang berbuhungan dengan masalah kemasyarakatan, kedua aktif dalam kegiatan khusus kemaha-

siswaan, dan ketiga belajar yang tekun agar cepat menyelesaikan studi. Di Fak Teknik yang menjawab pertama 60%, jawab ketiga 24%, yang ketiga-tiganya 12%. Di Sospol yang menjawab pertama 86%, dan yang menjawab belajar tekun 14%. Di Hukum menjawab pertama 68% dan menjawab ketiga 16%. Di Pertanian 76% dan 16%.

5. *Pandangan terhadap partai politik dan Golkar:*
di **Fak**. Teknik yang menjawab program-program partai dan Golkar mewakili aspirasi rakyat sebesar 20%, di Sospol 31%, di Hukum 68%, dan di Pertanian 60%.
6. *Pandangan terhadap korupsi di pejabat:*
di **Fak** Teknik yang mengatakan korupsi sebagian besar sudah membudaya pada pejabat kita 84%, di Sospol 91%, di Hukum 68%, di Pertanian 84%.
7. *Pendapat tentang pembangunan:*
di **Fak**. Teknik pendapat yang mengatakan pembangunan telah berhasil meningkat taraf hidup rakyat sebesar 36%, di Sospol 40%, di Hukum 72%, di Pertanian 60%.
8. *Pendapat tentang kehidupan politik:*
ada dua kategori disini belum dan cukup demokratis, di Fak Teknik yang menjawab belum demokratis 68%, di Sospol 54%, di Hukum 20%, di Pertanian 24%.
9. *Pendapat tentang partisipasi politik konvensional,*
seperti pemilu, menjadi anggota partai, ikut kampanye, mengirim surat ke pejabat, dll.:
ada tiga kategori di sini, yang pertama itu cara paling baik, yang kedua tidak cepat melakukan perubahan, dan ketiga tidak ada gunanya. Di Fak Teknik yang menjawab tidak cepat sebesar 32% dan yang jawab tidak ada gunanya 56%. Di Sospol yang menjawab pertama 28%, kedua 54%, ketiga 14%. Di Hukum yang menjawab pertama 52%, kedua 48%. Di Pertanian pertama 12%, kedua 60%, ketiga 16%.
10. *Keanggotaan partai politik:*
mayoritas dari responden di setiap fakultas mengatakan bahwa mereka tidak akan menjadi anggota partai politik.
11. *Keikutsertaan dalam kampanye;*
mayoritas dari responden mengatakan bahwa mereka tidak akan turut kampanye. Di **Fak** Teknik yang menjawab kadang-kadang turut kampanye 8%, di Sospol 8%, di Hukum 8%, di Pertanian 12%.
12. *Pendapat tentang pelaksanaan pemilu:*
ada empat kategori disini, pertama luber, kedua sebagian besar rakyat asal ikut saja, ketiga banyak rakyat dipaksa memilih satu golongan/tidak berjalan dengan semestinya.
Di Fak Teknik yang menjawab pertama 0%, kedua 60%, ketiga 36%. Di Sospol yang menjawab pertama 8%, kedua 63%, ketiga 29%. Di Hukum pertama 32%, kedua 48%, ketiga 20%. Di Pertanian pertama 16%, kedua 48%, ketiga 36%.
13. *Partai yang menjadi pilihan:*
Sebagian besar responden nampaknya enggan menjawab pilihan mereka. Dari 110 responden hanya 74 yang bersedia, secara terperinci Teknik 15, Sospol 28, Hukum 16, Pertanian 15.
Di FakTeknik yang memilih Golkar sebesar 20%, PPP 10%, PDI 6%, dan tidak memilih 60%. Di Sospol yang memilih Golkar 46%, PPP 7%, PDI 7%, tidak memilih 39%. Di Hukum yang memilih Golkar 75% dan yang tidak memilih 25%. Di Pertanian yang memilih Golkar 40%, PPP 6%, PDI 0%, dan tidak memilih 53%.
Secara total dari keseluruhan responden yang tidak memilih dalam pemilu yaitu sebesar 43%.
14. *Cara efektif untuk melakukan perubahan:*
Ada empat kategori jawaban disini, pertama dengan aksi-aksi protes seperti demonstrasi, mogok kuliah, aksi poster dll, kedua aski-aksi kekerasan seperti penculikan, pembajakan, pembunuhan politik dll, ketiga melalui partisipasi politik konvensional seperti pemilu, surat pembaca, anggota parpol, dll, dan keempat berdiam diri saja.
Di Fak Teknik yang menjawab pertama sebesar 28%, kedua 12%, ketiga 28%, keempat 36%. Di Sospol 26%, kedua 8%, ketiga 51%, keempat 11%. Di Hukum yang menjawab pertama 4%, kedua 12%, ketiga 72%, keempat 12%. Di Pertanian yang menjawab pertama 20%, kedua 12%, ketiga 44%, dan keempat 20%.
Secara total yang mengatakan perlu adanya perubahan melalui aksi-aksi protes sebesar 20%, melalui aksi kekerasan 11%, melalui partisipasi politik konvensional 49%, dan hanya berdiam diri saja 19%. **(Balairung/Bonar Tigor)**

Pilihan mahasiswa di empat fakultas

	PPP	Golkar	PDI	Golput	Blanko
Teknik	10%	20%	6%	60%	4%
Hukum	0%	75%	0%	25%	0%
Sospol	7%	46%	7%	39%	1%
Pertanian	6%	40%	0%	53%	1%

catatan PERISTIWA

Iuran Kemahalan

Fasilitas olah raga di lingkungan kampus UGM banyak tersedia. Salah satunya adalah gedung STO, tempat berlatih bulu tangkis yang terletak di sisi tenggara Fak. Sastra. Menurut jadwal yang disusun oleh pengelola gedung ini, setiap hari selalu ada klub bulu tangkis yang berlatih baik dari Fak. Sastra sendiri maupun dari luar seperti Psikologi, Fisipol dll. Semula wajar-wajar saja, penggunaannya asal melalui prosedur yang sesuai jalur maka sudah berhak memakai tanpa mengeluarkan isi kantong untuk menyewa gedung. Barulah pada pertengahan April 1987 timbul suara-suara sumbang di kalangan pemakai gedung terutama dari Fak. Sastra khususnya mahasiswa Arkeologi yang aktif latihan setiap hari Kamis sore. Pasalnya, 15 April 1987 turun surat dari PD II Fak. Sastra UGM yang berisi tata tertib penggunaan gedung STO yang tertera di dalamnya masalah pembayaran iuran perawatan gedung sebesar Rp 15 00,- per semester bagi semua pemakainya.
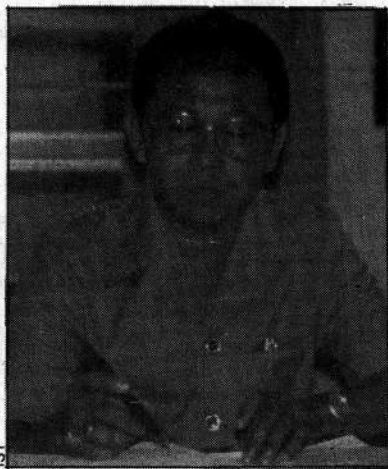
IST

A. Sarman

Berdasarkan sumber yang dihimpun dari beberapa pemakai gedung itu, ada beberapa yang merasa keberatan. "Kami latihan sudah bayar iuran Rp 1000,- per bulan untuk membeli kok dan perlengkapan lainnya. Jika masih iuran lagi kami merasa keberatan," tukas **Siswoto,** koordinator bagian olah raga dari jurusan Arkeologi. Sementara suara lain," Bulu tangkis Sastra sudah enam tahun menjuarai di UGM, tapi mengapa tidak ada penghargaan dari fakultas? Padahal saat ini bulu tangkis sastra sedang menanjak," kata **Budi Santoso** mahasiswa jurusan Arkeologi yang bermaksud ingin menghadap PD II untuk menyelesaikan masalah ini. Dia menambahkan "Saya takut kalau mereka tak mau latihan lagi sehingga tak ada pembibitan, sebab yang memperkuat Sastra itu angkatan lama, yang baru hanya saya," jelasnya.

Itu hanya sebagian suara yang bernada tak senang. Namun ada pula beberapa suara mahasiswa yang menanggapi dengan biasa saja. "Seandainya iuran itu tetap dilaksanakan, kami akan berusaha meminta bantuan dari SEMA," ungkap salah seorang mahasiswa yang enggan disebut namanya. Sementara beberapa mahasiswa ribut masalah ini, ada pula yang tenang-tenang saja sebab memang tidak tahu menahu meski terdaftar dalam jadwal pemakai gedung STO, yakni jurusan Sejarah yang telah lama absen latihan. "Lho, malah saya nggak tahu kalau pemakaian gedung tersebut sekarang ini harus membayar iuran," kata mahasiswa sejarah angkatan '84 yang semula aktif latihan.

Untuk mengetahui sebenarnya dari "keributan" tersebut, *Balairung* menemui PD II Fak. Sastra UGM **Dr. Daru Suprapto** di ruang kerjanya. "Saya tidak tahu-menahu masalah ini. Tanya saja pada pak **Sarman.** Saya hanya sekadar mengetahui saja," demikian jawaban dilontarkan yang mengandung keengganan untuk membicarakan lebih lanjut. Meski *Balairung* menyodorkan berkas foto copy yang ditandatanganinya, tetapi Daru tetap tak mau memberi keterangan.

Drs. A. Sarman A.M. pengelola ruang olah raga Fak. Sastra UGM, ketika ditemui di kantornya menjelaskan bahwa langkah yang ditempuh ini merupakan penertiban pemakaian gedung STO yang selama ini tidak tertib pemakaiannya, karena banyak yang hanya terdaftar dalam jadwal tetapi tidak pernah digunakan, padahal banyak pula yang ingin memakainya. "Jadi karena tak ada ikatan apa-apa, mereka semaunya sendiri. Diharapkan dengan iuran ini ada rasa tanggung jawab penggunaan gedung kepada fakultas," katanya kepada *Balairung.*

Bagaimana bila ketentuan ini dapat menghambat prestasi bagi pemain bulu tangkis yang selama ini Sastra selalu menjuarai? "Kalau memang mereka badminton *minded* pasti hal itu bukan halangan. Dan lagi, saya kenal betul dengan mereka yang juara itu," katanya dengan tegas. "Iuran itu hanya sekadar pancingan agar ada ikatan saja. Masalah besar iuran itu bersifat "luwes", jadi kalau memang betul-betul merasa keberatan, asal ada yang menghubungi untuk diperingan, itu bisa diatur," begitu keterangannya.

Suara sumbang yang simpang siur bila tidak dirembuk kembali pada sumbernya tidak mungkin dapat menyelesaikan masalah. Seperti yang dilontarkan *Sarman* dalam akhir wawancara dengan *Balairung,* "Mereka itu kan hanya suara-suara burung saja, belum tahu duduk persoalannya tapi sudah "berkoar" ke mana-mana. Nyatanya sampai sekarang mereka belum kemari," tandasnya.

WALUYO TS

Gelandangan di depan Gedung Agung, minumnya aqua.

Mendaratkan Psikologi

Gelandangan merupakan salah satu gejala sosial yang berkembang di kota-kota besar di Indonesia, khususnya di Yogyakarta. Nampaknya gelandangan dari masa ke masa tetap merupakan masalah sosial, yang erat kaitannya dengan masalah pengangguran, kesempatan kerja dan kemiskinan. Gelandangan muncul akibat sifat malas, tidak biasa dengan disiplin diri, biasa dengan kebebasan, tidak merasa perlu mengindahkan kaidah-kaidah normatif yang berlaku umum, dan terlalu biasa memuaskan kebutuhan secara segera. Dari gambaran tersebut, timbul pertanyaan, gelandangan sebuah sikap mental atau sekadar status sosial? Atau malah keduanya?

Berangkat dari pertanyaan di atas dan keinginan memberikan gambaran nyata kepada mahasiswa tentang celah-celah kehidupan gelandangan, timbul upaya untuk memahami *kiprah* mereka. Maka pada tanggal 1-2 Mei '87 yang lalu SEMA Psikologi UGM menggelar Seminar Akademik Nasional Mahasiswa Psikologi '87 dengan tema *"Peranan Psikologi Dalam Upaya Penanganan Tuna Wisma".*

Selain untuk memberi gambaran konkret kaum tuna wisma, kegiatan seminar tersebut juga dilatarbelakangi, "Keinginan menampilkan psikologi guna memberi masukan terhadap pemecahan masalah tuna wisma. Katakanlah kami ingin mendaratkan psikologi di Indonesia," demikian ungkap Musa Tanaja — ketua panitia — kepada *Balairung.* "Sekaligus memperingati Tahun Internasional Tuna Wisma PBB," lanjutnya.

Acara yang dibuka oleh Purek III, **Soepono Msc** — sedianya Mensos namun berhalangan — diikuti berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta se Indonesia. Perguruan tinggi yang ikut berpartisipasi — selain UGM — UMS Solo, Universitas Maranatha Bandung, UNISBA Bandung, UNIKA Soegiyopranoto Semarang, Ubaya Surabaya dan program studi psikologi FISIP UNAIR Surabaya. Serta mahasiswa dari berbagai fakultas di lingkungan UGM.

Dalam seminar ini juga di tampilkan para pakar; **Moerniati Soetjipto MA,** (staf pengelola proyek Code dan direktris Akademi Kesejahteraan Sosial Tarakanita Yogya), **Drs. Soeharsono Sagir,** (staf ahli Menaker), dan dosen psikologi UGM **Drs Moh. As'ad SU.**

Dalam makalahnya Moh. As'ad mengemukakan, dua faktor penting yang melatarbelakangi seseorang menjadi gelandangan, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah yang berkaitan dengan psikologis, sedangkan faktor eksternal menyangkut ekonomi, sosial, pendidikan, geografis, kebudayaan, dan agama. Untuk menanggulangi, paling tidak *mengeliminir* kegiatan menggelandang, "Terapi agama mutlak diperlukan," tandas Moh. As'ad. Hal ini perlu untuk memulihkan kepercayaan diri, citra diri proses yang berhubungan dengan *becoming a person,"* lanjutnya.

Peserta seminar begitu antusias membahas masalah tuna wisma. **Hardi,** dari Maranatha membantah bahwa gelandangan itu miskin semua. Di Bandung malah ada gelandangan yang sehari berpenghasilan Rp. 6.000 hingga Rp 9.000 , katanya. "Mereka pada dasarnya tidak menyimpang, asumsi-asumsi seperti itu adalah bukti kesombongan kita. Mereka tetap bagian dari masyarakat bukan bentuk atau masyarakat yang tersendirikan pula. Kita memisahkan diri dari mereka, hal itu menyudutkan mereka, orang-orang yang dicampakkan," protes **M. Nursalim Malay** dari UMS berapi-api.

Sikap mental gelandang bukan monopoli kaum tuna wisma, ia bisa pula menjalar di kampus-kampus. Agaknya ini pun ingin digugat oleh seminar dua hari yang melelahkan itu.

Setelah dengan serius saling memperdebatkan gelandangan, gantian mereka serius bersenang-senang, gitaran, nyanyi dan *ndagel* dalam Malam Keakraban Psikologi '87, yang mengakhiri serangkaian seminar dua hari tersebut. Nah, untuk sementara gambaran tentang gelandangan terlupakan malam itu. **(af)**

Kemandirian Wanita Berubah

Di abad nuklir ini masih banyak pria yang tidak setuju jika istrinya bekerja. Hal ini terlihat dari hasil angket terhadap mahasiswa pria yang dilakukan harian *Kedaulatan Rakyat Minggu.* Ternyata 44,5% mahasiswa pria tidak setuju bila istrinya bekerja.

Hanya 15% yang setuju. Demikian dijelaskan **Kol. Pol. Dra. Rukmini,** anggota DPR Pusat fraksi ABRI pada diskusi panel Sabtu pagi 25 April 1987 di gedung pertemuan UGM dengan tema "Kepribadian Wanita yang Mandiri Sebagai Salah Satu Aspek untuk mewujudkan Cita-cita Kartini". Sebagai pembahas adalah **Drs. Ashadi Siregar** dari Fisipol.

Diskusi yang diadakan seksi keputrian Menwa MAHAKARTA Yon I UGM tersebut merupakan rangkaian program kegiatan memperingati hari Kartini. Berlangsung mulai pukul 9.00, hampir semua kursi terpenuhi oleh sekitar 150 peserta yang terdiri dari perwakilan Sema dari semua fakultas — serta dari unit kegiatan, yang mayoritas adalah wanita Entah karena penyampaian yang menarik dari kedua pembicara atau karena tema yang dipilih, meskipun ada beberapa yang "ngobrol", peserta serius mengikuti sampai selesai. Keantusiasan peserta terlihat ketika dibuka termin dialog. Banyak sekali peserta yang mengacungkan jari meski akhirnya gigit jari karena tak kebagian kesempatan.

Pada intinya, Dra. Rukmini dalam makalahnya yang mengambil judul sesuai dengan tema diskusi, menekankan bahwa kemandirian wanita berubah dari zaman ke zaman searah dengan tuntutan perubahan jaman. Mengenai persamaan hak pria dan wanita, telah termuat dalam UUD '45. Maka yang nampak sesudahnya adalah hadirnya pria dan wanita di semua bidang kehidupan, seperti politik, sosial dan budaya. Sedangkan Ashadi lebih menekankan kemandirian wanita dalam konteks sosial dengan menampilkan sosok wanita yang dikontraskan dengan kaum wanita.

Hal menarik dalam diskusi ini adalah adanya konsekuensi dari fungsi ganda wanita, yakni sebagai ibu rumah tangga yang selalu hadir dan mengerjakan tugas-tugas rumah tangga dan sebagai wanita karir. Dalam hal ini sikap suami sangat menentukan.

Mengenai ketidaksetujuan kaum pria bila istrinya berkarir, menurut Ashadi, penulis novel *Cintaku di Kampus Biru* itu berpendapat, kecenderungan kekuasaan dunia pria akan menjadikan wanita sebagai — obyek seks semata. "Anehnya, wanita dalam orientasi semacam ini bersifat komplementer pula, sehingga— untuk menyenangkan suami ia akan "ngadi saliro" dengan ramuan dan jejamuan, bahkan bila perlu menempuh "vaginoplasty," katanya sambil *mesam-mesem.*

Pada akhir diskusi diulas kembali tentang kemandirian wanita bukan semata dari kapitalis si wanita sendiri, namun juga ditentukan faktor luar. Dewasa ini, meskipun emansipasi wanita di Indonesia sudah mulai terwujud sehingga memungkinkan wanita mengembangkan potensinya di berbagai bidang kehidupan, namun bila sebagian pria masih berpendirian bahwa wanita hanyalah "konco wingking", lantas dapatkah kemandirian wanita benar-benar terwujud? **(Lus&Ning).**

Sentralisasi Perpustakaan

UGM kini telah menambah satu perbendaharaan baru dalam upaya peningkatan dan pengembangan mutu pendidikan dan ilmu pengetahuan. Sarana itu berupa Gedung Perpustakaan Pasca Sarjana. Peresmian gedung perpustakaan yang terletak berdampingan dengan gedung perustakaan UGM Unit I dilakukan oleh Rektor UGM **Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H.** pada tanggal 21 April 1987.

Dalam sambutannya, rektor mengatakan pembangunan Gedung perpustakaan Pasca Sarjana ini merupakan langkah awal ke arah sistem sentralisasi perpustakaan di dalam kompleks. Kompleks ini akhirnya akan meliputi gedung-gedung perpustakaan S 1, yang meliputi empat *cluster* bidang ilmu, yaitu ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu kesehatan, ilmu-ilmu pertanian, dan sains dan teknologi serta gedung untuk perpustakaan Pasca Sarjana. "Dengan gembira saya informasikan, bahwa berbagai pihak telah menyatakan komitmennya untuk membantu Gedung Perpustakaan Pasca Sarjana ini, di antaranya dari Universitas PBB (United Nations University) di Tokyo, yang akan menjadikan perpustakaan ini sebagai *depository library,* yang berarti bahwa setiap penerbitan Universitas PBB secara otomatis akan dikirimkan ke Perpustakaan Pasca Sarjana," kata Koesnadi. Di samping itu, Kedutaan Besar Amerika Serikat akan menyediakan "American Resource Collection". *The British Council* memberikan sumbangan berupa "British Collection". Demikian juga bantuan telah dijanjikan oleh Universitas of Waterloo Kanada.

Dalam bagian lain sambutannya, rektor mengingatkan, bahwa hari peresmian ini sengaja dijatuhkan pada hari Kartini. "Karena sebagaimana Kartini membawa sinar terang dalam ke-

gelapan, gedung — perpustakaan ini diharapkan akan memberi sinar terang pula dalam kita memecahkan masalah yang — dihadapi oleh bangsa — dan — negara kita," katanya.

M. THORIQ

Perpustakaan Pasca (kiri): Baru, bersih, mewah. Sebelahnya, perpustakaan "Benteng Portugis" unit II: Arsitekturnya tak keruan.

Sebelum peresmian, **Prof. Dr. Ir. M. Adnan,** Dekan Fakultas — Pasca Sarjana melaporkan tentang proses pembangunan gedung perpustakaan tersebut. "Pembangunan gedung ini ternyata selesai dua minggu lebih cepat — dari waktu yang telah direncanakan.
Dengan menelan biaya lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu rupiah untuk pembangunan gedung dan enam puluh delapan juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah untuk perabot pengisinya," jelasnya.

WALUYO TS

Dra. Murianti

Dilaporkan, gedung bertingkat tiga ini dibangun di atas tanah seluas 2080 m2, menampung koleksi-koleksi berupa : buku-buku wajib, referensi, jurnal, hasil penelitian, *mikrofiche*, audiovisual, majalah-majalah dan sebagainya. Dalam pengoperasiaannya, perpustakaan ini dilengkapi dengan komputer dan digunakan sistem terbuka. "Jadi mahasiswa S 2 dan S 3 bebas memilih bahan yang akan digunakan," kata Dekan Pasca Sarjana.

"Namun, hambatan yang kita hadapi adalah mahasiswa Pasca Sarjana sekarang jumlahnya 1500 orang. Menurut standar internasional *ACRL* (Association of College and Research Libraries - red) perpustakaan Pasca Sarjana ini seharusnya mempunyai koleksi sebanyak minimal 900.000 volume, sedang saat ini kita baru memiliki 15.000 koleksi. Jadi seumpama — kita ingin memenuhi standar tersebut, misalnya setiap tahun disedia—kan biaya 200 juta rupiah dan kita umpamakan harga buku 50 ribu rupiah sebuah, maka kita masih membutuhkan— waktu 200 tahun," tutur Adnan disambut senyum hadirin.

Keadaan Perpustakaan UGM

Mengenai rencana sentralisasi perpustakaan UGM, pada kesempatan terpisah, pimpinan perpustakaan UGM, **Dra. Murianti, MLS** (Master of Library Science) menjelaskan bahwa dalam waktu yang tidak lama lagi akan dilakukan pemusatan perpustakaan. Dalam hal ini perpustakaan fakultas disentralisasikan di perustakaan pusat. Selanjutnya perpustakaan fakultas menjadi *reference library*, yaitu perpustakaan yang benar-benar hanya berisi bahan-bahan pegangan dosen. "Hal ini dilakukan di samping untuk melaksanakan PP 5 yang antara lain menyangkut penyederhanaan tata kerja di lingkungan PT, juga untuk menghindari terjadinya *overlapping* dalam penggunaan perpustakaan. Jadi di perpustakaan Ekonomi misalnya, ya yang ada hanya bahan-bahan referensi yang berhubungan langsung dengan masalah-masalah ekonomi. Bahan-bahan lain seperti statistik, sosiologi, yang memang juga menjadi koleksi di perpustakaan ekonomi, nantinya harus dipindahkan ke perpustakaan pusat," Murianti menjelaskan.

Ditambahkan, adapun koleksi-koleksi yang akan dipusatkan itu meliputi koleksi dari 21 perpustakaan fakultas plus UPT komputer dan UPT perpustakaan. Sedang untuk koleksi perpustakaan lembaga-lembaga di lingkungan UGM tidak termasuk disentralisasikan, karena perpustakaan lembaga-lembaga itu sudah mengkhususkan satu bidang.

Dikatakan lebih lanjut, menurut hasil perhitungan terakhir, koleksi buku di perpustakaan seluruh UGM tercata 180.543 judul dengan 349.572 eksemplar, dan untuk majalah tercatat 6.560 judul. "Jadi ya cukup memprihatinkan, mengingat jumlah mahasiswa yang cukup banyak, sehingga sering para mahasiswa yang ingin meminjam buku di perpustakan Unit I/II merasa kecewa, karena buku-buku yang dicarinya tidak ada. Namun demikian, saya minta mereka untuk

menulis buku-buku yang dikehendakinya itu, meskipun kami tidak punya duit. Yah, sekedar *ngayem-ngayemi* saja," ungkapnya sambil tersenyum kecut.

Ironis memang. Universitas berwarga 27 ribu lebih mahasiswa, mempunyai koleksi perpustakaan di bawah target. Dan lagi, menurut Murianti penambahan koleksi itu pun sangat lamban. "Perlu diketahui, *budget* dari universitas untuk perpustakaan pusat itu hanya 1,2 juta per tahun. Bayangkan! Dapat buku berapa? Sedang sekarang buku-buku atau majalah mahal-mahal. Ya dengan jatah itu kami bisa beli buku-buku penerbitan pemerintah yang relatif lebih murah," ungkapnya. Jadi, tambahnya, untuk mengembangkan perpustakaan pusat tersebut hanya mengharapkan hadiah-hadiah dari PBB, lembaga-lembaga atau perorangan. Itupun sulit diharapkan. Padahal di zaman informasi ini peranan buku sangat vital.

Mengeni pemanfaatan sarana perpustakaan, sejauh pengamatan Murianti, pemakai sudah menggunakan semestinya. "Optimis, karena banyak mahasiswa yang memanfaatkan, meskipun seperti di perpustakaan unit II ini, gedungnya jelek, bocor kalau hujan. Tapi, misalnya gedung ini lebih baik lagi bangunan maupun isinya, saya yakin mereka akan lebih kerasan. Terutama menjelang ujian menjadi *full capacity,*" katanya.

Di akhir penjelasannya, ia mengungkapkan beberapa kesulitan yang dihadapi perustakaan UGM yang antara lain kurangnya *budget* untuk pengembangan koleksi, perlunya komputerisasi pustakaan, profesionalisme pegawai yang masih kurang dan kurangnya perhatian terhadap perpustakaan. "Pernah para pustakawan di Indonesia mengusulkan dan disetujui oleh Mendikbud dan BKAN, tentang fungsionalisasi para pustakawan, sehingga seperti dosen, mereka juga ada *cum*-nya jika dalam waktu tertentu melakukan *penelitian* ini-itu. Hal ini berhubungan dengan profesionalisme dan jabatan. Sehingga merangsang untuk selalu bekerja keras mengembangkan perpustakaan. E...tapi setelah ada komentar 'kencangkan ikat pinggang', usulan yang telah disetujui itu dicabut, dibatalkan," keluhnya panjang. Ah, sayang... **(Rief/Lus)**

Desakan Sukadji

M. THORIQ

Gedung Unit Pelaksana Teknis Komputer UGM yang baru.

Mulai tahun ajaran 1987/1988, mahasiswa baru yang mendaftar lewat jalur SIPENMARU di FMIPA telah dapat langsung mendaftar pada Program Studi Ilmu Komputer dan mengikuti kuliahnya sejak semester I. Persiapan untuk pembukaan program ini telah dimulai sejak pertengahan tahun 1986 dan sejauh ini telah siap dengan kurikulum serta silabusnya. Dasar dari pembukaan program ini adalah SK Dirjen Dikti No. 22/DIKTI/Kep/1985 yang menyebutkan bahwa Jurusan Matematika FMIPA-UGM mendapat kesempatan untuk membuka 3 program studi yaitu Matematika, Statistika dan Ilmu Komputer.

Program studi Ilmu Komputer ini diadakan dengan tujuan agar dapat memberikan pengetahuan dan ketrampilan yang cukup untuk terjun dalam pengelolaan komputer serta dapat memberikan bekal yang cukup untuk studi lanjut dalam bidang ilmu komputer. Dengan demikian jelaslah perbedaan antara program studi ini dengan kursus-kursus komputer. Terlebih lagi dalam program studi ini diberikan dasar-dasar yang cukup dari bidang Matematika, Statistika dan Komputer. Selanjutnya akan diwarnai dengan segi perangkat lunak dan keras yang lebih ditekankan pada penguasaan perangkat lunak — beserta terapan-terapannya. Kebutuhan — untuk membuka program studi ini — terasa sudah — mendesak karena sampai saat ini komputer telah menjadi kebutuhan dalam masyarakat, terlebih lagi bagi UGM yang — telah mendapat desakan dari Dirjen Dikti **Prof. Sukadji Ranuwihardjo** untuk segera membukanya.

Kendatipun desakan akan keberadaan program studi ilmu komputer, demikian pula dengan dukungan para tenaga ahlinya terasa besar, namun *hardwarenya* belum memadai untuk saat ini. Lembaga terkait di lingkungan UGM, seperti UPT Komputer UGM dan Lab. Elektronika & Instrumentasi (Jurusan Fisika FMIPA-UGM), masih diperlukan untuk meminjamkan komputer mikronya untuk mendukung perangkat sumbangan IBM yang masih kurang memadai.

"Tenaga dosen yang akan membimbing para mahasiswa dalam program studi ini dari jurusan Matematika saja belum mencukupi," menurut **B. Susanta,** ketua jurusan Matematika FMIPA UGM. Maka dari itu akan dibantu oleh tenaga-tenaga dari Jurusan Fisika dan dari UPT Komputer UGM. Dan untuk pengembangan berikutnya diharapkan akan dapat mengirimkan tenaga ke luar negeri melalui Pusat Antar Universitas bidang Ilmu Komputer dengan bantuan Proyek Bank Dunia XVII Setidaknya ada dua dosen muda di Jurusan Fisika yang sedang memperdalam ilmu komputer di Kanada dan Inggris yaitu **Jazi E. Istiyanto** dan **Bambang Prastowo. (HL/Asd)**

Ribut-ribut Soal Asrama

Ada tiga asrama di lingkungan UGM, ketiganya menampung mahasiswa dalam jumlah relatif banyak, walau terasa kecil dibanding dengan jumlah mahasiswa UGM. Asrama **Dharma Putra** di bilangan Baciro menampung 97 mahasiswa masih dirasa kurang banyak kamar yang belum terisi. "Kami menghimbau teman-teman untuk masuk asrama," ajak **Khotim** mahasiswa sastra Arab UGM, ketua asrama **Dharma Putra.** Begitu pula **Ratnaningsih,** satu-satunya asrama putri UGM dihuni 82 mahasiswa. Maka adalah asrama **Kopma** UGM — berlantai empat — dihuni 130 mahasiswa, tentu saja belum semua kamar terisi. Dibanding **Ratnaningsih** dan **Dharma Putra,** asrama **Kopma** UGM memang unik dan menggelitik untuk dibicarakan.

Terletak di kawasan Karanggayam, jalan Kaliurang km 5,6 menempati daerah yang relatif tenang. Di sana-sini masih banyak pepohonan yang *menutupi* bangunan asrama. Berbeda dengan **Ratnaningsih** dan **Dharma Putra** calon penghuni asrama **Kopma** diprioritaskan bagi mahasiswa UGM anggota koperasi mahasiswa UGM. Pengelolanya pun tidak langsung ditangani universitas. Namun asrama mahasiswa yang merupakan bantuan presiden ini, yang dikelola pengurus Kopma UGM, suasananya *tak setenang* bangunan fisiknya.

"Kami membayar lebih mahal dibanding rekan-rekan **Ratnaningsih** dan **Dharma Putra.** Sebulan tujuh ribu rupiah. Seharusnya lebih murah, karena penghuninya lebih banyak. Sebetulnya sih nggak juga mahal, asal fasilitas asrama bisa terjamin," tandas **Fatkul Qomar,** bekas ketua asrama, yang menimba ilmu di Fakultas Farmasi UGM.

"Anda ,"tantangnya pada Balairung," bisa menyaksikan sendiri kamar mandi di lantai tiga, dua dan satu. Bocor semua. Kami pernah protes pada pengurus Kopma, tapi mereka hanya menuntut hak tanpa merealisir kewajibannya."

"Lalu selain soal perbaikan asrama, apakah tidak ada masalah lain yang mengganjal?" pancing *Balairung.*

"Pengurus Kopma birokratis! Pernah kami ikut pendidikan pers yang diadakan Fisipol UGM, karena tak minta izin, mereka mencak-mencak. Masak setiap kegiatan harus ada izin? Seharusnya mereka bisa mengerti. Saya juga heran,wakil Kopma di sini **Hanani Naseh**,malah anak IAIN. Pernah terjadi konflik, ya nggak enak juga, padahal dia orangnya baik dan alim," kata **Qomar** lagi.

"Tidak, itu tidak benar. Saya nggak tahu bahwa ada keharusan izin mengikuti pendidikan pers. Pernah mereka mengadakan kegiatan, mengundang rektor tanpa mengundang kami. Waktu rektor menanyakan pada kami lewat telepon, kami nggak bisa bilang apa-apa. Lha, undangan saja nggak ada," kata **Akhyar Abdul Muthalib,** ketua bidang keuangan Kopma UGM yang juga mahasiswa FE UGM jurusan Akuntansi.

"Soal **Hanani Naseh,** dia itu karyawan Kopma UGM yang terikat kontrak kerja. Apa ada anak UGM yang mau bekerja seperti dia? Jadi masalahnya bukan soal UGM atau tidak," sambung **Akhyar.**

"Wah soal kamar mandi bocor, itu sudah sejak pertama kali dihuni. Sebelum masuk asrama calon menandatangani kontrak untuk masa satu sampai dua tahun. Seluruh kondisi asrama kami beberkan. Nyatanya mereka mau. Bangunan tersebut merupakan Banpres. Kami diserahi untuk mengelola. Tentang bangunannya orang UGM, tak tahu masalahnya. Tidak ada studi kelayakan sebelumnya, pokoknya tinggal terima," lanjutnya menjelaskan.

M. THORIQ

M. THORIQ
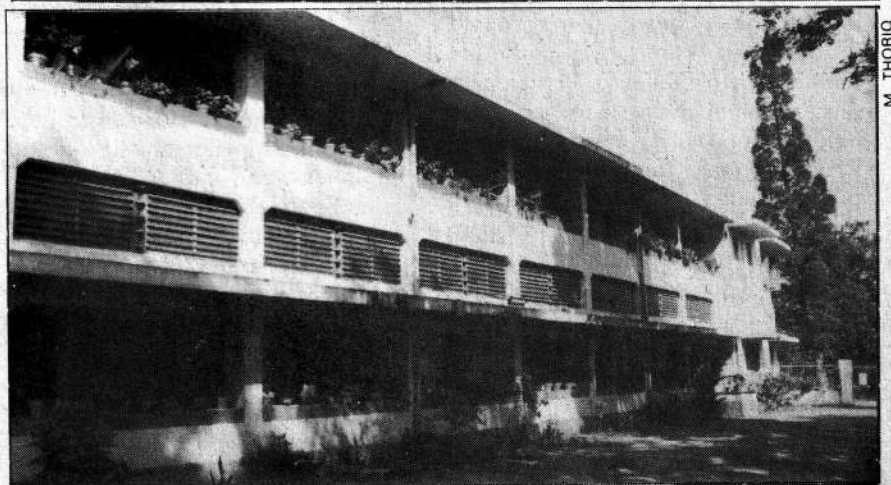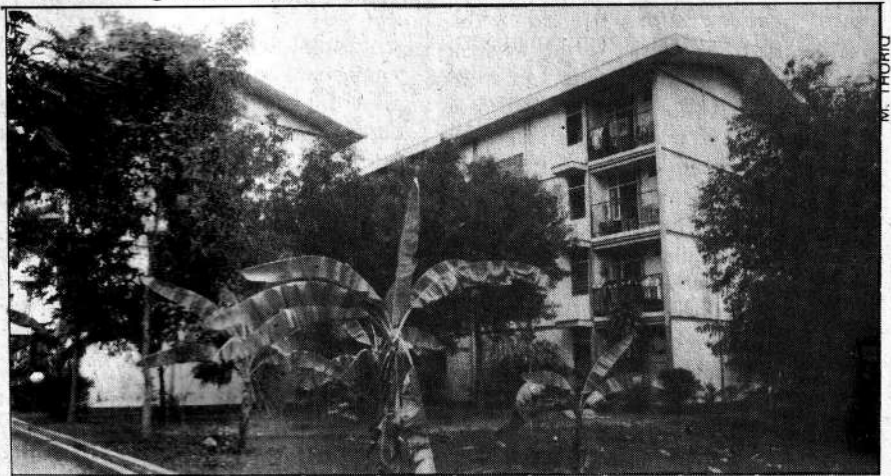
Asrama Kopma di Karanggayam, kamar mandi bocor di setiap lantai.**(atas)**. Asrama Putri Ratnaningsih. Diisukan macam macam. **(bawah)**

"Karena rusaknya permanen, tidak mungkin iuran tujuh ribu rupiah bisa digunakan untuk perbaikan yang ada. Padahal iuran itu juga untuk air, listrik, dan gaji karyawan. **Ratnaningsih** dan **Dharma Putra** karyawannya adalah karyawan UGM, jadi langsung UGM yang menggaji," ujar **Akhyar** yang berbicara lancar dan berkesan tegas.

Perbaikan, bisa diusahakan pengurus Kopma bila iuran asrama dinaikkan dua kali lipat, tapi rasanya itu pun belum cukup. Menurut keyakinan **Akhyar** mereka jelas akan menolak. "Nah, jalan keluar yang ditempuh karena ini bantuan presiden, ya kami minta dana ke pusat, kepada **Pak Cosmos Batubara** sebesar duapuluh sampai dualima juta rupiah," tegas **Akhyar.**

"Ibarat gedung SD Inpres mana mungkin dengan uang iuran siswa, kita mampu merehab bangunan yang rusak," lanjutnya beranalog.

Nampaknya kehidupan asrama yang dilingkungi tembok yang tinggi, dapat ditanggapi bermacam-macam dan kadang cenderung negatif. Misalnya saja bagi asrama **Ratnaningsih** yang terletak di Sagan itu. "Saya tidak kaget, sebab kami sudah kerapkali diisukan macam-macam," kata **Dhani** ketua asrama,**Ratnaningsih** mahasiswa Teknologi Pertanian UGM. **Ita Faizah,** salah seorang penghuni **Ratnaningsih,** terkejut saat *Balairung* mengorek benar-tidaknya isu *lesbian* di sana. "Masyaallah, lalu isu apalagi yang dilontarkan pada kami," keluh mahasiswa Fakultas Hukum UGM ini prihatin. Namun, meskipun beredar isu-isu negatif — ketiga penghuni asrama tersebut adalah warga yang cukup menjadi kebanggaan masyarakat sekitar. Bahkan **Khotim** dan **Qomar** sangat bangga menceritakan tentang hal itu.

Secara umum kehidupan asrama mahasiswa memang relatif baik, terutama asrama mahasiswa di lingkungan UGM. Kalaupun ada *riak* kecil, tak lain sekadar masalah fasilitas, seperti halnya asrama **Kopma** UGM yang tak memiliki tempat parkir dan ruang pertemuan yang sebenarnya sangat dibutuhkan. Andai bangunan asrama **Kopma** yang anggun itu, dibangun dengan studi kelayakan sebelumnya dan orang-orang UGM diikutkan.......

(af, wen, lus)

Porkas Masuk Kampus?

Terlepas masalah pro dan kontra, undian berhadiah merajalela di berbagai toko-toko. Juga berupa sumbangan berhadiah. Hadiah menggiurkan beraneka jenis, mulai dari hadiah hiburan sampai uang ratusan ribu, bahkan rumah idaman saling bersaing untuk mendapat simpati pembeli.

KOPMA UGM sebagai salah satu badan usaha tidak ketinggalan turut pula "memasyarakatkan" undian berhadian berupa beasiswa uang sebesar Rp. 100.000,- bagi pemenang pertama. Dengan beaya promosi Rp. 100.000,- disebar poster, spanduk dan melalui radio dilengkapi pemasangan kotak ditujuh perguruan tinggi meliputi, UGM, AKPRIND, APMD, IKIP SADHAR, IKIP Negeri Karang Malang, AKADEMI AKUNTANSI YKPN, IAIN, merupakan hasil kerjasama KOPMA dengan rokok **Djarum** kontrak selama dua bulan sejak 20 Mei – 12 Juli 1987. Ternyata sambutan mahasiswa cukup hangat terbukti pada penarikan pertama 15 Juni 1987 di Gelanggang Mahasiswa terkumpul setengah karung bertuliskan identitas mahasiswa disertai tempelan bungkus rokok Djarum.

M. THORIQ

Kopma UGM, tempat mengundi nasib.

Meski banyak suara bahwa itu tak mendidik dan justru menjurus judi, namun orientasi KOPMA lebih banyak pertimbangan ekonomis. "Sebagai badan usaha kita harus berusaha bagaimana mendapat keuntungan, lagi pula toh mahasiswa itu tak harus membeli rokoknya. Cukup degan menempel bungkusnya saja," ungkap **Edi Pariang,** salah seorang ketua KOPMA UGM yang menangani unit usaha. "Ini bukan amoral, langkah ini kami tempuh hanya dalam masa transisi dari segi permodalan dan penam bahan modal, sebab jika hanya bergantung usaha sendiri tak mencukupi untuk kegiatan ang gota," tambahnya dengan nada tinggi Pemasukan KOPMA selama ini didapat dari usaha toko, parkir, produksi, cafetaria, dan asrama ditambah dari sponsor.

Sedangkan **Lukman Abdul Hamid,** seorang ketua KOPMA sebagai pelaksana undian ketika ditanya *Balairung* mengatakan alasan kerjasama tersebut menjawab, bahwa KOPMA belum dikenal oleh mahasiswa sendiri, dan dengan undian ini sebagai promosi yang menarik sekaligus mendatangkan keuntungan. **Edi P.** ketika ditemui di tempat terpisah mengajukan alasan kerja sama ini sebagai perangsang Djarum untuk memasang buklet dalam setiap kegiatan anggota.

Sebelum kerjasama dengan rokok Djarum, tahun 1983 KOPMA bekerja sama serupa dengan **Bentoel** dengan hadiah berupa alat-alat penunjang studi, antara lain berupa sepeda dan kalkulator. Untuk kali ini sengaja KOPMA mengajukan hadiah berbentuk beasiswa agar dapat membantu meringankan beban mahasiswa. Dua puluh enam hadiah berupa uang tersedia masing-masing: hadiah pertama Rp. 100.000,- , 2 hadiah kedua sebesar Rp. 50.000,-, 3 hadiah ketiga sebesar Rp. 25.000,-, 5 hadiah keempat sebesar Rp. 15.000,- dan hadiah kelima sebesar Rp. 10.000,- ditambah hadiah hiburan berupa payung, tas, kaos, Menarik memang.

Pada penarikan pertama 15 Juni 1987 di depan KOPMA UGM Gelanggang Mahasiswa, dengan dihadiri pihak **Djarum** dan pengurus KOPMA serta beberapa mahasiswa **(Lus)**

Kemah Bakti Budi

Fakultas Teknologi Pertanian saat ini mulai ramai lagi dengan sejumlah kegiatan Mahasiswa.
Sejumlah mahasiswa akan mengadakan kegiatan karya bakti dengan sandi KBB III (Kemah Bakti Budi III).
Kegiatan Kemah Bakti Budi yang dilaksanakan mahasiswa TP sebagai pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi bagi masyarakat. "KKB merupakan kegiatan kemasyarakatan sesuai bidang ilmu kami dan penyelenggaraan dilakukan terus menerus oleh Sivitas akademika TP karena mauk dalam kalender kegiatan mahasiswa", jawab Ketua Umum KBB III Lilik Sutiarso. Kemah Bakti Budi yang pernah dilakukan mahasiswa TP antara lain KBB I G. Sumbing, KBB II di Lombok. Kegiatan KBB III nantinya akan diselenggarakan di Propinsi Timor Timur tahun 1988 mendatang.

Menurut Ketua Pelaksana KBB III Edmundo SSV, "Sejumlah kegiatan dengan dasar keilmuan teknologi tepat guna akan diinformasikan pada masyarakat disana". Ditanya tentang kesiapan karya bakti kali ini wakil ketua pelaksana Eddy Sumarno mengatakan, "Panitia KBB III telah dirancang dengan dukungan personal angkatan 82 sampai angkatan 85 yang terdiri dari mahasiswa dari Jurusan Pertanian". Ditambahkan, "persiapan awal telah dilakukan sejak semester lalu dengan pemilihan anggota panitia dan dilanjutkan dengan konsolidasi yang dilakukan secara rutin sampai pengiriman team perintis yang dilakukan kali ini".

Pada hari Sabtu 23 Mei yang lalu, team perintis dibawah koordinasi Ketua Umum KBB III menemui rektor UGM. Maksud pertemuan panitia KBB III dengan Rektor antara lain mengemukakan maksud kegiatan KBB di Timor Timur bagi tujuan jangka panjang mahasiswa dan hasil balik bagi Universitas serta Fakultas Teknologi Pertanian khususnya.
"Ya pada intinya Pak Koesnadi menyetujui dan mendukung kegiatan KBB III", kilah ketua perintis Iriawan Jatiasmoro dengan kesan puas.
Team perintis yang dibentuk bertugas mendata semua kebutuhan yang diperlukan rombongan dari Yogya ke Timor Timur, termasuk di dalamnya data akomodasi dan transportasi. "5 orang anggota panitia telah ditunjuk sebagai team survey ke Timor", kata ketua umum KBB. (*kir* **Eko**)

"Show Biz Mahasiswa"

Sembilan Juli 1987 di Sport Hall Kridosono, delapan grup band dari Yogyakarta dan Semarang unjuk gigi dalam malam final *Light Music* Contest (LMC) 1987 Wilayah DIY dan Jawa Tengah. Sebagai penyelenggara, diprakarsai oleh PT Nusantik (YAMAYA) yang bekerja sama dengan unit Drum Band UGM (DB UGM) selaku pelaksana. Tentu menarik disimak kiprah anak-anak muda UGM ini yang diakuinya baru pertama kali melakukan kegiatan dunia *show biz.* Paling tidak, sebagai evaluasi kerja mereka untuk masa-masa akan datang, kritik-saran sangat dibutuhkan.

Terlepas dari prestasi DB UGM yang cukup diperhitungkan di tingkat nasional, pelaksanaan LMC 1987 yang ditanganinya boleh dibilang "gagal". Dalam arti, sebagai "proyek" *show biz,* DB UGM kurang memperlihatkan profesionalisme kerja yang baik, sehingga hasil finansial yang diharapkan tidak bisa dikantungi. Ditambah lagi, panitia, dalam cara kerjanya oleh sebagian peserta dikatakan tidak konsisten. Misalnya tentang pembatasan umur peserta, domisili peserta maupun waktu setiap lagu yang telah ditentukan. Untuk hal-hal itu panitia seakan tidak bisa memegang ketentuan yang mereka tetapkan sendiri, demikian kesimpulan beberapa peserta yang diutarakan pada *Balairung.*

Memang dalam ketentuan peserta yang ditetapkan tercantum syarat, usia peserta pada saat pentas antara 17-30 tahun, sebagai pemusik amatir. Syarat itu kelihatan "tidak jelas" maksudnya. Oleh karena, apa yang dimaksud dengan cakupan amatir kurang bisa dimengerti. Bukankah ada beberapa grup peserta yang seringkali naik panggung dengan tarif tertentu? Kemudian, ada beberapa personal peserta yang tampanya sudah berumur lebih dari 30 tahun. Hal-hal inilah yang dilontarkan beberapa peserta yang kalah dalam final malam itu. Biasa. Mereka merasa dirugikan. Lalu mengungkit-ungkit persoalan.

Sedang mengenai domisili peserta, memang tidak ada syarat yang

Gama band Kapan Juara?

mengatur dalam ketentuan lomba, sehingga protes soal ini tidak beralasan. Bahkan menurut panitia yang melaksanakan amanat pemrakarsa, toh seandainya ada grup dari luar wilayah DIY dan Jateng, yang ingin mengikuti lomba, diperbolehkan, asal di wilayah ini mereka bisa menunjukkan "markasnya". Dan itu terbukti dengan tampilnya *Miracles Band* – yang akhirnya memegang *Out Standing Winner* LMC '87 DIY-Jateng – yang nota bene-nya pemusik-pemusik belia dari kota kembang.

"Kami tidak tahu, kenapa dalam *lobying* tadi, panitia menanyakan apakah ada yang mempermasalahkan batasan umur maupun domisili peserta. Apakah itu untuk menghindari protes?" ujar salah satu peserta dari Yogya, seusai final.

"Yang jelas, kami sudah melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari pihak pemrakarsa. Soal usia peserta, kalau toh sudah ada bukti nyata, apa salahnya. Mereka telah menunjukkan bukti konkret. Mengapa diungkit-ungkit?" sanggah *Ratrianto* dari panitia.

Sedangkan mengenai batasan waktu untuk setiap lagu yang dibawakan* – 10 menit untuk dua buah lagu atau 6 menit untuk sebuah lagu yang banyak dilanggar peserta, *Ratri* menjelaskan, itu tergantung keputusan dewan juri.

LMC '87 wilayah DIY-Jateng diikuti 17 grup band. Dari ke-17 peserta itu pada babak penyisihan, tanggal 8 Juni 1987, telah tersaring oleh dewan juri dari pihak YAMAHA menjadi delapan finalis yang memenuhi kriteria penjurian yang meliputi kreativitas, kekompakan dan persembahan musik secara utuh.

Memang, para finalis yang tampil pada malam final itu tampak betul-betul hasil saringan yang ketat. Masing-masing grup menunjukkan kreativitas dan kekompakannya sebagai finalis. Hanya "kecelakaan-kecelakaan" kecil saja yang terjadi dalam permainan mereka. Meski ada juga yang merasa dirugikan, karena di tengah-tengah permainan tiba-tiba *keyboard synthesizer* atau bass-nya "ngadat" tidak mau bunyi, yang disebabkan gangguan sound sistem penyelenggara. Namun, secara keseluruhan para peserta telah menyuguhkan permainannya yang terbaik.

Di hadapan penonton yang lumayan banyak, kendati undangan yang terjual tidak lebih dari seribu – malahan pada babak penyisihan kurang dari seratus – dewan juri memutuskan **DAC** Semarang sebagai pemegang *Grand Prix Winner YAMAHA LMC '87* tingkat Dealer, yang berarti mewakili wilayah DIY-Jateng ke tingkat Nasional. DAC sekaligus pula menyabet dua gelar lainnya, masing-masing **Momok** sebagai Guitaris elektrik terbaik dan **Dudut** Bassis terbaik LMC '87 DIY-Jateng.

Sedang *Out Standing Winner YAMAHA LMC '87* diperoleh **Miracles Band** Yogyakarta. Grup *hijrahan* kota Bandung yang mempunyai personal paling muda-muda usia. Di dalam permainannya yang begitu mempesona, direbut juga drummer terbaik lewat gebukan stik **Diki**, dan pemain keyboard terhandal, **Doddy**. Selain gelar-gelar itu, hanya vokalis terbaik yang lepas dari kedua grup yang memang dalam penampilannya menyuguhkan instrumental. Gelar ini direbut **Adelyna Ameliala** (mahasiswa FK UGM) dari **Januari 17 Band** Yogyakarta. Sayang, **Gama Jazz Band** yang ikut final, belum mampu menyodok grup-grup lainnya. Malam final itu dimeriahkan dengan permainan manis grup pemenang LMC '86 tingkat Nasional, **EMERALD Band** dari Jakarta.

Dengan berakhirnya LMC '87 DIY-Jateng tersebut, lahirlah grup-grup band kawula muda yang cukup berpotensi. Di samping juga pengalaman yang baik buat unit DB UGM yang sudah "berkeras ria" bekerja untuk yang terbaik. Jangan putus asa.

(Rief/Far)

sambil lalu.....

PELANTIKAN di KH UGM

Fak. Kedokteran Hewan UGM tanggal 27 April 1987 telah melantik 32 orang lulusan periode 1987 di Gedung Pertemuan UGM. **Prof. Dr. Susanto Mangku Wijoyo, Msc.** selaku Dekan dalam sambutannya mengatakan bahwa Fak. Kedokteran Hewan selama ini telah meluluskan sebanyak 884 orang, dengan masa Studi tercepat 5 tahun 9 bulan dan paling lama ditempuh 14 tahun 2 bulan.

Pada acara pelantikan itu diberikan tanda penghargaan kepada **Drh. Dewi Rosawatu Martoseno Natalia** sebagai lulusan terbaik periode 1987. Disampaikan pula dana dari Alumni kepada Fakultas sebanyak Rp. 50.000,-

Acara tersebut berlangsung mulai pk. 10.00 hingga pk. 13.00 dengan dihadiri Dekan Fak. KH dan anggota keluarga dari lulusan yang baru saja dilantik. **(LUSY)**

PELANTIKAN PENGURUS PSM UGM

Rektor UGM, Prof. Dr. H. Koesnadi Hardjasoemantri, S.H. tanggal 12 Mei 1987 melantik pengurus Keluarga Paduan Suara Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (PSM UGM) periode 1987-1988 di Wisma Sejahtera, Kaliurang.

Sebelum pelantikan, **Hero Darmawangsa** selaku ketua PSM UGM periode 1985-1987 dihadapan para pembina dan anggota melaporkan pertanggungjawaban pengurus lama yang meliputi hasil kegiatan program-program kerja yang telah dilaksanakan, pelimpahan wewenang dan inventarisasi. Dikatakan, selama periode 1985-1987, PSM UGM telah mengikuti berbagai kegiatan baik pementasan rutin maupun pementasan untuk lomba dan pentas menghibur.

Adapun susunan pengurus yang dilantik itu, sebagai Ketua I **Hasto Binuko** (Fisipol), Sekretaris I **Nandang Santosa** (FNT), Bendahara I **Yani Astuti** (T. Kimia). Masing-masing didampingi wakil serta dilengkapi dengan seksi-seksi. **(Rief)**

MEMPEREBUTKAN TROPHI REKTOR

Dalam rangka memperingati HARPERNAS 1987 pada bulan Mei kemarin, Himpunan Mahasiswa Arkeologi (HIMA) Fakultas Sastra UGM telah mengadakan Lomba Tulis Kepurbakalaan Tingkat SMTA Se-DIY. Kegiatan tersebut sekaligus untuk menggiring pelajar SMTA agar mencintai benda-benda peninggalan purbakala sebagai warisan budaya peninggalan nenek moyang. Selain itu, juga untuk memberikan wadah pelajar SMTA menyalurkan gagasan, ide dan pengetahuannya tentang arti pentingnya nilai benda-benda purbakala.

Kegiatan lomba tulis yang baru pertama kali diadakan HIMA tersebut untuk para pemenangnya disediakan Trophi Rektor UGM, trophi Dekan Fakultas Sastra, trophi Kantor Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala DIY, trophi Jurusan Arkeologi FS UGM, trophi Balai Penelitian Arkeologi Yogyakarta, dan trophi Ikatan Ahli Arkeologi Indonesia (IAAI) Komda Jateng-DIY. Selain trophi, para pemenang juga mendapatkan bingkisan berupa paket buku-buku dari Gadjah Mada University Press dan Proyek Javanologi Yogyakarta. Adapun sebagai Juara I adalah **Sarjimin** siswa STM Pembangunan Mrican Yogyakarta, yang sekaligus memboyong Trophi Rektor UGM. (ms)

PPC.

Sebanyak 27 orang anggota Publisia Photo Club (PPC) Jurusan Komunikasi — Fisipol — UGM, mengikuti ujian kenaikan tingkat dari fotografi dasar 1 ke fotografi dasar 2.

Ujian tersebut diawali dengan ujian praktek ke Dieng yang dilaksanakan pada 26 April 1987 yang lalu. Sedang ujian teori dilaksanakan pada tanggal 1 Mei 1987.

Didiek Budiarta, selaku instruktur PPC mengatakan bahwa sebagai prasarat untuk mendapatkan 'Bintang Satu', para peserta juga diwajibkan untuk menyerahkan sebanyak 3 lembar foto 'accepted' dengan ukuran 10 R. Selain itu, penilaiannya juga berdasarkan nilai tertulis sebanyak 40%, praktek·30% photo accepte 30% serta aktivitas lainnya. **(wen)**

DISKUSI UNUD-UGM

Dalam rangka studi perbandingan jurusan Sastra Indonesia Fakultas Sastra Universitas Udayana ke UI, UGM, dan Undip pada tanggal 19-28 Juni 1987, Sabtu 27 Juni 1987 mampir di Fakultas Sastra UGM mendiskusikan Sastra dan Linguistik. Tampil sebagai pemrasaran **I Komang Gede Indra** dan **Ida Bagus Artha Adhyana** dari Unud dengan membawakan makalah masing-masing *"Pandangan Dua Dunia Cerpen Iwan Simatupang, Tinjauan Selintas Strukturalisma Genetik"* dan *"Kategorisasi Morfologis Nomina Bentuk pe dan pe (N) dalam Bahasa Indonesia"*. Dari UGM tampil **Kris Budiman** dengan makalahnya *"Sketsa untuk Nyanyian Angsa Karya Rendra"* dan **Aprinus Salam** dengan makalanya yang berjudul *"Matematisasi Ilmu Sastra"*.

Diskusi yang dihadiri para dosen dan mahasiswa tersebut terlihat sedikit *gersang* disebabkan masa liburan banyak mahasiswa yang pulang kampung. Yang jelas, menurut **Arief Santosa,** ketua pelaksana penyambutan, mengatakan bahwa adanya diskusi ini dapat menambah persaudaraan antara UGM dan Unud.

(Lus)

GANTI PIMPINAN

Kepemimpinan majalah mahasiswa Teknik Sipil UGM *CLAPEYRON* diserahterimakan tanggal 20 Juni lalu. Acara serah terima ini selain dihadiri oleh seluruh pengurus lama dan baru majalah CLAPEYRON, juga dihadiri antara lain oleh pengurus Jurusan TS FT UGM, utusan Kanwil Departemen Penerangan DIY, para pengurus majalah lain di lingkungan UGM dan dari BALAIRUNG. Memberi sambutan pada acara tersebut, berturut-turut Pemimpin Umum lama dan baru CLAPEYRON, Ketua Umum KMTS, Ketua Jurusan Teknik Sipil FT UGM, Kabid Pers Deppen dan Pemimpin Umum BALAIRUNG/Ketua Unit Pers Mahasiswa UGM.

Pimpinan yang melakukan serah terima tersebut adalah **Arif Wisaksono** (Pemimpin Umum), **Ateng Johari** (Pemimpin Redaksi), **M. Saleh** (Pemimpin Litbang) di pihak yang lama kepada **Cholid Machmud** (Pemimpin Umum), **Tri Budi Utomo** (Pemimpin Redaksi) dan **Rachman Hidayat** (Pemimpin Litbang) sebagai pengurus baru. Dengan selesainya tugas pemimpin lama tersebut otomatis saat ini Arif, Ateng, dan Saleh masuk ke jajaran penasehat. **(ah)**

M. THORIQ

Ulah Mahasiswa. *SK Rektor tentang Kalender Akademik yang diterjemahkan menjadi Kalender Akademik yang siap dijual, saat heregistrasi.*

Sebuah Keanehan

Antara Dosen teladan dan KAGAMA

*Setiap tahun UGM mempunyai tradisi memilih mahasiswa dan dosen teladan. Berikut pendapat seorang dosen teladan UGM tahun 1986/1987, **Drs. Ngatidjo Hadipranoto,** SU dari FMIPA UGM.*

Pandangan Bapak terhadap KAGAMA?

Saya belum tahu persis kegiatan KAGAMA yang ada, walau secara otomatis saya anggota KAGAMA, selaku anggota saya ingin menyumbangkan darma bhakti kepada almamater, itu suatu hal wajar. Saya membuktikan bahwa saya bekerja di sini sedikit banyak me – nyumbangkan apa yang ada pada saya untuk almamater.

Harapan-harapan Bapak terhadap KAGAMA?

Sebagai alumnus sebagai orang Gadjah Mada mengharap peran KAGAMA pada almamaternya bisa lebih meningkat, walaupun saya tahu mengurus KAGAMA bukanlah hal yang mudah, anggotanya tersebar di seluruh Nusantara. Tapi sumbangan nyata itu diperlukan.

WALUYO TS

Pembangunan Wisma KAGAMA Tahap II sudah menampakkan hasilnya.

Nyata dalam hal apa?

Sumbangan nyata yang saya maksud misalnya di universitas sendiri, atau saya orang MIPA misalnya mengang - gap laboratorium yang ada jumlahnya kurang juga problem sekitar pengelolaannya, kalau kita mengharap pemerintah saja, terutama dalam pemeliharaan selanjutnya dan pengembangannya, akan mengalami kesulitan. Dalam hal ini apakah KAGAMA tidak bisa berperan secara nyata, misal sumbangan ilmiahnya secara teknis, misalnya ada peralatan yang rusak, atau mungkin anggota KAGAMA yang berpengalaman di bidang masing-masing bisa membantu, baik material atau mengembangkan dan memperbaiki laboratorium-laboratorium yang ada.

Mungkin sudah banyak dilakukan Pak, tapi langsung fakultas memanggil alumninya, bukan lewat KAGAMA.

Kalau administrasi KAGAMA itu cukup baik bantuan dalam bentuk apapun mestinya tidak langsung. Agar mekanisme kerjanya benar mestinya lewat KAGAMA. Kalau administrasinya baik, walau lewat KAGAMA toh akan sampai. Lain halnya kalau administrasinya tidak baik mungkin melalui jalan pintas. Tentu saja dalam hal ini kita harus melihat apakah adminitrasi KAGAMA sekarang ini baik atau tidak. Untuk itu saya tidak tahu, saya belum bisa menilai. Perlu diketahui bahwa secara global saya tidak tahu banyak tentang KAGAMA. Mungkin karena administrasi KAGAMA yang kurang lengkap sehingga banyak yang mengambil jalan pintas itu. Tapi saya tidak mengatakan administrasi KAGAMA kurang baik, tidak! Kalau bantuan itu lewat mekanisme yang benar, mestinya tidak langsung, tidak jalan pintas, tapi lewat KAGAMA. Tapi jangan salah terima bahwa saya mengatakan jelek.

Apakah KAGAMA sudah tidak diperlukan?

Saya kira masih cukup perlu, sebab bagaimana juga harus ada komunikasi antara alumni dengan almamaternya, wadah komunikasi itu paling tepat lewat sana.

Menurut Pak Ngatidjo, saluran apa yang paling sesuai yang bisa digunakan? Lobying?

Saya kira lobying-lobying KAGAMA! Seperti kita tahu bahwa cabang-cabang KAGAMA ada di setiap daerah, atau propinsi. Tapi lobying dalam bentuk apa? Seperti tadi saya katakan bahwa mungkin saja saya kurang aktif atau saya kurang dikenal di KAGAMA. Terus terang sebagai anggota sampai sekarang sudah 11 tahun jadi alumnus saya tahu belum ada komunikasi. Apakah itu ada pertemuan alumni di Yogyakarta sendiri misalnya KAGAMA pusat di Yogyakarta menurut saya belum pernah ada pertemuan. Saya tidak tahu, apakah saya tidak tahu, apakah saya kurang aktif ataukah saya tidak dikenal, saya tidak tahu, tapi kelihatannya memang belum ada. Dalam hal ini sebetulnya saya mengharapkan sekali agar ada pertemuan-pertemuan semacam itu. Pertemuan anggota yang ada di Yogya misalnya. Tapi sampai sekarang menurut ingatan saya, belum pernah diajak atau mendapat undangan. Makanya saya katakan, apakah saya yang tidak dikenal atau yang diundang hanya orang-orang tertentu saja, saya tidak mengerti. **(Bal)**

Ir. Rijanto PH

PRESDIR. PT CAKAR BUMI

Harus Berani 'KLELEP'

Ketika *Ir. Rijanto* memutuskan untuk tidak bekerja pada pemerintah, banyak dosen dan teman-temannyua menentang. Rijanto waktu itu memutuskan untuk bekerja di swasta meski negara sangat membutuhkan sarjananya untuk menjadi pegawai. "Wiraswasta is a must" kata Presiden Direktur PT Cakar Bumi dan RPH Parners ini ketika ditemui Clapeyron di ruang kerjanya. Apalagi pada saat sekarang, sambungnya lagi, Indonesia sangat membutuhkan pertumbuhan ekonomi yang pesat. Swastalah yang harus mendukungnya. PN, swasta dan koperasi adalah tiga unsur pendukung ekonomi Indonesia, kalau salah satunya tidak berjalan tidak akan betul. Pemerintah wajib mengarahkan dan mengatur, tetapi untuk melaksanakan tidak harus pemerintah. Tentang tenaga kerja misalnya, swasta bisa menampungnya, tidak mungkin semua ditampung negara. Hanya hal-hal yang langsung menyentuh rakyat kecil saja yang perlu dikelola pemerintah, dan di sini lantas rakyat banyak diperhatikan juga. "Kalau semua sarjana jadi pegawai negeri berapa budged negara yang harus dikeluarkan, dan

mereka lantas suruh kerja apa?" tanya Ir. Rijanto yang kelahiran Teluk Betung ini.

Meskipun orang tuanya asli Jawa tetapi Rijanto ini dilahirkan di Teluk Betung. Tanggal 22 Maret 1925. Pada masa mahasiswa Pengalamannya mulai menumpuk, hasratnya mulai berhamburan. Pribadinya semakin menonjol di antara teman-temannya. Ia masuk di *Gasema* (Gabungan Sekolah Mataram) dan aktif di Senat maupun *Corps Mahasiswa* (CM). Jabatan Sekjen IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) Pusat juga di tangannya waktu itu. Di lingkungan tentarapun ia sempat berpartisipasi sebagai Letnan Dua, tapi lantas keluar lantaran pingin meneruskan kuliah dan menjadi orang sipil. "Teman-teman sekeerja dulu, kini ratarata sudah Mayjen" ungkapnya mengenang. Sumantri Brojonegoro almarhum bekas menteri P dan K juga teman baiknya semasa muda, tapi hanya sempat kuliah di UGM selama setahun kemudian ia belajar di negeri Belanda. Kegemarannya berorganisasi sewaktu mahasiswa ternyata tak luntur dimakan umur. Ir. Rijanto pernah sebagai ketua PII (Persatuan Insinyur Indonesia) Jakarta. Kemudian Sekretaris PII Pusat. Juga pernah menjabat sebagai ketua PKTP (Persatuan Konsultan Teknik Pembangunan) di mana Prof. Rooseno menjadi bendaharanya. Kemudian sebagai Wakil Ketua HAKI (Himpunan Ahli Konsultan Indonesia) Pusat. Konon tidak sedikit pengalaman menarik di Organisasi-organisasi tersebut. Masa mahasiswa menurut Ir. Rijanto merupakan masa yang meng-

esankan. Nasehatnya: "Jangan sia-siakan". Sebagai mahasiswa harus berusaha menjadi yang top di kelas. "Tetapi jangan hanya karena membaca dan belajar saja, itu nggak kena dan nggak sulit. Usahakan untuk berorganisasi ketika mahasiswa, harapnya. Mahasiswa adalah orang belajar untuk segalanya; untuk ilmu, untuk bergaul, untuk organisasi. Di sini pribadinya digembleng dalam persiapan menjadi "manusia". Ia harus sudah mulai mencari prinsip hidup lewat pemikiran dan pengalaman di sana-sini, ini itu. Setelah lulus nanti Ir. Rijanto berkeyakinan, mereka harus bisa memimpin. Memang, sebenarnya merekalah manusia-manusia terpilih di antara sekian juta rakyat. Pribadinya nanti turut menentukan bobrok tidaknya tatanan masyarakat yang mayoritas lebih "bodoh" dan miskin. Idealisme mereka nanti akan diuji lewat benturan-benturan di masyarakat, mereka akan disodori kenyataan. " Mereka nanti akan memimpin" kata Ir. Rijanto yang P. Hadmodjo ini. Lha di mana belajar memimpin, ya di organisasi itu, ungkapnya menyambung. Pokoknya segala macam organisasilah. "Memimpin itu tidak gampang lho, ia menghadapi bermacam perangai" sambungnya lagi seperti menuturkan pengalaman. Coba belajarlah organisasi, menjadi anggota aktif pun sudah cukup. Rupanya nasehat untuk berorganisasi juga dicanangkan kepada seluruh putranya. Ir. Rijanto memperbolehkan mereka terlambat kuliah barang beberapa tahun, asal tahun "reserve"nya itu dikarenakan untuk organisasi. "Tapi ya jangan lebih dari delapan tahun" timpalnya cepat-cepat.

Begitu lulus Teknik Sipil UGM tahun 1953 Ir. Rijanto langsung masuk PT Intraport, sebuah perusahaan swasta nasional. Di sinilah reaksi dari dosen dan teman-teman muncul menentang. Ia orang pertama yang tidak bekerja sebagai pegawai negeri waktu itu. Pada masa-masa itu pemerintah betul-betul sangat membutuhkan pegawai sehingga tindakan pemuda Rijanto dianggap aneh oleh orang lain. Boleh dicatat bahwa semua sarjana Teknik Sipil UGM generasi awal menjadi pegawai negeri. "Semasa kuliah memang saya tidak mengambil Ikatan Dinas pada pemerintah, jadi bebas", katanya terus terang. Hal ini diakuinya bukan karena ia rasa kaya. Waktu mahasiswa ia "Nyambi" mengajar di dua SMA dan dua STM di Yogyakarta. Gaji mengajarnya cukup untuk memenuhi segala tetek bengek keperluan kuliah, termasuk SPP-nya tentu saja. Saya tidak senang tergantung orang lain, bukan karena saya kaya" jelas Ir. Rijanto lagi.

Setelah dua tahun bekerja di Intraport bapak dari empat anak ini memisahkan diri dan mendirikan Inconeb (Indonesian Consulting Engineering Beureau). Perusahaan ini ia pimpin sendiri hingga tahun 1975. Cukup lama juga. Pada tahun 1975 ini ia mendirikan RPHJ Partners dengan mengambil spesialisasi cakar ayam bagian fondasi (tidak termasuk pavement). Sedang nama itu sendiri ia ambil dari singkatan namanya.

Untuk lebih mengembangkan sistem fondasi Cakar Ayam (CA) Ir. Rijanto bersama teman-temannya tahun 1978 mendirikan sebuah perusahaan yang diberi nama *PT Cakar Bumi*. Perusahaan ini merupakan perusahaan konsultan yang menangani pavement-nya.

Kenapa kedua perusahaan yang ia pimpin menangani CA? Ceritanya begini, pada tahun 1961 Prof. Ir. Sedijatmo mendapat perintah negara untuk mendirikan menara listrik jaringan transmisi bertegangan tinggi di daerah Ancol, yang notabene merupakan daerah rawa (bertanah lunak). Waktu itu dalam rangka mempersiapkan prasarana Asian Games 1962. Menara listrik tersebut harus selesai dalam waktu singkat, menghubungkan stasiun tenaga listrik di pelabuhan Tanjung Priok dengan arena olahraga di Senayan. Waktu itu daerah Ancol merupakan daerah rawa-rawa, akan sangat sulitlah bila pengerjaan fondasi menggunakan cara konvensional. Maka harus ditemukan suatu metode untuk mengatasi ini.

Pada pagi yang cerah Ir. Sedijatmo memperoleh ide bagus dari hasil renungannya dengan diiringi alunan gending Jawa. Menara di atas rawa dapat didirikan di atas slab beton dengan pipa-pipa beton di bawahnya yang dihubungkan secara monolit menancap ke bumi. Dan lahirlah fondasi Cakar Ayam. Fondasi ini lebih murah dan lebih cepat pelaksanaannya daripada tiang pancang yang telah digunakan terdahulu. Bahkan informasi terakhir mengatakan bahwa sistem ini juga baik digunakan di tanah keras. Memang beaya pembangunannya lebih mahal, tetapi dilihat dari beaya maentenance selama sepuluh tahun akan terasa keunggulannya.

Prinsip fondasi CA adalah memanfaatkan tekanan tanah pasif yang tidak pernah dimanfaatkan dalam sistem fondasi lain. Slab beton tipis mengapung di atas tanah, kekakuannya secara vertikal, meneruskan tekanan tanah pasif yang diterimanya dari tanah.

Kombinasi slab dan pipa di dalam tanah ini membentuk sebuah konstruksi yang kaku, tidak mudah dibengkokkan. Berbeda dengan slab yang menggunakan stiffening beam, yang terakhir ini mempunyai sifat kaku jika diletakkan di atas tanah karena memang telah mempunyai internal stiffeness. Sedang kekakuan konstruksi CA diperoleh dari tekanan tanah pasif. Akibat yang menguntungkan adalah berkurangnya volume beton bertulang, karenanya lebih ekonomis untuk kapasitas dukung yang sama.

Pipa-pipa di bawah slab beton tidak untuk mendukung slab seperti halnya fondasi pit, tetapi untuk memberi kekakuan pada slab, dan pipa-pipa ini tidak mencapai tanah keras tapi malah berpegangan pada slab. Jadi pipa-pipa pada CA merupakan pengaku slab dan bukannya pendukung slab.

Begitulah CA penemuan seorang putra Indonesia, Sedijatmo yang dewasa dan kreatif karena keadaan. Sedijatmo dulu juga mengajar Rijanto ketika masih kuliah di UGM. Waktu itu beliau mengajar Bangunan Tenaga Air. Di sinilah mereka saling mengenal dan kemudian saling akrab. Pada masa-masa selanjutnya Ir. Rijanto selalu membantu Prof. Sedijatmo dalam proses kelahiran CA. Dari sinilah mengapa Ir. Rijanto mendapatkan kepercayaan penuh dari sang Profesor untuk mengembangkan CA. "Kalau bayi lahir Pak Sedijatmo itu dukunnya dan sayalah asistennya" kata Ir. Rijanto.

Ditanya tentang prinsip hidupnya Ir. Rijanto menuturkan bahwa sebagai manusia kita harus berani cepat mengambil keputusan. Semua itu memang mengandung resiko. Kalau kita memutuskan kemungkinan benar masih 50%, fifty-fifty. Tetapi kalau tidak memutuskan kemungkinan benar sudah tidak ada, nol persen. Dan menurut Ir. Rijanto orang luntuk dapat memutuskan secara tepat dituntut pengetahuan yang luas. Dan suatu hal yang tidak boleh ditinggalkan adalah kepercayaan pada diri sendiri. Kasus CA dapat dijadikan contoh. Kita mempunyai kepercayaan bahwa kita telah mempunyai kemampuan dalam penemuan teknologi, kita harus buktikan itu. Tetapi menurut penuturan Ir. Rijanto, yang di kamar kerjanya tergantung peta Indonesia ini, memang tidak sedikit orang kita yang tidak berpikiran progresif. Mereka bilang: "Kok berani-beraninya pakai Cakar Ayam yang belum pernah dipakai orang-orang luar negeri". Nah, Ir. Rijanto berpendapat biasanya mereka ini takut gagal, takut ditertawakan orang. Itu tidak benar! Kalau gagal bangkit lagi! Kalau ada teman kita yang gagal, ya ditolong dong, atau diberi semangat, jangan ditertawakan. Bayi bisanya berjalan 'kan harus jatuh-bangun dulu, orang pengin bisa renang harus berani "klelep" berulang kali. Kita harus perlcaya diri bahwa kita punya kemampuan jangan selalu mengekor orang luar. Biarlah orang luar sekali-sekali belajar teknologi pada kita.

Dan dalam hal Cakar Ayam ini ternyata negara-negara luar berterus terang ingin belajar kepada Indonesia. Tidak kurang dari Perancis dan Jepang. ●

(ahd p)

olah raga

LABORATORIUM SILAT BUKAN KERINDUAN

"Pencak silat jadi milik dunia! Pencak silat, warisan budaya leluhur kita, dikenal, digemari dan dipelajari oleh bangsa-bangsa di luar Indonesia." Seabad yang lalu, slogan di atas diangap terlalu *utopis*. Saat itu kita sedang terjajah. Belajar silat harus sembunyi-sembunyi, silat terlarang untuk diajarkan. Pencak silat diajarkan dalam lingkungan terbatas secara orang perorangan. Kerinduan memasyarakatkan, lebih-lebih lagi men"duniakan" pencak silat, terasa sebagai harapan yang muskil.

Namun sekarang, kita tidak perlu berkecil hati lagi. Titik-titik terang kemajuan pencak silat sebagai salah satu cabang olah raga dalam menapaki dunia internasional kian nyata.

Perguruan-perguruan silat Indonesia ada belasan di luar negri. Kita bisa menyebut negara-negara seperti Belanda, Jerman, Belgia, Spanyol sebagai contohnya. Itu dari Eropa. Dari Amerika? Australia? Asean? Invitasi silat internasional pun sudah empat kali dilaksanakan.

Dan kabar yang tak kalah penting adalah rencana mendirikan laboratorium silat IPSI, pengelolanya UGM. Pokok soal inilah yang dilaporkan *Balairung* atas hasil laporan reporter Titi Savitri, Sri Aditya dan Eko Djunaedi sekaligus merangkumnya.

Anda pasti tahu apa yang namanya trenggiling. Trenggiling adalah binatang yang mempunyai taktik khas dalam menyelamatkan diri; yaitu berlagak pura-pura mati dengan menggulung badannya. *Kalau pesilat Trenggiling?*

Pesilat trenggiling adalah pesilat yang menang pertandingan karena pura-pura KO. Karena dalam pertandingan silat ada aturan yang — sungguh sayang — mengatakan bahwa pesilat yang terpukul di *daerah terlarang* sehingga KO malah memenangkan pertandingan! Kelemahan aturan inilah yang sering dieksploitasi oleh *pesilat Trenggiling* alias pesilat *salon*, untuk meraih kemenangan. Berlagak terpukul kepalanya, KO, "harus istirahat", dan ... tampil di final dengan segar bugar! Selain *pesilat trenggiling* ada juga pesilat pemburu (nilai) yang acap kali tak mengindahkan esensi gerakan-gerakan silat yang murni dan hanya "bag-bug".

Untunglah IPSI tidak tinggal diam melihat kejadian di atas. Rencana-rencana penyempurnaan dan pembakuan aturan pertandingan akan ditegaskan lagi, dan IPSI tidak main-main dalam hal ini. Sebuah laboratorium silat yang melibatkan unsur akademisi/ilmuan didirikan untuk membenahi, membakukan dan mengeksploitasi silat Indonesia.

Keputusan penting ini diambil IPSI sesudah seminar sehari PB IPSI di Jakarta, 25 November 1986 lalu, dengan meminta kesediaan Prof. Dr.

Koesnadi Hardjasoemantri, SH. — pembawa makalah — tentang ide membuat laboratirum Pencak Silat di Yogyakarta yang pengelolaannya diserahkan pada Universitas Gadjah Mada. "Tapi tidak masuk lembaga struktural universitas," demikian dijelaskan Koesnadi. "Dengan demikian biaya dari IPSI, dan UGM hanya menyediakan tanah," lanjut Rektor UGM ini.

Diikutkannya Perguruan Tinggi dalam pembentukan laboratorium ini karena laboratorium adalah sarana penelitian dan pengembangan. Sehingga dengan sendirinya universitas punya kaitan yang erat.

Kenyataannya pesilat kampus tidak lagi monopoli mahasiswa, tetapi juga para dosen. Kemajuannya pun cukup mengembirakan. Adanya Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadikan para pesilat di kampus dapat dimanfaatkan sebagai pelaku dan pemikir. Kepada *Balairung,* Koesnadi menerangkan tujuan pembentukan laboratorium ini adalah untuk :

IST

Dari kiri ke kanan: M.P. Eddy Moeljono (pembina silat UGM), Ir. Suwandi Indanu, Rektor UGM, dan Syaukat Ali (Ketua Harian IPSI DIY) sedang membincangkan rencana pembuatan Laboratorium silat UGM di kamar Rektor.

1. Menganalisa gerakan pencak silat secara ilmiah.

Sejauh ini pemanfaatan pencak silat belum meluas, masih berkisar pada murid-murid silat itu sendiri. Oleh karena itu perlu diadakan inventarisasi dan pengujian gerakan silat secara ilmiah agar kemudian bisa diramu dan dijadikan gerakan yang meluas dan diterima oleh semua pihak.

2. Pendokumentasian gerakan pencak silat.

Kebanyakan para pendekar di Indonesia sudah tua dan tidak biasa menulis atau mendokumentaskan pengetahuannya dalam pita video. Yang sering terjadi adalah pelajaran diberikan secara langsung oleh guru kepada muridnya secara perorangan. Sehingga sangat mungkin suatu ketika ilmu tersebut menjadi hilang. Di sinilah peran pendokumentasian gerakan pencak silat oleh lembaga laboratorium dibutuhkan. Dalam hal ini UGM mengadakan hubungan kerja sama dengan MMTC (Multi Media Training Centre), milik Departemen Penerangan, yang terletak di jalan Magelang, Yogyakarta.

Tahun lalu perjanjian tersebut sudah ditandatangani oleh **Willy Karamoy** sebagai pemimpin MMTC, dan dikemukakan bahwa berbagai bidang yang didokumentasikan itu termasuk pendokumentasian gerakan pencak silat.

3. Pembakuan gerakan pencak silat.

Norma-norma baku dari gerakan pencak silat perlu disebarkan. Pembakuan adalah pekerjaan yang sulit sekali, walaupun begitu laboratorium akan berusaha melaksanakannya.

"Bagaimana seumpama ada perguruan silat yang tidak mau menyumbangkan ilmu silatnya?"

"Yah..., kita tidak bisa memaksa," demikian pertanyaan ini dijawab Koesnadi," Paling-paling kita hanya bisa menghimbau. Saya yakin, mereka lama-lama akan mengerti mengapa pembakuan gerakan itu perlu. Pembakuan dilakukan, namun ciri khas perguruan jangan sampai hilang. Masing-masing perguruan berdiri sendiri secara otonom. Jadi, bila seseorang ingin mengikuti gerakan *Cimande* dari Jabar, gerakan silat Bali atau gerakan silat Padang, misalnya.... silakan! Tapi..., patokannya perlu diketahui. Jadi laboratorium bukan melakukan pembakuan gerakan secara nasional, melainkan menulis dan membakukan gerakan khas perguruan."

4. Pembakuan nomenklatur

Ini adalah upaya untuk memberikan nama-nama gerakan yang paling tepat untuk jenis gerakan.

5. Membuat buku tentang pembakuan pendidikan dan pertandingan pencak silat.

Beberapa aspek dalam pendidikan pencak silat akan dibicarakan bersama, misalnya esensi dan bagian-bagian mana yang perlu diberikan kepada anak didik, cara-cara penilaiannya, dan sebagainya. Dalam Karate ada istilah-istilah semacam *Dan I, Dan II, Kyu* dan sebagainya, begitu pula nantinya dengan pencak silat. Ada pembakuan semacam itu.

Pembakuan pertandingan dilakukan agar pesilat tidak sekadar mencari angka tanpa mengindahkan gerakan-gerakan yang mempunyai kekhususan dan nilai seni silat. ***

Enam tahun yang lalu ide pembuatan laboratorium ini pernah muncul di suratkabar, bahkan pernah ditawarkan ke Bina Graha, dicetuskan oleh drh. MP. Eddy Moeljono, S.H PhD, pembina Unit Olahraga Beladiri UGM. Namun terjadi *kemandegan* karena persoalan dana.

Persoalan yang sama dialami **Prof. dr. Ahmad Muhammad** dari bagian Ilmu Faal Fakultas kedokteran UGM, **Prof. dr. Sumiati** dari bagian Anatomi Fakultas kedokteran UGM dan **Jumali** yang pernah pula berkeinginan mendirikan laboratorium silat. Rasanya para pembina pencak silat di tempat lain pun memiliki pikiran yang sama dan terbentur pada masalah yang sama pula, yaitu kekurangan dana.

Adalah wajar bila keberhasilan **Prof. Koesnadi** untuk mendapatkan persetujuan IPSI dalam pembuatan laboratorium silat ini diberi acungan jempol. Ide mengikutkan Perguruan Tinggi dalam laboratorium pencak silat sangattepat. Begitu pula kesediaan IPSI membiayai pembangunan laboratorium ini terasa begitu melegakan. Kini tinggal menunggu partisipasi para pesilat dan pendekar-pendekar yang berilmu untuk menyumbangkan pengetahuannya.

Lewat laboratorium ini akan didapatkan gerakan-gerakan yang ternalisis secara ilmiah. Dengan demikian kaum barat yang secara ilmiah mereka lebih maju bisa menerima pencak silat sebagai olah raga yang pantas dipelajari. "Kelemahan pencak silat kita denganluar negeri, yang utama karena tidak adanya standardisasi. Kalau kita tidak segera mendirikan laboratorium ini, jangan-jangan nantinya kita belajar ilmu silat di luar nengeri karena mereka lebih dulu menganalisa," ujar **Eddy Moeljono** kepada *Balairung mengisahkan kekhawatirannya.*

Dalam kesempatan terpisah Ahmad Muhammad mengatakan mendesaknya keperluan mendirikan laboratorium pencak silat ini. Ia pun menyiratkan betapa idealnya bila berbagai aliran (lebih kurang 850 aliran - *red*) bisa dibakukan dari pencarian dan penyatuan prinsip-prinsip gerakan yang sama lalu diciptakan gerakan-gerakan yang sifatnya universal sehingga tujuan dari pencarian dan penyatuan prinsip-prinsip gerakan yang sama lalu diciptakan gerakan-gerakan yang sifatnya universal sehingga tujuan dari setiap gerakan bisa lebih diarahkan. "Gerakan yang *clorless,*" begitu diistilahkan Eddy Moeljono.

Sayangnya penyatuanini tidak mudah, karena masing-masing pihak berusaha mempertahankan alirannya. Tampaknya yang bisa dilakukan adalah pembakuan model *Koesnadi.* Yaitu pembakuan gerak gaya 'Cimande', gaya 'Bali', gaya 'Padang', dan sebagainya. Sehingga seseorang bisa memilih *paket* silat macam apa yang ingin ia pelajari.

***

Sebuah tanah di luar kampus tapi masih tanah milik UGM, yaitu di sebelah utara selokan Mataram, hutan yang sekarang dipakai untuk keperluan menanampohonlangka,disediakan (dipilih) UGM untuk tempat pembangunan laboratorium silat itu.

Bangunan tersebut akan ada di tengah hutan buatan dan direncanakan 2 tingkat dengan luas bangunan 200 meter persegi. Lantai bawah dimaksudkan untuk administrasi dan perpustakaan. Segala macam buku disimpan di sini, baik itu dari dalam maupun luar negeri (luar negeri banyak menulis tentang pencak silat). Lantai atas adalah tempt-tempat untuk penginapan pendekar-pendekar yang diundang dan sebuah ruangan untuk diskusi.

Menurut **Prof. Ahmad Muhammad** kebutuhan fisik laboratorium silat selain ruang peraga adalah video untuk menganalisis gerakan, komputer dan tak kalah penting adalah alat-alat pengukur seperti di laboratorium faal. Yakni semacam pengukur tekanan darah, pengukur pernafasan, pengukur besar otot, dan sebagainya.

Perihal pengelola laboratorium silat ini, **Koesnadi** mengutarakan keyakinannya akan kemampuan UGM. "Sangat saya junjung tinggi kepercayaan PB IPSI ini dan saya berani menerimanya karena di UGM pencak silatnya berbagai aliran dan kuat-kuat. Di antaranya guru-guru besarnya disusun ada 12 pendekar, di antaranya dosen-dosen. Pendekar yang dosen itulah yang nantinya mengelola laboratorium ini, dibantu oleh mahasiswa-mahasiswa tentunya," katanya bersemangat.

"Suatu ketika barangkali akan menyelidiki tenaga dalam," lanjutnya. "Kalau sekarang lebih banyak standardisasi apa yang ada dulu. Mumpung orang-orang yang jadi sumber masih ada. Mumpung masih bisa ditemui."

Untuk mereka-mereka yang sudah uzur jadi tidak bisa ke sini, orang laboratorium yang akan ke sana.

Misalnya seorang mahasiswa dengan video recorder atau tape recorder mendatangi seorang pendekar, beberapa hari di sana mencari dan mengumpulkan bahan-bahan untuk dibawa dan didiskusikan di laboratorium. "Kita usahakan sebaik mungkin sesuai kemampuan UGM untuk menjadikan laboratorium ini sebagai pusat penelitian nasional. Kemudian bila suatu ketika ada pendekar-pendekar dari luar Indonesia yang datang dan menginap di sini kemudian mempelajari, ... silakan!" katanya.

Kalau tidak ada aral melintang, akhir tahun ini bangunan akan diresmikan. "Saya ingin sekali laboratorium ini sudah selesai menjelang bulan Desember," ujar **Koesnadi** kepada Balairung. **(Eko Djun)**
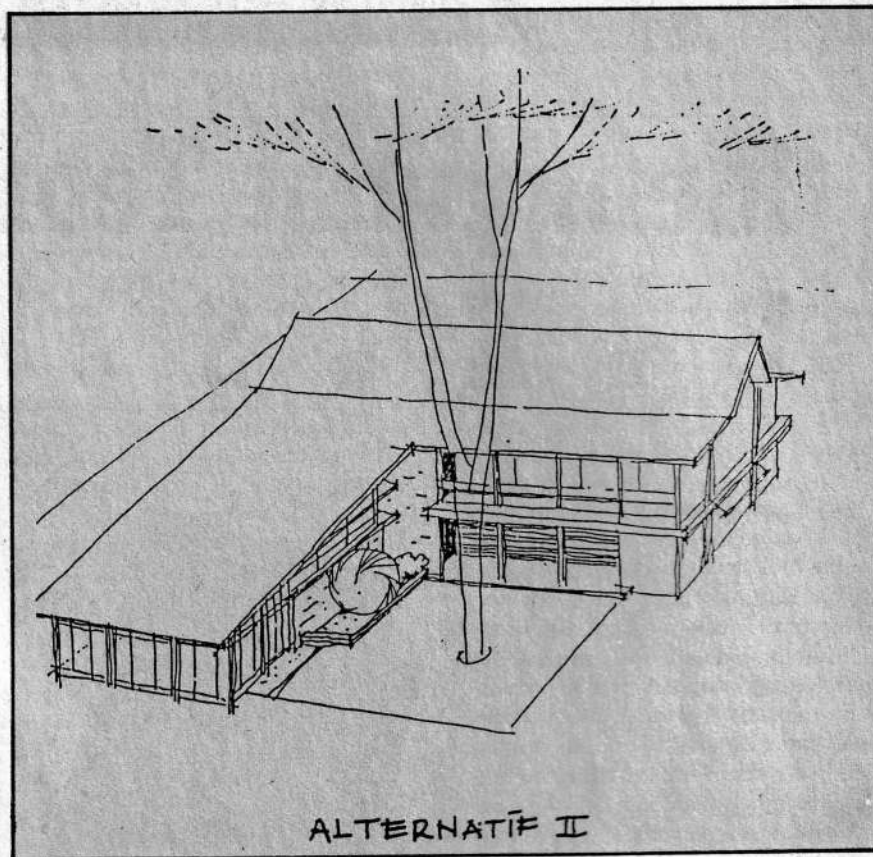
Menggugat Teori-Teori B.E.S.A.R

Kegagalan hampir semua negara Dunia Ketiga mengikuti jejak negara-negara industri maju telah membangkitkan kritik-kritik yang tajam terhadap teori modernisasi. Kritik-kritik itu terungkap dalam apa yang disebut tesis ketergantungan dan keterbelakangan *(dependency and under development thesis).* Tesis ini semula dicetuskan oleh **Paul Baran** dan kemudian dikembangkan oleh beberapa pemikir ekonomi dan sosial seperti **Fernando H. Cardoso, Theotino dos Santos, Andre Gunder Frank, Samir Amin** dan lain-lain.[1]

Tasis ketergantungan dan keterbelakangan ini mengatakan bahwa teori modernisasi ternyata telah gagal menerangkan mengapa bantuan modal yang mengalir ke Dunia Ketiga tak mampu mengangkat negara-negara itu pada tingkat ekonomi yang sama atau paling tidak mendekati negara-negara industri maju. Kegagalan ini disebabkan karena teori modernisasi tidak melihat adanya struktur ekonomi dunia yang timpang, yang tercermin dengan adanya pusat dan pinggiran atau utara dan selatan.[2] Di samping itu teori modernisasi juga tidak melihat adanya keterbelakangan yang bersumber pada kepincangan-kepincangan di dalam.

Dengan kritik-kritik yang tajam terhadap teori modernisasi itu maka tesis ketergantungan dan keterbelakangan menjadi laku di kalangan para pemikir ekonomi dan sosial di Dunia Ketiga. Banyak kaum cendekiawan yang memandang bahwa tesis ini seolah-olah telah secara tuntas mampu menjelaskan sebab-sebab timbulnya kemiskinan di Dunia Ketiga. Meskipun tesis ini lengkapnya ber-
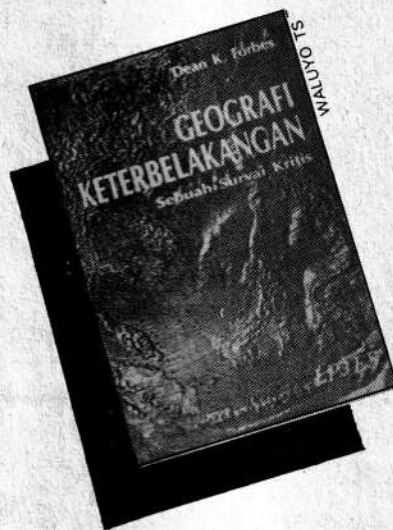
Judul Buku	:	*Geografi Keterbelakangan - Sebuah Survai Kritis*
Penulis	:	*Dean K. Forbes*
Penerjemah	:	*A. Setiawan Abadi*
Penerbit	:	*LP3ES, Jakarta, 1986*
Tebal	:	*xiv + 253 halaman.*

nama "ktergantungan dan keterbelakangan", dimana kata yang kedua mengacu pada kepincangan-kepincangan di dalam, namun tesis rupa-rupanya telah begitu cenderung terobsesi pada kepincangan tatanan ekonomi global. Sebab, kepincangan di dalam yang mereka katakan sebagai warisan historis kolonial pun dasarnya juga bersumber dari hubungan antara "pusat" dan "pinggiran", yang untuk masa lampau konotasinya adalah negeri induk dan daerah jajahan. Dengan demikian tesis ini telah menjadi reduksionis dan simplistis, karena ia hanya melihat adanya satu sumber keterbelakangan atau kemiskinan Dunia Ketiga. Oleh karena itu terapi yang ditawarkannya pun juga menjadi terlalu sederhana, yakni melepaskan diri dari integrasi ekonomi dunia — satu hal yang nampaknya mustahil dan sangat revolusioner — atau merombak tatanan itu menuju tatanan yang lebih adil — satu hal yang tentu meminta pengorbanan negara-negara industri maju, sehingga dalam implementasinya tidak akan gampang, kalau tak boleh dikatakan tidak mungkin.

Tesis ketergantungan dan keterbelakangan, di samping reduksionis dan simplistis, juga tak mampu menjelaskan mengapa kemiskinan di Dunia Ketiga itu terus bertahan. (Tesis ini hanya menjelaskan mengapa Dunia Ketiga miskin). Di sinilah tesis ini mulai mendapat kritik yang tajam dari sejumlah pemikir ekonomi dan sosial. Para pengritik ini menolak pandangan yang reduksionis dan simplistis itu. Mereka mengajukan teori yang mengatakan bahwa keterbelakangan Dunia Ketiga tak bisa hanya dijelaskan dengan menunjuk pada ketimpangan struktur ekonomi dunia, tetapi juga harus didekati dengan memahami latar belakang historis masing-masing negara Dunia Ketiga. Dengan kata lain, kemiskinan Dunia Ketiga itu harus dipahami dengan tidak hanya melihat faktor eksternal, tetapi juga internal. Salah seorang pemikir mengenai berbagai macam teori keterbelakangan yang bukunya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah **Ian Roxborough.**[3]

Jika Roxborough menekankan pada aspek historis dari setiap masyarakat Dunia Ketiga, yang bukan-

nya tidak mungkin bisa terjebak kembali ke dalam tesis yang dikritiknya mengingat bahwa hampir semua negara di Dunia Ketiga memiliki kesamaan historis, yakni kolonialisme, maka buku karya **Dean K. Forbes** ini — sebagaimana tampak pada judulnya — mencoba memahami keterbelakangan Dunia Ketiga dari aspek geografis. Kedua pendekatan ini nampak saling melengkapi, yang dengan demikian akan terjadi perpaduan antara dimensi waktu dan ruang. Dalam bahasa yang konkret, jika dikatakan bahwa suatu masyarakat mengalami keterbelakangan, maka keterbelakangan itu terjadi pada tempat dan dalam proses waktu tertentu.

Satu kritik yang tajam dari pendekatan geografis ini adalah didapatkannya suatu pengertian Dunia Ketiga — yang sering diasosiasikan sebagai kawasan periferi — bukan sebagai suatu kawasan yang tunggal, tetapi sebagai suatu kawasan yang bermosaik. Pertanyaan "Adakah satu Dunia Ketiga?" harus dijawab, "Tidak, tidak ada!" (hal. 23)

Dengan pendekatan geografis ini ternyata struktur ekonomi dunia tidak bisa diterangkan dengan hanya menunjuk adanya pusat dan piggiran dimana pusat mengeksploitasi pinggiran. Antara pusat dan periferi itu terdapat apa yang disebut semi-periferi. Dalam suatu kawasan atau "region", semi-periferi itu terkadang berkedudukan sebagai "pusat" dari periferi-periferi di seputarnya. Dengan kata lain, di dalam satu kawasan itu terbentuk satu struktur regional tersendiri sebagai suatu substruktur dari struktur global. Sebuah contoh konkret dari hal ini Forbes menunjuk kawasan Afrika bagian selatan, di mana Afrika Selatan berkedudukan sebagai "pusat" dari negara-negara di seputarnya, misalnya seperti Swaziland, Lesotho, Botswana dan sebagainya (hal. 103).[4] Dengan demikian "devision of labour" dunia tidaknya sesederhana seperti yang digambarkan dalam tesis ketergantungan dan keterbelakangan. "Division of labour" dunia dapat digambarkan sebagai suatu jaringan yang cukup canggih, tetapi tetap tersusun secara hirarkis.

Sebagaimana telah disinggung di atas bahwa tesis ketergantungan dan keterbelakangan hanya terbatas pada penjelasan mengapa terjadi kemiskinan di Dunia Ketiga, tetapi tidak untuk pertanyaan mengapa kemiskinan itu tetap bertahan. Kajian geografis, atau lebih tepatnya geografi pembangunan dengan mengamati kekhasan pada setiap masyarakat yang diteliti mencoba menjawab pertanyaan kedua itu. Dikatakan di sini bahwa untuk mengamati kekhasan itu maka kita dituntut untuk menjauhkan fokus dari penyusunan teori besar kepada riset empiris menurut waktu dan ruang tertentu, yang dikaitkan dengan pembentukan kehidupan orang-orang, tugas sehari-hari, eksploitasi, dominasi seks, reproduksi tenaga buruh dan pembentukan kelas, yang kesemuanya sebenarnya juga dapat diteorisasikan (hal. 212). Dengan kata lain di sini kita tidak boleh terpancang pada "mode of production" saja — sebagaimana yang sering ditonjol-tonjolkan oleh tesis ketergantungan — tetapi juga harus memperhatikan hubungan-hubungan sosial dan reproduksi sosial.[5] Pendek kata, unsur manusia (dan ruang) tak boleh diabaikan.

Dengan penghampiran terhadap segala aspek sosial itu maka diperoleh suatu pemahaman baru bahwa pengertian keterbelakangan ternyata tidak hanya terbatas pada masalah tingkat produktivitas ekonomi atau akumulasi modal, namun lebih dari itu adalah konteks sosial dan pasial dalam mana hubungan-hubungan ekonomi ini dipelihara, dipertahankan bahkan dikembangkan (hal. xiv). Dengan kata lain di sini memang ada semacam mekanisme sosial yang berfungsi untuk mengembangkan, atau paling tidak memelihara hubungan-hubungan sosial dan reproduksi sosial itu. Dan inilah jawaban terhadap pertanyaan mengapa keterbelakangan di Dunia Ketiga itu tetap bertahan. Ini berarti kita harus kembali melihat faktor-faktor internal, yang sudah barang tentu akan berlainan antara kawasan yang satu dengan yang lainnya. Sekarang persoalannya adalah mengapa kondisi yang demikian itu terus direproduksikan dan apakah rintangan bagi transformasinya?

Demikianlah **Forbes** menutup buku ini dengan mengajukan pertanyaan di atas. Pertanyaan itu dijawabnya sendiri dengan mengatakan bahwa jawaban terhadap pertanyaan itu "sudah tentu banyak dan rumit, tetapi bagi para ahli geografi satu jalan untuk mengatasinya adalah melihat lebih mendalam pada hubungan antara unsur manusia dan struktur sosial, dan terutama pada pengaruh konteks — ruang dan tempat — dalam proses politik" (hal. 214). Jika demikian halnya, maka kajian geografis pun tak bisa lepas begitu saja dari teori-teori pembangunan yang sudah ada, termasuk tesis ketergantungan atau analisa-analisa marxian yang banyak di gugat di sini. Analog dengan sejarah, dan memang demikianlah halnya, kajian geografis tanpa menggunakan konsep-konsep dalam ilmu-ilmu sosial sebagai alat bantu dalam menganalisa hanyalah akan menghasilkan potret tanpa kerangka kerja yang jelas.

Budiawan,
Fakultas Sastra Sejarah, UGM.

Catatan :

1. Situa Arief dan Adi Sasono, *Ketergantungan dan Keterbelakangan*, (Jakarta: Lembaga Studi Pembangunan dan Sinar Harapan, 1984), hal. 23.
2. Dengan adanya bantuan luar negeri sebenarnya kepentingan asing semakin mendapat keuntungan dari tiap dolar yang ditanamnya dan demi kepentingannya pula negara-negara Dunia Ketiga dibuat tergantung. Lih. Adi Sasono, "Tesis Ketergantungan dan Kasus Indonesia", *Prisma* No. 12, 1980.
3. Ian Roxborough, *Teori-teori Keterbelakangan*, (Jakarta: LP3ES, 1986).
4. Ketergantungan negara-negara "the periphery of the periphery" terhadap negara yang berpemerintahan rasialis inilah yang antara lain senantiasa menghambat gerakan anti rasionalisme di kawasan itu.
5. Sebuah ilustrasi tentang hal ini secara kongkrit digambarkan pada halaman 206. "Anak-anak kelas buruh dipaksa mengikuti sekolah, tetapi ketika di sekolah, banyak di antaranya bersikap bermusuhan terhadap sekolah itu. Mereka berontak melawan yang berkuasa di sekolah itu sebagai pemberontakan setengah sadar terhadap struktur masyarakat secara keseluruhan. Suatu penafsiran fungsionalis akan berpendapat bahwa mereka perlu "dididik" untuk menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat akan suatu angkatan kerja terdidik yang stabil, tetapi ternyata mereka berjuang menentang "sistem itu". Namun, ironisnya, hasil akhir dari perjuangan mereka adalah menjamin reproduksi dari kelas buruh karena kurangnya pendidikan mereka praktis memastikan bahwa mereka dipekerjakan atau hanya cocok untuk pekerjaan-pekerjaan dengan gaji rendah. .... Dengan demikian di satu pihak tingkah laku ditentukan terlebih dahulu secara tegas oleh struktur obyektif; di lain pihak tingkah laku menghasilkan dan juga mereproduksi struktur obyektif".

Maut Mengancam di mana-mana

Apa yang disajikan Hildyard dalam buku *Cover up* ini, mungkin suatu kasus yang jarang pembaca temui. Pembaca dengan mudah dapat menikmati kasus-kasus tentang ketidakmampuan "manusia modern" untuk membereskan tanggungjawabnya atas akibat-akibat yang berbahaya dari kemajuan "teknologi modern". Teknologi yang kini berkembang dan telah mampu membebaskan sebagian manusia dari rantai perbudakan alam, justru menjebaknya ke dalam perbuatan-perbuatan keji dan memaksa manusia melakukan tindakan yang bersifat membunuh diri sendiri.

Teknologi modern tersebut dan produknya serta seluk-beluknya yang hanya dipahami oleh segelintir anggota masyarakat, telah mengantarkan masyarakat terkungkung dalam kondisi manipulasi yang mengancam keselamatan hidupnya. Celakanya, tak banyak dari anggota masyarakat yang menyadari keadaan penindasan itu.

Jumlah penduduk yang terus membengkak, dengan sendirinya juga menuntut peningkatan fasilitas untuk mempernikmat kehidupan sehari-harinya. Konsekuensinya, aneka ragam kebutuhan hidup di segala bidang berkembang sangat pesat pula. Teknologi dan produk-produk baru diperlukan hadir untuk memenuhi kebutuhan hidup. Seperti kebutuhan di bidang kesehatan, energi, pertanian, komunikasi, pemukiman dan lain-lain.

Kebutuhan hidup di atas akhirnya memaksa masyarakat untuk terbuai dengan propaganda dari berbagai produk dan jasa. Dalam memperindah tempat tinggal misalnya, mereka beramai-ramai membeli asbes sebagai penghias atap rumah. Namun mungkin kita tak pernah membayangkan bahwa asbes yang dapat memperindah ruangan tamu, juga berbahaya bagi
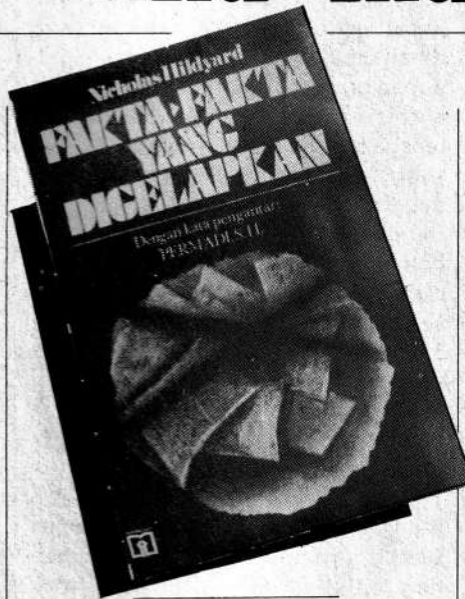
Judul Buku	:	*Fakta-fakta Yang Digelapkan*
Judul Asli	:	*Cover up*
Penulis	:	*Nicholas Hildyard*
Penerjemah	:	*Redaksi Pustaka Azet*
Penerbit	:	*Pustaka Azet, Jakarta, 1987*
Tebal	:	*XII + 220 halaman*

keselamatan hidupnya. Asbes, jika dibebaskan di udara, serat-seratnya lalu menjadi debu dan bila ini terhirup, maka akan menimbulkan kerusakan yang tak dapat diperbaiki. Sekali debu tersangkut pada paru-paru, ini dapat menggoyahkan jaringanlembut pembuluh cabang tenggorokan, menyebabkan tumbuhnya birat yang keras dan tebal, dan seterusnya berkembang menjadi kanker paru-paru (hal. 186-188).

Ketika kita membeli obat-obatan untuk menjaga kesehatan, umumnya, kita menganggap bahwa perusahaan-perusahaan farmasi pasti jujur dalam menguji obat-obatnya, sehingga memenuhi syarat-syarat yang paling keras sebelum dipasarkan. Menurut penulis tidak semua perusahaan bersikap seperti itu. Penelitian yang menunjukkan produk baru dari segi buruk, terlampau sering didiamkan, dipalsukan atau diabaikan; pemasaran obat-obatan atau bahan-bahan kimia dan mereka yang tahu bahwa barang tersebut tidak aman atau para ilmuwan yang berbicara tegas untuk memperingatkan khalayak ramai tentang bahaya-bahaya yang terjadi ditakuti-takuti (hal. 171). Bahkan sebuah perusahaan obat Jerman,Chemie Grunental, demi mencegah perusahaannya dari kerugian dan adanya perkara perdata, perusahaan itu mengerahkan detektif-detektifnya supaya mencurahkan perhatiannya terhadap para dokter yang mengecam produk-produknya (hal. 161).

Sedangkan kebutuhan lainnya, misalnya seperti energi alternatif yang relatif lebih murah, telah memalingkan berbagai negara untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakatnya dengan bersandar pada energi nuklir. Tahun 2000 energi listrik dunia sekitar 20% diperkirakan berasal dari energi nuklir. Memang diakui, bahwa energi nuklir telah memberikan manfaat dan keuntungan besar dalam memenuhi kebutuhan energimanusia — selain faedah lainnya, tetapi tak dapat dihindari bahwa energi nuklir juga telah membawa bencana bagi keselamatan manusia dan ekosistemnya. Berkaitan dengan hal ini, Hildyard memaparkan bahaya nuklir lebih luas lagi. Jadi tidak hanya dari segi bahaya radiasi semata. Dengan data yang cukup meyakinkan, penulis mengungkapkan berkembangnya jaringan intelijen, pemerkosaan hak-hak sipil dan pemalsuan data-data tes laboratorium di industri Nuklir Kerr-Mcgee Corpration, Amerika Serikat (hal. 3-28).

Kematian misterius Karen Silkwood, seorang Analis laboratorium Kerr-Mcgee Corporation dapat pem-

baca pelajari, ini akan membuktikan bahw industri nuklir adalah suatu proyek yang mengerikan bagi kelangsungan hidup ummat manusia.

Cara hidup modern yang semakin membuat masyarakat tergantung pada alat-alat listrik — mulai dari radar sampai satelit, transmiter televisi, menara relay microwave, tungku-tungku mocrowave, radio CB dan jaringan listrik bervoltase tinggi — sebenarnya telah memperparah polusi *kabut asap elektronik* ini lebih berbahaya dari polusi kimiawi. Terhadap segunung bukti bahwa radiasi frekuensi-frekuensi rendah sekitar tingkat di bawah 10 milwatt sebagai standar dapat menimbulkan akibat-akibat berbahaya bagi kesehatan. Seperti menurunnya kesuburan, katarak, kanker, rusaknya keturunan dan kelahiran (hal. 80). Di Rusia, sorotan yang dipancarkan lebih dari 4 miliwatt bujursangkar adalah taraf yang dapat menimbulkan akibat-akibat yang merusak secara biologis dan lingkungan (hal. 81).

Selain kasus-kasus tersebut di atas, masih banyak kasus-kasus lainnya yang dapat pembaca simak dalam buku ini - di sana, Di Bawah Tempat Pembuangan Limbah; Radiasi; Seberapa yang diperbolehkan?; Konspirasi Pestisida; Hujan Asam: Racun dari Langit; Timah: Racun Dalam Bensin — yang akan mengantarkan pembaca ke dalam "gerbang ketakutan", bahwa kehidupan di bumi yang hanya satu ini telah tidak aman lagi. Ancaman datang dari segala penjuru, ruang bumi tempat kita bertahan hidup sudah sesak dengan polutan (bahan pencemar), ya, apa yang kita dengarkan (informasi, suara), yang kita telan, yang kita hirup, yang kita lihat, semuanya mengandung potensi merusak keberadaan manusia. Dan ancaman yang mengerikan, seperti yang diungkapkan buku ini, pertama, adalah ketidakjujuran para ilmuwan dan intelektual yang bekerja pada perusahaan-perusahaan swasta maupun lembaga-lembaga pemerintah. Kedua, ketidakterbukaan pihak pemerintah dan perusahaan-perusahaan swasta menerima hasil penelitian para ilmuwan dan intelektual yang jujur.

Banyak pelajaran yang dapat pembaca serap dari buku *Cover up* ini. Penulis telah membuktikan dengan baik, bahwa tidak sedikit lembaga-lembaga pemerintah, perusahaan-perusahaan swasta dan lembaga-lembaga riset yang diharapkan akan menjadi pelindung masyarakat sebagai konsumen berbagai macam produk dan jasa, justru berfungsi sebaliknya, masyarakat dilegitimasi dan semakin dijerumuskan dalam *maniak kenikmatan* yang merusak kelangsungan hidupnya.

Kehadiran buku ini sangat tepat, sebab pada bulan Juni 1987 pemerintah mulai mencanangkan berlakunya Peraturan Pemerintah nomor 29 Tahun 1986 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Semoga buku ini akan merupakan rujukan yang akan membuat masyarakat semakin kritis dan kreatif.

* **Suporahardjo** *adalah mahasiswa fakultas kehutanan.*

KOLOM

IST

Laksono Trisnantoro Sulaiman

SOAL DEMONSTRASI

Bicara tentang gambaran sosok mahasiswa, mungkin sama saja di mana-mana. Entah itu di Southampton, Harvard, Koln, UPN, ITB, atau di UGM sini. Mahasiswa, pribadi-pribadi yang khas. Erat dengan buku-buku, suka "mengumbar" idealisme, berusaha menikmati masa mudanya, agak alergi dengan disiplin ketat, dan terkadang urakan. Tapi jangan masukkan mahasiswa akademi militer ke gambaran ini. Lain soal.

Dalam sosok mahasiswa yang serupa itu, pasti ada perbedaan-perbedaan. Orang bijak dulu bertutur "lain ladang lain belalang, lain lubuk lain ikannya". Mahasiswa yang ada di negeri berambut pirang akan lain dengan rekannya yang berada di negeri berambut hitam. Mereka yang hidup di negeri kulit kuning, akan lainpula dengan mereka yang ada di negeri kulit coklat. Bahkan di antara negeri-berkulit putih, kehidupan mahasiswanya juga ada perbedaan. Pendek kata dari gambaran umum tadi, mahasiswa masih bisa dipilah-pilah.

Contoh cara pemilahan adalah dengan melihat cara mereka berkomunikasi dengan sesama manusia, dengan dosennya, dengan masyarakat, atau dengan pemerintah. Hal ini mudah diamati. Komunikasi merupakan benda "abstrak" namun mudah dilihat dan dirasa. Coba, anda sekarang pasti sedang baca *Balairung*. Berarti anda telah terlibat dengan salah satu proses komunikasi dalam kehidupan mahasiswa UGM. Itu, **pak Doim,** dosen kita yang *killer* sedang berbicara dengan Dekan. Mereka lagi berkomunikasi. Untuk apa mahasiswa KKN? Salah satu tujuannya untuk komunikasi pula. Lho, anda ketua Senat Mahasiswa sedang menandatangani surat apa? Ini surat himbauan kepada pak Menteri agar uang SPP diturunkan. Biar ada komunikasi, jawabnya.

***

Pada suatu pagi, di musim semi yang hangat, ada kejadian menarik di kota Koln, Jerman Barat. Sekelompok anak muda dengan jas dokter — rupanya mereka mahasiswa kedokteran — membuat ulah. Mereka berdiri di pusat daerah belanja kota yang lagi ramai-ramainya di akhir pekan. Tidak hanya berdiri aja, tetapi juga berteriak, memasang spanduk-spanduk, poster-poster dan membagikan selebaran ke semua orang yang lewat. Saya mendekatinya, salah seorang demonstran menghadiahi sebuah selebaran dan berusaha membujuk saya untuk menandatangani buku tebal yang sudah berisi tanda tangan banyak sekali. Oh, rupanya mereka sedang protes soal perpanjangan kurikulum pendidikannya. Saya yang asing dengan kegiatan demonstrasi, tidak habis pikir. Kenapa soal kurikulm saja mereka sampai meninggalkan kampus untuk *strike,* mogok kuliah dan memilih pergi ke depan umum untuk unjuk rasa. Saya tanya si **Wolfgang,** demonstran yang memberi saya selebaran. Kenapa kalian pakai jalan ini? Efektif tidak? Apa nanti tidak diskors dan masuk bui?

"Oh tidak, sama sekali tidak banyak resikonya. Kami hanya mogok tiga hari. Apakah efektif? *Well,* ini masih tergantung pada para perunding kita. Demonstrasi ini hanya salah satu cara untuk memberitahu masyarakat. Kami punya masalah dan minta umum mendukung kami. Jika masyarakat mendukung, posisi kami lebih kuat dalam perundingan," jawabnya panjang dan buru-buru ia menambah "Silakan ikut tanda tangan untuk mendukung kami."

Saya pikir, benar jalan pikiran **Wolfgang.** Demonstrasi bukan satu-satunya cara, bahkan hanya sebagai pembantu saja. Lebih bersifat sebagai sarana komunikasi dengan masyarakat, syukur kalau cepat ber "dwifungsi" sebagai alat penekan. Namun saya pikir pula, jalan ini benar kalau dilakukan di negeri yang tidak mengharamkan demonstrasi. Kalau dilakukan di negara yang mengharamkannya, bisa susah, berantakan semua.

Walaupun demikian, toh komunikasi masih banyak bertumpu pada forum non-demonstrasi, seperti dikatakan **Wolfgang.** "Di samping demonstrasi, wakil-wakil kami di *student-government* terus mengadakan perundingan melalui forum-forum resmi universitas. Kalau perlu kami naik ke atas, dengan Menteri. Juga koran-koran kampus dari bermacam-macam ideologi memberitakannya, mereka mendukung kami. Lihat ini," katanya menunjuk setumpuk koran.

Saya kemudian teringat keadaan di kampus biru tercinta. Jenis-jenis komunikasi antar sivitas akademika relatif jauh kurang bervariasi dan lebih jarang dilakukan. Untung sekarang sudah ada *Balairung.*

Memang banyak perbedaan antara di sana dan di sini. Situasi budaya, sosial, politik dan berbagai hal lainnya yang berbeda, mempengaruhinya. Mana yang lebih baik? Semuanya tergantung kembali kepada variabel yang mempengaruhinya.

Tapi toh kita dapat belajar dari catatan sejarah kampus di Indonesia yang mengatakan; jangan seenaknya bikin demonstrasi, pers kampus harus bijak lestari agar dapat langgeng, para senator dan wakil-wakil mahasiswa harus pandai-pandai bertutur kata dan bertingkah agar dipercaya oleh pemerintah, dosen maupun sesama mahasiswa, dan masih banyak lagi.

Akan tetapi sejarah, naga-naganya akan berkata pula; jangan semuanya dihilangkan atau dikebiri hingga impoten, nanti mahasiswa tidak ada bedanya dengan siswa. ●

Drs. Med. Laksono Trisnantoro Sulaiman, mahasiswa FK-UGM tingkat Profesi

KOLOM

Oleh : Afnan Malay

POTRET DIRI

Bukan soal hobi atau tidak. Mendengar alunan musik, jelas beda dengan keasyikan membolak-balik sebuah album. Apalagi dalam album tersebut kita temukan foto orang yang kita kenal. Terlebih sang diri nampang di sana. Bila tidak, kita sering protes "Lho, aku mana?" Namun persoalannya bukan sekadar ada tidaknya *aku*. Ia — seperti isu apapun — bisa melebar. Tentu saja andai dalam foto, aksi kita dirasa kurang mengena.

Buktinya bisa *seabreg-abreg*. Seorang mahasiswi *misuh-misuh* waktu melihat tampangnya yang kurang aduhai. Padahal rekannya tahu persis bahwa dia bukan jenis makhluk fotogenik. Eh, malah pembidik kamera jadi *tong sampah* kemangkelan si mahasiswi. Itu, cuma satu dari sekian banyak aksinya, yang *rusak*. Sedang yang lain rata-rata pas. Nampaknya bagi dia sudah merupakan nila yang merusak sebelanga susu.

Memotret suatu obyek memerlukan berbagai pertimbangan dan ketelitian serta kerja sungguh-sungguh lagi serius. Maka akan lahir foto berkualitas.Kualitas Alasan yang kurang memancing adu argumen. Bah, siapa pula kontra kualifaid? Foto berkualitas lebih menohok obyek apa adanya. *Comme des choses.* Tapi tetap enak dipandang. Meneduhkan mata.

Sejarah tak lebih dari *kumpulan potret* masa lalu. Ia mampu berbicara banyak pada generasi berikutnya. Generasi kini. Dari sejarah banyak hal patut ditimba. Untuk membeberkannya, perlu kerja ekstra keras. Konon pula menjadikan sejarah bahan bacaan. Buku pelajaran. Berjuta-juta anak didik melahapnya. Tanpa apresiasi atau menggunakan juga, sebatas ia dapat. Adakah hikmah dan nilai? Apakah potret sejarah yang mereka pegang sudah proporsional? Inilah bentuk pertanyaan berjawab panjang. Bukan soal *check point,* pegang kancing baju ketemu jawabnya.

Instruksi presiden **Soeharto** mengenai perlunya usaha pelurusan sejarah di Indonesia terutama periode 1950-1965, bukan himbauan main-main. Siapapun sah mendebat mengapa hanya berkisar pada tahun 1950-1965? Moderator yang *baik* akan menengahi, "Debat itu kita tunda dulu". Gayung disambut. Tanda adanya sebongkah dinamisasi.

Berhamburanlah tanggapan. Bukan apa-apa. Yang ini memang untuk ditanggapi. Tanggap sejarah. Barangkali begitu.

Lalu, **Sartono Kartodirdjo** berbagi pendapat. Suaranya layak tiru. Artinya patut disimak baik-baik. Dalam soal sejarah — guru besar UGM ini — dialah orangnya. Dedikasi dan tanggung jawabnya tak perlu diragukan. Ialah pembuka tabir **Petani Banten.** Potret wajah kita semua, yang selama ini lebih banyak dibidik manusia barat. **Kuntowijoyo** mengacungkan jari," Saya usul", ujarnya, "Mbok ya penulisan sejarah tidak mandek pada persoalan sejarah politik. Tapi juga penulisan sejarah pendidikan, kebudayaan dan ekonomi." Bak sebuah gambar utuh, semakin banyak unsur yang nampak makin hidup gambar itu.

Memotret sejarah apa adanya karenanya bisa dipertanggungjawabkan, idaman banyak orang. Kita harus tahu sejarah kedirian kita sendiri. Mungkin betul, *errare humanum est.* Alpa itu manusiawi. Asal tidak jadi alasan berapologi. Bila menatap album sejarah tak perlu panik, "Lho, aku mana?" Celoteh hambar, andai obyeknya memang demikian. Tanpa *aku* di sana.

Membuka-buka lembar sejarah memang berbeda jauh dengan mendengar musik yang bisa meninabobokan. Formatnya justru terbalik. Bukan sekadar tahun-tahun dan nama-nama. Perlu *ekspansi* pengertian. Dengan *membaca* sejarah ada getar dalam tubuh. Getar kaki mengayun langkah. Katakanlah, rasa untuk bangkit.

Sulit memang memotret dengan lebih arif. Tapi kamera telah dibidikkan. Apapun jadinya itulah potret diri. Mubazir untuk protes. Ujud potret itu sudah baku, aktingnya pun tak bisa diulang. Sang tokoh mencipta sejarah atau sejarah melahirkan sang tokoh tidak soal. Peduli apa dengan duluan mana telur dengan ayam? Asal gambar yang kita lihat nanti benar-benar merupakan kiprah bangsa ini di masa silam. Tanpa pelunturan warna. Tanpa tambahan ornamen!

Penulis, Mahasiswa FH UGM

POJOK

- *Dr. Kuntowijoyo mengatakan, kalau ingin kehidupan demokrasi dilaksanakan dengan baik, maka adanya demokratisasi di kampus harus pula disertai demokratisasi di luar kampus.*
- **Tentu itu tidak berarti bahwa kampus tidak perlu demokratis jika di luar kampus tidak ada demokrasi. Kalau kehidupan kampus demokratis, Dr. Ronda yakin akan membias keluar kampus — asalkan kampus mempertahankan harga diri dan otonomisasinya.**
- *Drs. Subaroto, Kepala Kantor Wilayah Depdikbud DIY bilang, SMA Swasta jangan patah semangat karena mendapatkan "sisa-sisa" lulusan SMA dengan NEM sangat rendah karena kata Subaroto, NEM tidak menjamin kualitas siswa secara kontinyu.*
- **Pemahaman orang selama ini adalah bahwa NEM merupakan tolok ukur kualitas dan prestasi siswa. ......hidup di Indonesia ternyata tidak gampang, ukuran-ukuran yang ditetapkan serba tidak jelas. Apa mungkin Perguruan Tinggi juga tidak usah yakin dengan NEM lulusan SMA?**
- *Porkas semakin merajalela di mana-mana; tua, muda, anak-anak, laki-laki, wanita tidak mau saling ketinggalan, mereka ramai-ramai menebaknya. Undian 'nasib-nasiban" lain juga makin banyak ragam bentuknya.*
- **Aktivitas-aktivitas macam itu memang sangat cepat berkembang subur, dan sulit diberantas. Kecuali jika ada ketegasan.**
- *Dalam formulir Her Registrasi semester ini ada kolom isian untuk kegemaran mahasiswa (hobi). Dalam formulis tersebut kolom isian yang ada menyangkut kegiatan-kegiatan rekreatif macam olahraga, kesenian, pramuka, mendaki gunung, dan sejenisnya. Dan tidak memberi kesempatan pada pilihan terhadap jurnalistik/tulis menulis/pers mahasiswa.*
- **Sejak diterapkannya kebijaksanaan tahun 80 sampai sekarang, pers mahasiswa nampaknya masih disikapi "apriori" karena mungkin masih dianggap suka berontak dan merupakan biang keladi gerakan-gerakan "makar" mahasiswa. Mestinya semua pihak mulai berpikir positif dari sekarang.**
- *Menurut penilaian Bank Dunia lewat laporan tahunannya pada bulan Juli, Indonesia diakui sebagai negara yang mampu mengatasi krisis ekonomi yang sangat berat pada tahun ini.*
- **Mungkin karena *saking* seringnya mengalami krisis, sehingga cukup berpengalaman untuk mengatasinya.**

Doktor Ronda
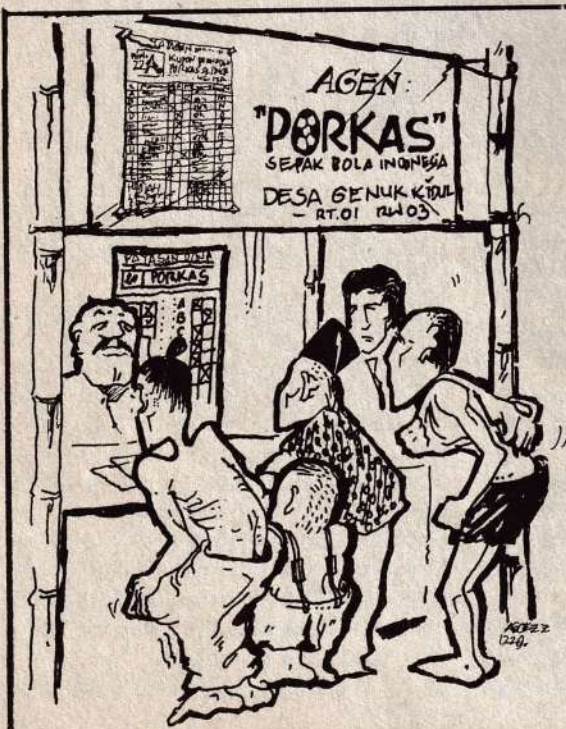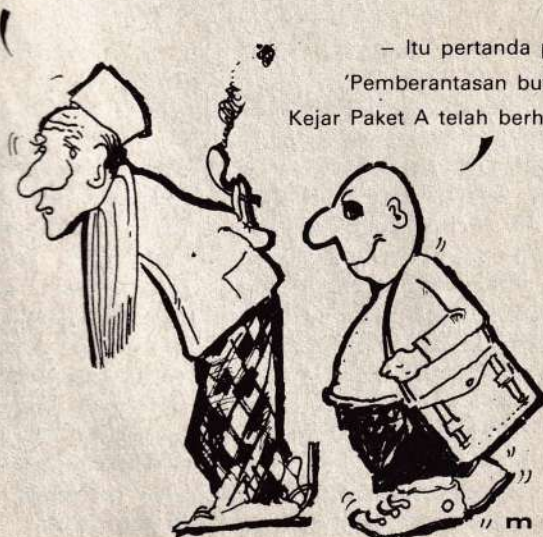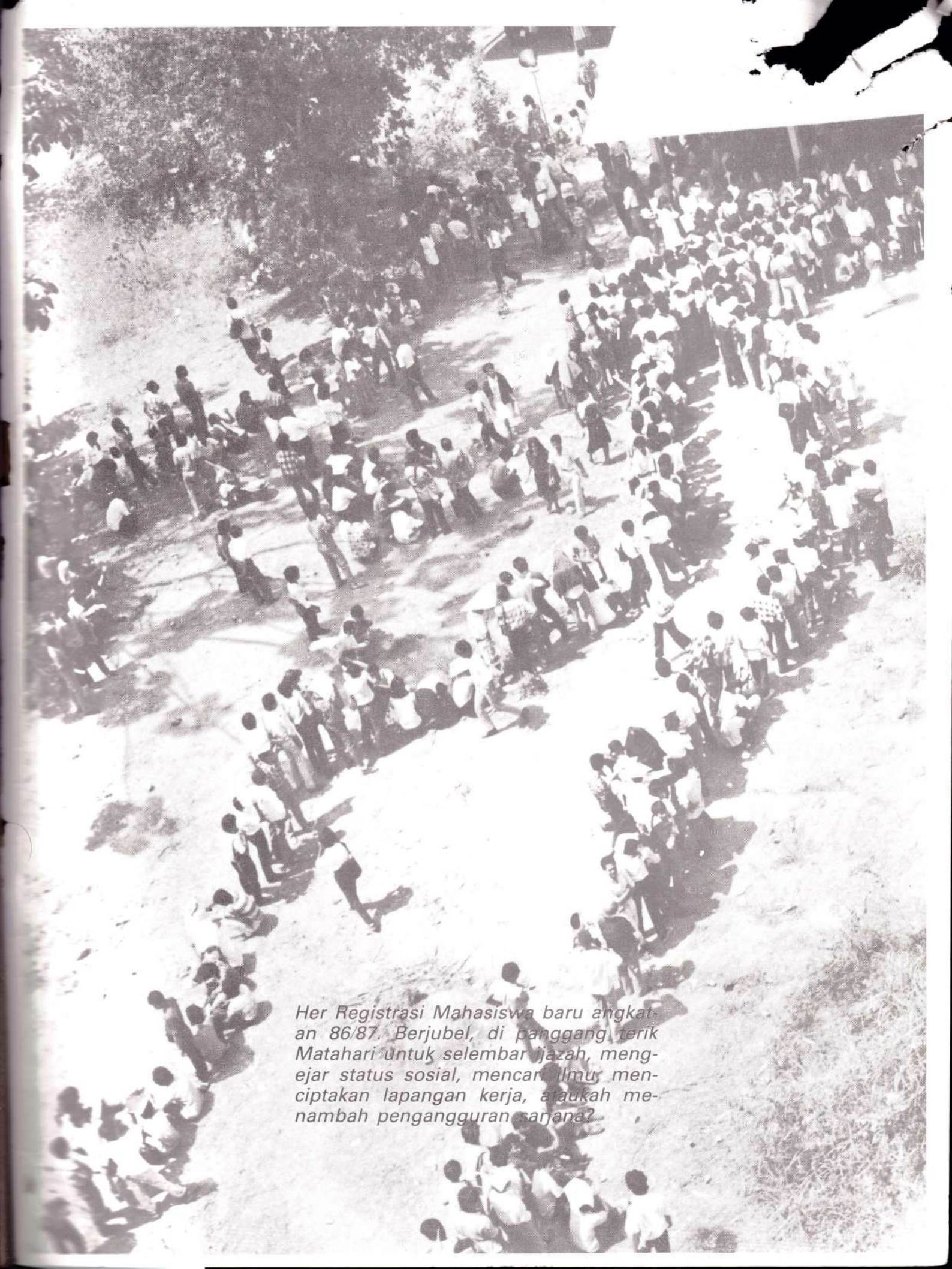
Her Registrasi Mahasiswa baru angkatan 86/87. Berjubel, di panggang terik Matahari untuk selembar ijazah, mengejar status sosial, mencari ilmu, menciptakan lapangan kerja, ataukah menambah pengangguran sarjana?